



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0909);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 1209);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0513);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Rencana...

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## Pasal 2

RKPD Daerah Tahun 2017, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2017.

## Pasal 3

RKPD Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.
- BAB VI : PENUTUP.

Pasal 3...

## Pasal 3

Isi serta uraian RKPD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2013-2018.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; dan
  - b. pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2017.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2017.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2017.

Pasal 8...

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 27

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1. ....	L
atar Belakang .....	I.1
1.2. ....	D
asar Hukum Penyusunan .....	I.2
1.3. ....	H
ubungan antar Dokumen .....	I.3
1.4. ....	S
istematika Dokumen RKPD .....	I.4
1.5. ....	M
aksud dan Tujuan .....	I.6
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD</b>	
<b>TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>II.1</b>
2.1. ....	D
ata dan Informasi Kondisi Umum Daerah .....	II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II.1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II.7
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	II.8
2.1.1.4 Demografi .....	II.9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II.11
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II.27
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II.27
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II.44
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II.56
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II.57
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II.59
2.1.4.3 Penataan Wilayah .....	II.60
2.1.4.4 Fasilitas Bank dan Non Bank .....	II.62
2.1.4.5 Ketersediaan Air Bersih .....	II.63
2.1.4.6 Fasilitas Listrik dan Telepon .....	II.64

2.1.4.7 Ketersediaan Restoran .....	II.66
2.1.4.8 Ketersediaan Penginapan .....	II.66
2.1.4.9 Iklim Berinvestasi .....	II.67
2.2. ....	E
valuasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II.73
2.3. ....	P
permasalahan Pembangunan Daerah .....	II.103
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah .....	II.103
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah .....	II.107

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

<b>DAERAH .....</b>	<b>III.1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III.1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah .....	III.1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 .....	III.5
3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah .....	III.5
3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah .....	III.16
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III.23
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III.9
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III.23
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III.23
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III.25
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III.33

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

<b>DAERAH .....</b>	<b>IV.1</b>
4.1. ....	T
tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV.1



4.2. ....	P
rioritas dan Pembangunan .....	IV.14

<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
<b>PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>V.1</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI.1</b>

### **TABEL**

Tabel 2.1 Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.4
Tabel 2.2 Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Dalam RTRW Kab. Tangerang 2011 - 2031 .....	II.5
Tabel 2.3 Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Tangerang .....	II.7
Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2015 .....	II.10
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.12
Tabel 2.5 Produk Domestic Regional Bruto Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah) .....	II.13
Tabel 2.6 Produk Domestic Regional Bruto Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah) .....	II.14
Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s.d 2017 .....	II.15
Tabel 2.8 Angka Melek Huruf dan APS Kabupaten Tangerang Tahun 2011 sd 2014.....	II.16
Tabel 2.9 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2014 .....	II.17

Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.18
Tabel 2.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Tangerang .....	II.18
Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.19
Tabel 2.13 Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2015 Kabupaten Tangerang .....	II.20
Tabel 2.14 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2013 Kabupaten Tangerang .....	II.21
Tabel 2.15 Status Gizi Balita Per Puskesmas Kab Tangerang .....	II.22
Tabel 2.16 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2013 .....	II.23
Tabel 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2013 .....	II.24
Tabel 2.18 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2014 .....	II.24
Tabel 2.19 Jumlah Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran menurut Jenisnya .....	II.25
Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2010 – 2015 .....	II.26
Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.27
Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.28
Tabel 2.23 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.28

Tabel 2.24 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2013 Kabupaten Tangerang .....	II.29
Tabel 2.25 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2014-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.31
Tabel 2.26 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013 .....	II.32
Tabel 2.27 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.33
Tabel 2.28 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.28
Tabel 2.29 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2015 Kabupaten Tangerang .....	II.30
Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Tangerang .....	II.35
Tabel 2.31 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.36
Tabel 2.32 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 Kabupaten Tangerang .....	II.39
Tabel 2.33 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.40
Tabel 2.34 Rasio Jumlah Layak Huni di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 s.d 2015 .....	II.41
Tabel 2.35 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 s.d 2014 .....	II.41
Tabel 2.36 Rasio Ijin Trayek Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.43
Tabel 2.37 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2013-2015 .....	II.43
Tabel 2.38 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2013 Kabupaten Tangerang .....	II.44

Tabel 2.39 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.44
Tabel 2.40 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Tangerang Tahun 2013 s.d 2015 .....	II.45
Tabel 2.41 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2013 s.d 2015 .....	II.45
Tabel 2.42 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.47
Tabel 2.43 Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Kabupaten Tangerang .....	II.48
Tabel 2.44 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (%) .....	II.49
Tabel 2.45 Penduduk Usia 15 Tahun Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Tangerang .....	II.50
Tabel 2.46 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013 s/d 2015 .....	II.52
Tabel 2.47 Jumlah LSM aktif Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang .....	II.54
Tabel 2.48 Rasio Jumlah Pos Kamling Per Desa Tahun 2015 .....	II.56
Tabel 2.49 Jumlah Organisasi Pemuda, Olahraga, dan Kepemudaan Tahun 2015 .....	II.56
Tabel 2.80 Jumlah PDRB per Sektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2011 s.d 2014 .....	II.58
Tabel 2.81 Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2011 s.d 2015 .....	II.59
Tabel 2.82 Rasio Panjang Jalan dan Sempadan Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.60
Tabel 2.83 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2013-2015 .....	II.60
Tabel 2.84 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.61

Tabel 2.85 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.61
Tabel 2.86 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.61
Tabel 2.87 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.62
Tabel 2.88 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.62
Tabel 2.89 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.62
Tabel 2.91 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Provinsi/Kabupaten Tangerang .....	II.64
Tabel 2.92 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Tangerang .....	II.64
Tabel 2.93 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Tangerang .....	II.65
Tabel 2.94 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.66
Tabel 2.95 Jumlah Komoditi Palawija Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2015 .....	II.69
Tabel 2.96 Jumlah Komoditi Sayur-sayuran Kabupaten Tangerang Tahun 2013–2015 .....	II.69
Tabel 2.97 Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Jenis Tahun 2013 – 2015 .....	II.69
Tabel 2.98 Luas Areal dan Produksi Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.70
Tabel 2.99 Budidaya Tambak di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.70
Tabel 2.100 Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.70
Tabel 2.101 Produksi Peternakan .....	II.71
Tabel 2.102 Capaian Indikator Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2015 .....	II.75

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Harga Konstan (adhk) 2010, Tahun 2014-2015 .....	III.2
Tabel 3.2 Distribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (adhk) 2010, Tahun 2014-2015 .....	III.3
Tabel 3.3 LajuPertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (adhk) 2010, Tahun 2014-2015 .....	III.4
Tabel 3.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Perbulan, Tahun 2011-2016.....	III.6
Tabel 3.5 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2016 .....	III.7
Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016 .....	III.7
Tabel 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2016 .....	III.8
Tabel 3.8 Pendapatan Penduduk 40% Terendah dan Gini Ratio di Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016 .....	III.10
Tabel 3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016 .....	III.12
Tabel 3.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016 .....	III.15
Tabel 3.11 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2017.....	III.17
Tabel 3.12 Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2017 .....	III.18
Tabel 3.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) .....	III.19
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2014 sd 2018 .....	III.21

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2014 sd 2018 .....	III.31
Tabel 3.16 Prioritas Anggaran Belanja Daerah .....	III.33
Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2014 sd 2018 .....	III.35
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan .....	IV. 2
Tabel 4.2 Hubungan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan .....	IV. 4
Tabel 4.3 Sinergi Prioritas Pembangunan .....	IV.16
Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 .....	IV.23
Tabel 5.1 Sasaran, Program dan SKPD Pelaksana Kabupaten Tangerang Tahun 2017 .....	V.1

## **GAMBAR**

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 .....	I.4
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Tangerang .....	II.2
Gambar 2.2 Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang .....	II.5
Gambar 2.3 Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami .....	II.9

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi potensi SDA dan SDM diharapkan mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Dalam konsiderens Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa perlu disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Dalam hal perencanaan pembangunan tahunan atau jangka pendek Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjadi satu kesatuan antara penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah maka



Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sendiri adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun melalui urutan kegiatan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan sebagai berikut : Alur Proses Teknokratik – Strategis, Alur Proses Partisipatif dan Alur Proses Legislasi dan Politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RKPD yang terpadu.

1. Alur Proses Teknokratik - Strategis merupakan alur teknis perencanaan yang disusun oleh para perencanan daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan dan program kegiatan sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.
2. Alur Proses Partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Alur ini menghasikan kesepakatan atas tahapan penting pengambilan keputusan perencanaan.
3. Alur Legislasi dan Politik merupakan alur proses konsultasi dengan legislasi (DPRD Kabupaten Tangerang) untuk menghasilkan Penyusunan Akhir RKPD. Pada alur ini diharapkan DPRD Kabupaten Tangerang dapat memberikan kontribusi pemikiran, review dan evaluasi atas hasil baik pada tahapan Alur Proses Teknokratik Strategis maupun Alur Proses Partisipatif.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPD 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

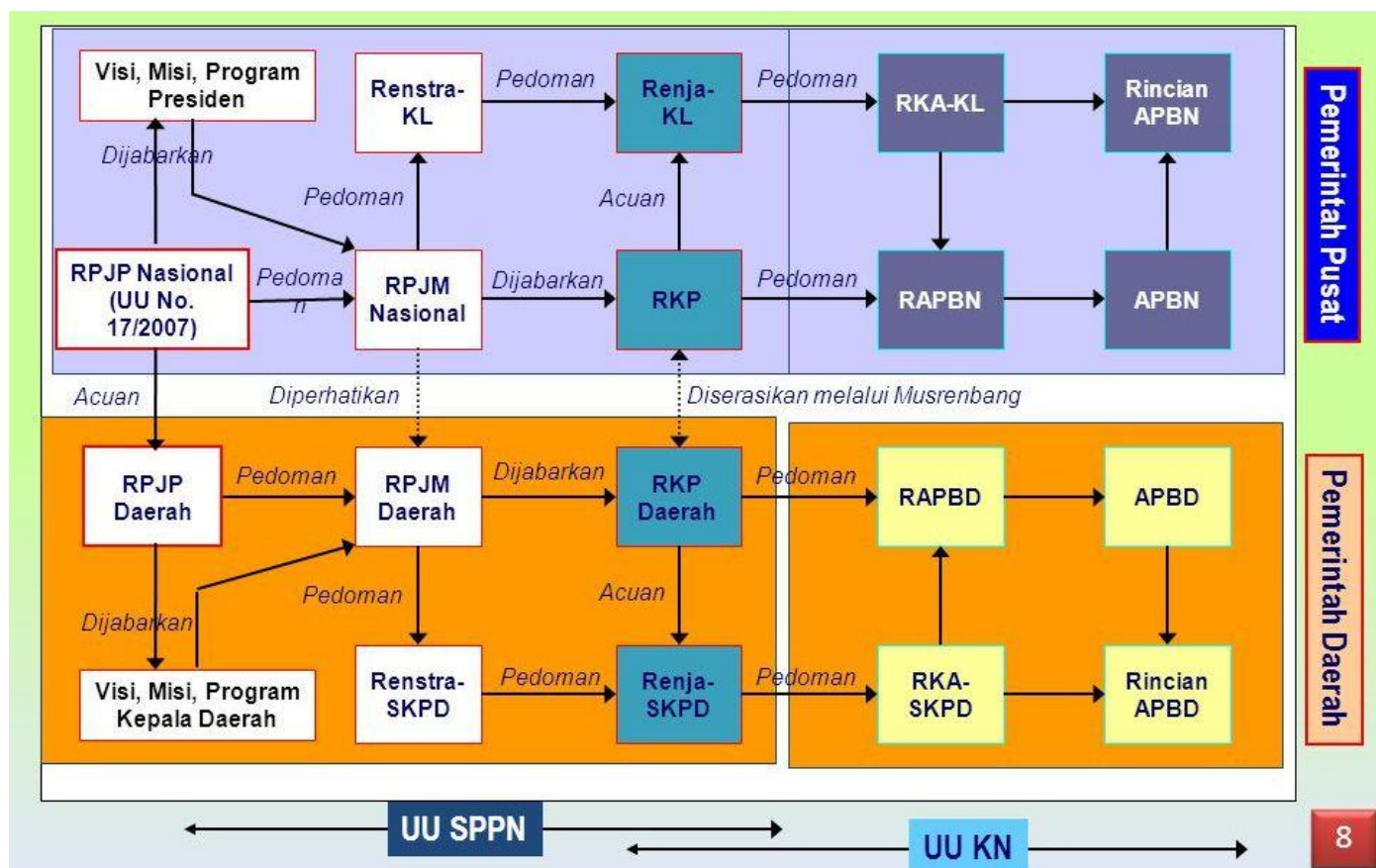
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 16 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 4 tahun 2012 Tentang RPJMD Provinsi Banten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2009 Tentang RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 11 tahun 2011 Tentang RTRW;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 11 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Tangerang;

17. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelimpahan kewenangan Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tangerang nomor 100 nomor 2014 tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan musrenbang, forum satuan kerja perangkat daerah dan pasca musrenbang Kabupaten Tangerang.

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD mempedomani dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2025, RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031 dan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat mengikat. Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD yaitu RKPD memuat program dan kegiatan SKPD, penjabaran Renstra SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan menurut UU Nomor 25**  
**Tahun 2004**



Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dibawah ini :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2015

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Menjelaskan mengenai Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang didalamnya juga disampaikan terkait Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan

##### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan serta mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah

##### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Menjelaskan mengenai Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang didalamnya terkait dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2017 yang akan datang.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Memuat matrik rincian fungsi, urusan, prioritas, program dan kegiatan yang pendanaannya di pilah menurut sumber dari APBD Kabupaten Tangerang, APBD Propinsi dan APBN Tahun 2017

## **BAB VI PENUTUP**

Menjelaskan mengenai komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dalam rangka menuntaskan permasalahan daerah

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Penyusunan RKPD ini adalah mempersiapkan dokumen perencanaan sebagai kerangka acuan bagi dinas/instansi (SKPD) dalam mengarahkan kegiatan/rencana kerjanya pada pencapaian target tahunan di 2017 dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sesuai RPJMD yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dan mengukur tingkat capaian kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja SKPD;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta rancangan APBD T.A 2017;
3. Sebagai alat kontrol stakeholder dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah didalam perencanaan;
4. Sebagai dokumen yang mengawal upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
5. Sebagai upaya didalam mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Pada Bab II berikut ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun 2015 selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 dan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2016 sebagai bahan acuan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

#### **2.1. Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa.

##### **2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan Wilayah**

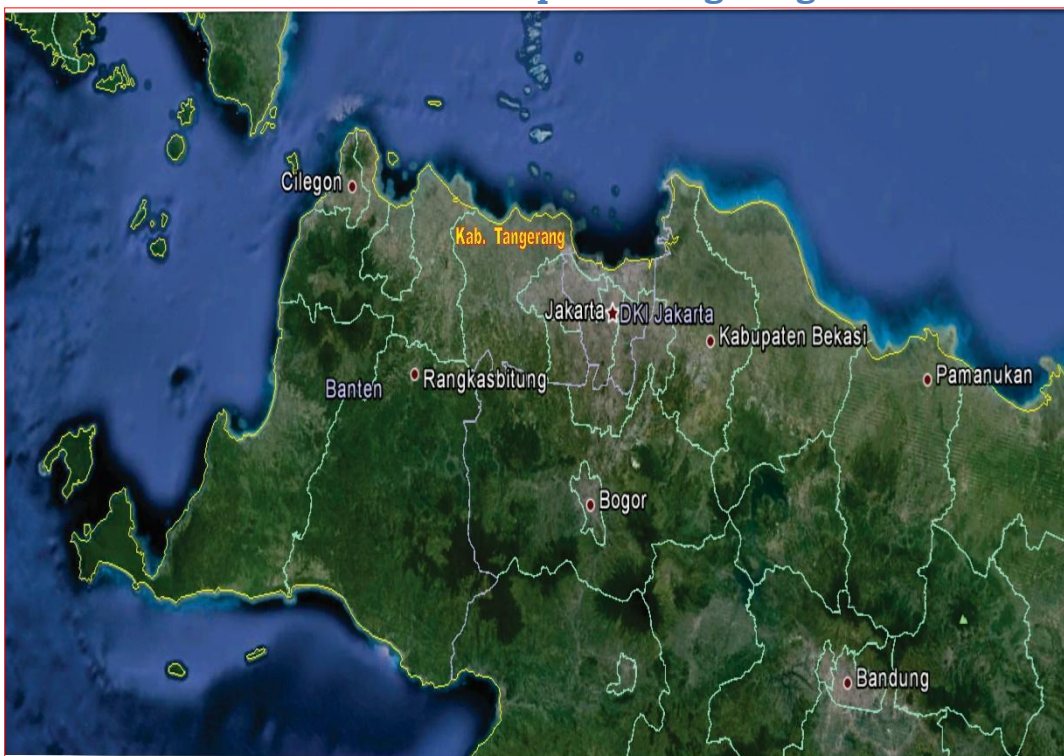
###### **a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak
- Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

**Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Tangerang**



Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, *trickling down* dan *backwash effect*, sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di

Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

### **b. Topografi**

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

### **c. Geologi / Jenis Tanah**

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari *aluvial* kelabu, *aluvial* kelabu tua, asosiasi *aluvial* kelabu tua dan *glei* humus rendah, asosiasi *glei* humus, dan *planosol*, *regosol* coklat, asosiasi *latosol* merah dan *latosol* merah kecoklatan, *padsolic* kuning, asosiasi *padsolic* kuning, asosiasi *padsolic* kuning dan *hidromorf* kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah pedataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah *glei regosol* dan sedikit *padsolic* yaitu asosiasinya.

### **d. Klimatologi**

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 22,8 – 33,9°C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9°C dan suhu minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8°C. Rata-rata kelembaban udara dan



intensitas matahari sekitar 78,3 % dan 59,3 %. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 177,3 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Desember dengan hari hujan sebanyak 20 hari.

**Tabel 2.1 Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

Uraian Data	Nilai	Satuan
<b>DATA GEOGRAFIS</b>		
a. Luas Wilayah	959,6	km <sup>2</sup>
b. Ketinggian	85	mdpl
c. Sungai Terpanjang (S. Cisadane)	414,3	Ha
d. Wilayah Terluas (Rajeg)	53,7	Ha
e. Wilayah Terkecil (Sepatan)	17,32	Ha
<b>IKLIM</b>		
a. Rata-rata Temperatur Udara	24,4 – 32,3	°C
b. Rata-rata Kelembaban Udara	76,7	%
c. Rata-rata Intensitas Matahari	55,4	%
d. Rata-rata Curah Hujan	192,5	mm
e. Rata-rata Kecepatan Angin	4,1	knot

*Sumber : BPS Kabupaten Tangerang*

#### **e. Hidrogeologi**

Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

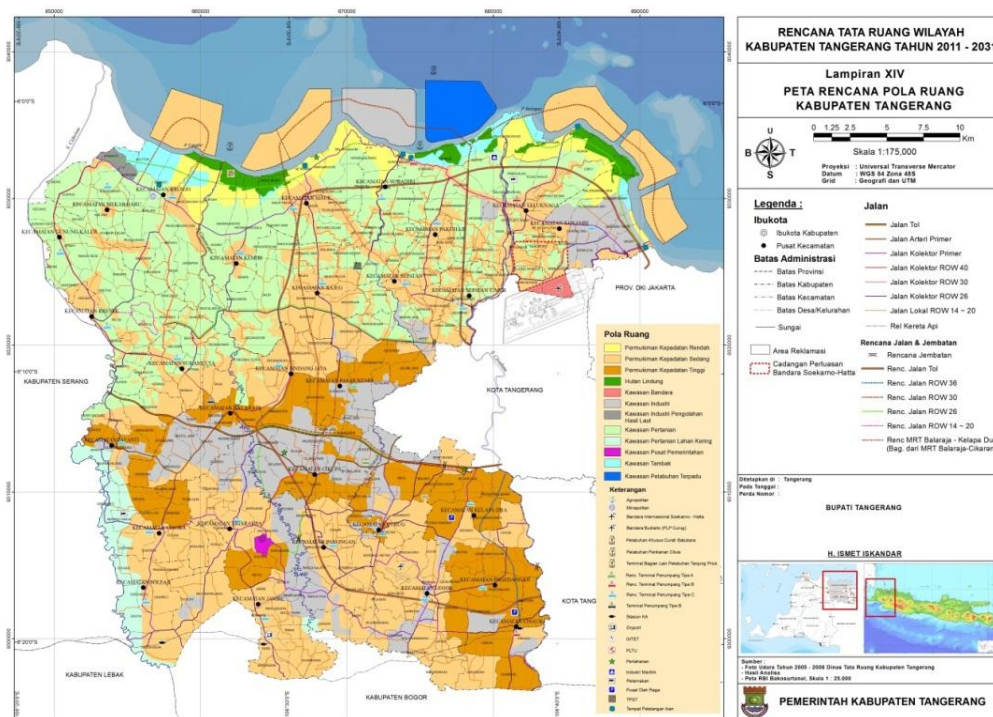
Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi

intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

## f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

**Gambar 2.2** Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang



Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada tabel berikut.

**Tabel 2.2** Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Dalam RTRW Kab. Tangerang 2011 - 2031

Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten
<b>A. Kawasan Lindung</b>		
Kawasan Hutan Lindung	1.576	0,164
Kawasan Sempadan Pantai	510	0,053
Kawasan Sempadan Sungai (termasuk	880	0,092
Kawasan RTH Perkotaan	17.266	1,799

<b>Uraian</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>% Terhadap Luas Kabupaten</b>
Kawasan RTH Publik	11.511	1,200
Situs Makam Gajah Barong, Situs Makam Nyi Mas Gamparan, Situs Makam Buyut Siyam, Situs Makam Syech Mubarak, Situs Makam Buyut Sandi, Situs Makam Buyut Mali, Situs Makam Nyi Saritinem, Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan Situs Makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa	-	-
Kawasan Rawan Bencana**	-	-
<b>Sub jumlah</b>	<b>31.743</b>	<b>3,308</b>
<b>B. Kawasan Budidaya</b>		
kawasan pertanian tanaman pangan;		
- Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan	29.295	3,053
- Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan	2.833	0,295
Kawasan peternakan	-	-
Kawasan agropolitan	3.638	0,379
<b>Kawasan peruntukan perikanan</b>		
- Kawasan perikanan tangkap	-	-
- Kawasan perikanan budi daya	1.567	0,163
- Pengolahan dan pemasaran hasil	-	-
- Rencana pengembangan kawasan	880	0,092
<b>Kawasan peruntukan industri</b>		
- industri besar	8.407	0,876
- industri sedang	3.586	0,374
- industri kecil dan/atau industri	-	-
<b>Kawasan peruntukan pariwisata</b>		
- Kawasan peruntukan	-	-
- Kawasan peruntukan	-	-
- Kawasan peruntukan	-	-
<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>		
- permukiman perkotaan	27.937	2,911
- permukiman perdesaan	16.631	1,733
<b>Kawasan Peruntukan Lainnya</b>		
- Kawasan reklamasi	9	0,001
- Kawasan pertahanan dan Pusat rehabilitasi/lembaga	12.084	1,259
- Kompleks sekolah pelayaran		
- Rencana pengembangan Tempat		
- Rencana pembangunan stadion		
- Rencana pembangunan rumah		
<b>Sub jumlah</b>	<b>115.85</b>	12,074
<b>Jumlah</b>	<b>147.601</b>	15,382
<b>Luas Menurut UU No.4 Tahun 2002</b>		-

Sumber dari Teknis RTRW Kabupaten Tangerang 2012 – 2032

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya dipantai barat-selatan khususnya Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Tangerang**

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Lindung	Pagedangan, Solear, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Kosambi, Mauk, Kemiri dan Sukadiri	<p>a) Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>);</p> <p>b) Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sempadan pantai ditetapkan selebar minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat mengikuti kondisi fisik pantai</li> <li>2. Sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m di kiri dan kanan sungai untuk sungai besar dan 50 m dari kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
			dan c) Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
2	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Sungai Cisadane, Cidurian, Cipasilian, Cilontar, Cimanceuri, Cileles, Cilarangan, Cirarab, Pecah, Kali Cigung	Untuk sempadan sungai di wilayah permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi meliputi 10 sampai 15 meter	Perlindungan terhadap sempadan sungai meliputi sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai kecil

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang, 2013.

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang pantai utara yang membentang di seluruh wilayah Pantura.

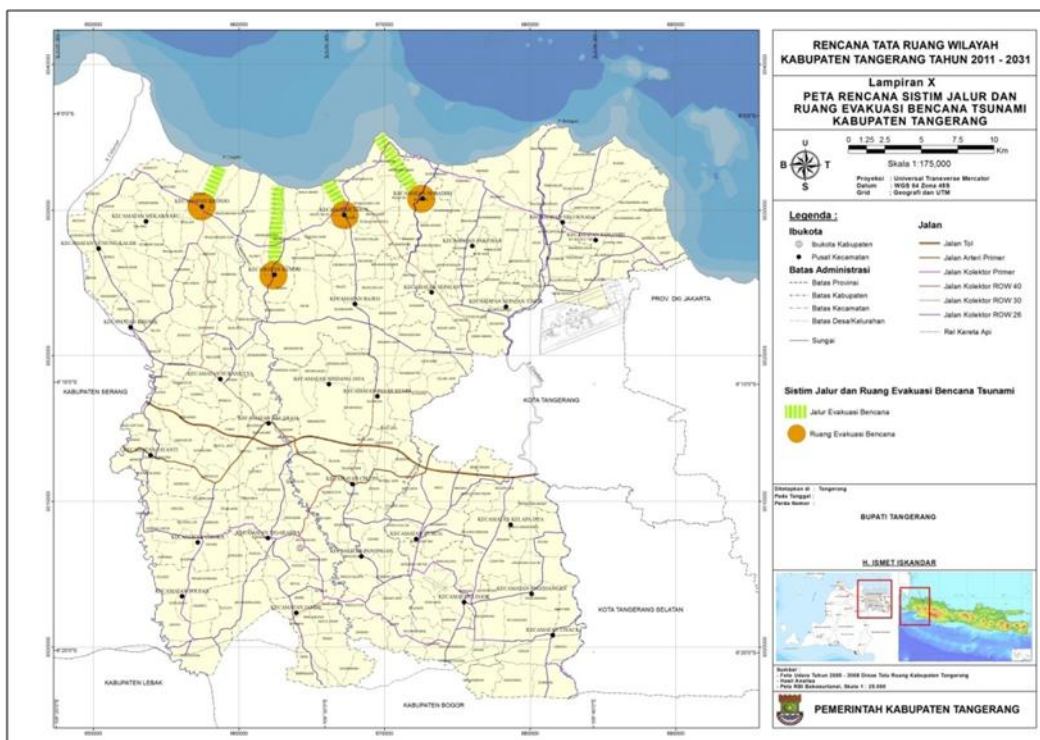
Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat.

Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang

meliputi:

- a) Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
- b) Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai utara yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki resiko dampak parah yaitu pada kecamatan kronjo, Kemeru dan Mauk.
- c) Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut)
- d) Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh dibawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan

**Gambar 2.3 Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami**



#### 2.1.1.4 Demografi

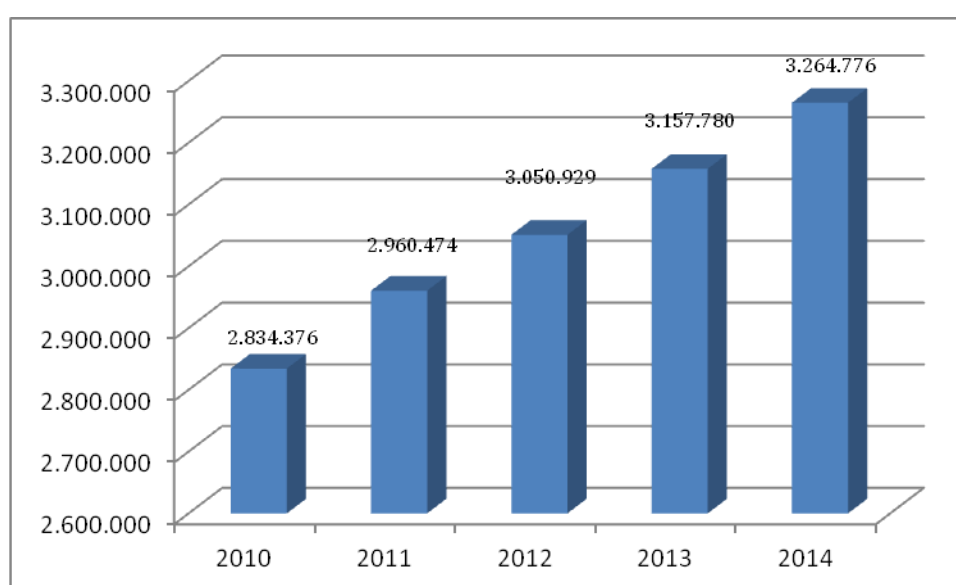
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sebesar 3.370.594 jiwa dengan penyebaran penduduk Tangerang masih

terkonsentrasi di Kecamatan Pasar Kemis yakni sebesar 313.945 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hasil proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 3.264.776 orang terdiri dari 1.671.390 laki-laki dan 1.593.386 orang perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pertahun dalam kurun waktu satu tahun terakhir sebesar 3,402%. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2010-2014 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2014**



Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang luasnya 959,61 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk mencapai 3.512 jiwa/km. Hasil Susenas Tahun 2015 menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Tangerang adalah 104,81 artinya komposisi penduduk laki-laki 4,90 persen lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan sex rasio diatas 100 dimungkinkan dengan banyaknya pendatang yang terserap di lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan laki-laki. Jumlah penduduk per Kecamatan dan sex ratio dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel. 2.4 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RASIO
1	Cisoka	47.482	44.271	91.753	107,25
2	Solear	45.006	43.207	88.213	104,16
3	Tigaraksa	76.448	73.116	149.564	104,56
4	Jambe	22.781	21.594	44.375	105,50
5	Cikupa	139.776	130.854	270.630	106,82
6	Panongan	66.313	63.960	130.273	103,68
7	Curug	103.609	97.295	200.904	106,49
8	Kelapa Dua	109.754	111.228	220.982	98,67
9	Legok	61.053	56.717	117.770	107,64
10	Pagedangan	58.189	55.549	113.738	104,75
11	Cisauk	40.668	39.124	79.792	103,53
12	Pasarkemis	159.692	154.253	313.945	103,53
13	Sindang Jaya	46.568	44.710	91.278	104,16
14	Balaraja	66.238	62.213	128.451	106,47
15	Jayanti	36.299	35.108	71.407	103,39
16	Suka Mulya	32.932	31.747	64.679	103,73
17	Kresek	32.883	31.899	64.782	103,08
18	Gunung Kaler	25.984	25.634	51.618	101,37
19	Kronjo	29.496	28.185	57.681	104,65
20	Mekar Baru	18.993	17.975	36.968	105,66
21	Mauk	41.863	40.357	82.220	103,73
22	Kemiri	22.152	20.388	42.540	108,65
23	Sukadiri	28.975	26.968	55.943	107,44
24	Rajeg	84.324	80.788	165.112	104,38
25	Sepatan	59.041	55.104	114.145	107,14
26	Sepatan Timur	47.714	45.235	92.949	105,48
27	Pakuhaji	57.689	54.770	112.459	105,33
28	Teluknaga	81.592	77.708	159.300	105,00
29	Kosambi	81.401	75.722	157.123	107,00
	Total	1.724.915	1.645.679	3.370.594	104,81

Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2016

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang



digunakan.

Perkembangan ekonomi akhir tahun 2014 mengalami perlambatan akibat pengaruh pelemahan ekonomi global, kondisi ini berdampak terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan PDRB Kabupaten Tangerang. PDRB Kabupaten Tangerang masih didominasi oleh kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 39,28%. Kemudian diikuti Sektor Konstruksi yang mempunyai kontribusi sebesar 12,30%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menduduki peringkat ketiga dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Tangerang yakni menyumbang 10,57%. Diperingkat keempat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,75%. Dibawahnya ada sektor Real Estate sebesar 6,35%. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas ada di posisi ke enam yang pada tahun 2014 sebesar 5,52%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 4,59%, sektor Informasi dan Komunikasi 3,24%, . Transportasi dan Pergudangan 2,76%, jasa pendidikan 2,52%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 1,58%, jasa lainnya 1,55%, penyediaan akomodasi dan makan minum 1,53%, jasa perusahaan 0,97%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,39%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06% dan diurutan terakhir pertambangan dan penggalian 0,05%.

**Tabel 2.5 Produk Domestic Regional Bruto Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)**

KATEGORI	2010	2011	2012*)	2013*)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,943,498.19	4,339,726.34	4,624,705.32	5,540,497.15	6,297,203.33
B. Pertambangan dan Penggalian	33,474.47	37,302.94	38,104.45	39,780.75	45,219.56
C. Industri Pengolahan	25,779,552.85	28,461,799.88	30,757,833.51	34,874,414.37	36,651,945.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,690,949.47	2,265,931.24	2,587,019.14	2,419,360.42	5,148,123.33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,647.44	46,818.20	46,763.24	49,698.88	54,200.61
F. Konstruksi	5,763,260.84	6,701,831.15	7,771,428.60	9,392,221.97	11,474,382.30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,379,363.02	7,471,955.54	8,393,871.46	9,006,379.13	9,866,316.71
H. Transportasi dan Pergudangan	1,371,150.49	1,547,256.49	1,726,499.05	2,065,054.93	2,578,560.65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	796,931.75	888,922.81	992,210.08	1,135,510.81	1,427,432.64
J. Informasi dan Komunikasi	2,282,440.25	2,469,652.92	2,558,832.91	2,618,437.59	3,021,687.90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,308,768.30	2,794,751.91	3,402,082.05	3,933,563.84	4,284,716.62
L. Real Estate	4,026,928.22	4,496,883.90	4,787,024.57	5,291,473.61	5,924,677.19
M,N. Jasa Perusahaan	508,075.71	584,382.11	645,612.45	755,067.50	904,081.06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	826,056.75	991,510.02	1,091,586.10	1,189,040.62	1,471,034.02
P. Jasa Pendidikan	1,294,510.48	1,468,292.01	1,666,339.98	1,931,831.26	2,355,844.43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,717.01	272,059.90	285,914.53	308,847.27	361,207.65
R,S,T,U. Jasa lainnya	799,093.72	902,181.70	927,823.97	1,133,653.10	1,445,388.93
<b>PDRB</b>	<b>58,099,418.94</b>	<b>65,741,259.06</b>	<b>72,303,651.40</b>	<b>81,684,833.19</b>	<b>93,312,022.33</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015

**Tabel 2.6 Produk Domestic Regional Bruto Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)**

KATEGORI	2010	2011	2012*)	2013*)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,943,498.19	4,102,067.31	4,119,358.17	4,369,627.28	4,582,187.17
B. Pertambangan dan Penggalian	33,474.47	34,836.17	34,254.42	32,405.59	33,521.01
C. Industri Pengolahan	25,779,552.85	27,243,830.18	28,522,128.38	30,947,376.93	31,382,253.46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,690,949.47	1,695,973.23	1,703,354.13	1,629,316.15	1,755,944.76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,647.44	51,341.39	50,954.77	53,373.79	57,821.46
F. Konstruksi	5,763,260.84	6,219,899.07	6,826,992.42	7,501,833.06	8,448,397.10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,379,363.02	7,019,061.77	7,798,044.85	8,103,858.35	8,543,789.51
H. Transportasi dan Pergudangan	1,371,150.49	1,516,490.73	1,655,237.90	1,751,682.90	2,009,197.14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	796,931.75	856,996.52	897,424.90	935,696.91	1,066,959.84
J. Informasi dan Komunikasi	2,282,440.25	2,486,313.56	2,747,071.53	2,889,537.67	3,432,313.02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,308,768.30	2,623,124.95	2,900,825.95	3,165,109.03	3,266,731.82
L. Real Estate	4,026,928.22	4,348,911.63	4,628,115.86	4,910,299.17	5,422,375.14
M,N. Jasa Perusahaan	508,075.71	549,731.36	583,586.30	624,475.19	706,290.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	826,056.75	850,083.90	899,640.06	904,502.06	1,048,090.87
P. Jasa Pendidikan	1,294,510.48	1,344,931.02	1,386,326.71	1,430,801.50	1,617,460.45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,717.01	252,364.15	258,582.88	259,052.00	287,412.39
R,S,T,U. Jasa lainnya	799,093.72	826,534.52	836,382.12	879,540.39	1,038,272.47
<b>PDRB</b>	<b>58,099,418.94</b>	<b>62,022,491.45</b>	<b>65,848,281.34</b>	<b>70,388,487.97</b>	<b>74,699,017.92</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015

## b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Angka inflasi disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.7 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s.d 2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Inflasi	10.2	10.3	4.68

Sumber : PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2015

### **c. Pemerataan Pendapatan**

Dari hasil olahan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, pada tahun 2015 diperoleh bahwa total pendapatan 40% penduduk Kabupaten Tangerang yang memiliki pendapatan terendah adalah 32,9 % dari total pendapatan seluruh penduduk. Ini berarti kesenjangan distribusi pendapatan penduduk Tangerang masih tergolong kecil. Kesenjangan yang terjadi tersebut tidak disebabkan oleh perbedaan pendapatan si Kaya dan si Miskin, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan daerah tempat tinggal yaitu perdesaan dan perkotaan.

### **d. Kesejahteraan Sosial**

#### **1. Pendidikan**

##### **a. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 96.37 dari 97.25 atau naik sebesar kurang lebih 1 angka melek huruf atau sekitar 3.000 orang.

**Tabel 2.8 Angka Melek Huruf dan APS Kabupaten Tangerang Tahun 2011 s.d 2014**

Uraian	2011	2012	2013	2014
Angka Melek Huruf (persen)	95.86	95.89	96.37	97.25
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)/Metode Baru	7.96	8.07	8.18	8.20
<b>Angka Partisipasi Sekolah (%)</b>				
- Usia SD (7 - 12) th	98.66	98.62	98.75	99.47
- Usia SLTP (13 - 15) th	88.41	91.53	91.27	94.32
- Usia SLTA (16 - 18) th	48.88	58.26	62.31	64.37

#### **b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT) atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tangerang adalah 8,20 tahun pada tahun 2014, dari tahun ketahun

mengalami kenaikan sebagai mana Tabel Berikut ini:

**Tabel 2.9 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2014**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,85	7,96	8,07	8,18	8,20	8,22

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

### **c. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 untuk jenjang SD mengalami peningkatan dari 96.74 menjadi 97.57 hal ini disebabkan kenaikan dari jumlah penduduk usia dasar yang meningkat mendekati 3.000 orang sehingga membuat kenaikan persentase. Sedangkan untuk APM SMP juga mengalami peningkatan dari 82.22 menjadi 84.35 dikarenakan faktor yang sama dan untuk APM jenjang SMA mengalami peningkatan dari 54,75 menjadi 55,31.

### **d. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Pada tahun 2015 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 105.73 SMP/MTs sebesar 96.28 hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

	Uraian	2013	2014	2015
	SD/MI			
	Jumlah Siswa Kelompok Usia 7-12 Tahun yang bersekolah di SD/MI	307.281	365.557	368.315
	Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun	333.792	339.207	348.363
	APK SD./MI	92.06%	107.77%	105.73%
	SMP/MTs			
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs	131.479	158.402	166.879
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	173.88	171.243	173.326
	APK SMP/MTs	75.61%	92.50%	96.28%

Sementara itu untuk data per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Tangerang**

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Siswa Usia 7-12	Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun	APK	jumlah siswa usia 13-15 tahun	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK
1	Cisoka	9.131	9.528	95,83	3.918	4.74	82,66
2	Solear	15.206	15.3	99,39	5.876	7.612	77,19
3	Tigaraksa	21.115	27.903	75,67	6.004	13.883	43,25
4	Jambe	12.139	13.132	92,44	3.709	6.534	56,76
5	Cikupa	16.123	20.692	77,92	6.122	10.295	59,47
6	Panongan	11.075	12.155	91,11	4.726	6.048	78,14
7	Curug	9.958	11.748	84,76	2.543	5.845	43,51
8	Kelapa Dua	25.988	31.804	81,71	8.863	15.824	56,01
9	Legok	13.77	13.363	103,05	4.431	6.649	66,64

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Siswa Usia 7-12	Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun	APK	jumlah siswa usia 13-15 tahun	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK
10	Pagedangan	6.682	6.845	97,62	3.549	3.406	104,20
11	Cisauk	5.838	6.119	95,41	1.821	3.045	59,80
12	Pasar Kemis	7.899	8.698	90,81	2.758	4.328	63,72
13	Sindang Jaya	16.998	16.931	100,40	5.58	8.424	66,24
14	Balaraja	9.973	11.711	85,16	6.538	5.827	112,20
15	Jayanti	11.119	11.836	93,94	4.285	5.889	72,76
16	Sukamulya	14.182	16.573	85,57	6.185	8.246	75,01
17	Kresek	12.943	16.216	79,82	3.64	8.068	45,12
18	Gunung Kaler	6.182	7.466	82,80	5.237	3.715	140,97
19	Kronjo	4.866	4.658	104,47	1.765	2.318	76,14
20	Mekar Baru	6.982	8.176	85,40	2.59	4.068	63,67
21	Mauk	4.074	4.513	90,27	2.432	2.245	108,33
22	Kemiri	5.441	5.927	91,80	1.976	2.949	67,01
23	Sukadiri	5.779	6.798	85,01	2.417	3.383	71,45
24	Rajeg	17.732	22.651	78,28	5.714	11.27	50,70
25	Sepatan	7.847	9.444	83,09	2.84	4.699	60,44
26	Sepatan Timur	8.94	9.694	92,22	1.909	4.823	39,58
27	Pakuhaji	9.184	9.114	100,77	3.683	4.534	81,23
28	Teluknaga	4.822	5.44	88,64	1.97	2.706	72,80
29	Kosambi	4.298	3.926	109,48	2.14	1.953	109,58

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

#### e. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015 untuk jenjang pendidikan SD sebesar 58.306 SMP sebesar 51.710 SMA sebesar 31.369 lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

NO	Uraian	2013	2014	2015
1	SD	55.063	58.306	58.306



NO	Uraian	2013	2014	2015
2	SMP	44.701	51.710	51.710
3	SMA	27.140	31.369	31.369
4	Perguruan Tinggi	-	-	-

## 2. Kesehatan

### a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun pada tahun 2015 sebesar 312 jiwa sedangkan jumlah kelahiran hidup sebesar 61.816 jiwa. Maka AKB dan AKHB Kabupaten Tangerang berdasarkan data yang tercatat pada dinas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.13 Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2015 Kabupaten Tangerang**

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian bayi usia dibawah 1 tahun
1	Cisoka	1657	8
2	Solear	1601	6
3	Tigaraksa	2752	11
4	Jambe	853	8
5	Cikupa	4802	12
6	Panongan	2353	8
7	Curug	3495	14
8	Kelapa dua	3.8	11
9	Legok	2.183	10
10	Pagedangan	2067	18
11	Cisauk	1409	7
12	Pasar kemis	5532	22
13	Sindang jaya	1756	9
14	Balaraja	2452	15
15	Jayanti	1348	7

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian bayi usia dibawah 1 tahun
16	Sukamulya	1272	16
17	Kresek	1266	7
18	Gunung kaler	979	2
19	Kronjo	1157	13
20	Mekarbaru	678	3
21	Mauk	1593	13
22	Kemeri	839	4
23	Sukadiri	1031	9
24	Rajeg	3158	13
25	Sepatan	2054	7
26	Sepatan timur	1774	10
27	Pakuhaji	2052	17
28	Teluknaga	2872	21
29	Kosambi	3031	11
	Jumlah	61816	312

### b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk usia harapan hidup pada tahun 2013 sebesar 70,01 tahun. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.14 Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2014 Kabupaten Tangerang**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Angka Harapan Hidup	68.86	68.92	68.96	68.98

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015

### c. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur yang di ukur berdasarkan standar WHO.WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota

untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang menurut data jumlah balita yang ditimbang dan jumlah balita yang mengalami gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 1113 balita, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.15 Status Gizi Balita Per Puskesmas Kab Tangerang**

NO	PUSKESMAS	D	GIZI BURUK		GIZI KURANG		MALNUTRISI		GIZI BAIK		GIZI LEBIH		Persentase Malnutrisi Kecamatan	Gizi Buruk	Gizi Kurang	JUMLAH ABSOLUT MALNUTRISI KEK.
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%				
1	SURADITA	3.466	18	0,52	147	4,24	165	4,76	3284	94,75	17	0,49	5,88%	0,64%	5,24%	340
2	CISAUK	2.319	19	0,82	156	6,73	175	7,55	2108	90,90	36	1,55				
3	CURUG	10.381	15	0,14	97	0,93	175	1,69	10258	98,82	11	0,11	1,03%	0,18%	0,85%	214
4	BINONG	4.333	11	0,25	28	0,65	39	0,90	4279	98,75	15	0,35				
5	JL. KUTAI	889	3	0,34	0	0,00	3	0,34	886	99,66	0	0,00	1,83%	0,36%	3,33%	338
6	JL. EMAS	3.870	12	0,31	50	1,29	62	1,60	3786	97,83	22	0,57				
7	KELAPA 2	3.879	16	0,41	117	3,02	133	3,43	3716	95,80	30	0,77	2,90%	0,44%	2,46%	231
8	BOJONG NANGKA	5.773	21	0,36	119	2,06	140	2,43	5453	94,46	180	3,12				
9	LEGOK	5.264	24	0,46	135	2,56	159	3,02	5099	96,87	6	0,11	2,88	0,46%	2,43%	303
10	BOJONG KAMAL	1.603	3	0,19	27	1,68	30	1,87	1571	98,00	2	0,12				
11	CARINGIN	1.109	8	0,72	34	3,07	42	3,79	948	85,48	119	10,73	1,63%	0,28%	1,35%	359
12	PAGEDANGAN	10.513	48	0,46	255	2,43	303	2,88	10169	96,73	41	0,39				
13	CIKUPA	14.942	47	0,31	264	1,77	311	2,08	14535	97,28	96	0,64	3,60	0,13%	3,47%	430
14	PASIR JAYA	7.098	15	0,21	33	0,46	48	0,68	7027	99,00	23	0,32				
15	PANONGAN	11.942	16	0,13	414	3,47	430	3,60	11376	95,26	136	1,14	7,69%	0,51%	7,18%	801
16	BALARAJA	5.874	24	0,41	275	4,68	299	5,09	5457	92,90	118	2,01				
17	GEMBONG	4.546	29	0,64	473	10,40	502	11,04	3957	87,04	87	1,91	5,29	0,93%	4,36%	239
18	JAYANTI	4.516	42	0,93	197	4,36	239	5,29	4268	94,51	9	0,20				
19	JAMBE	4.604	17	0,37	67	1,46	84	1,82	4307	93,55	22	0,48	1,82	0,37%	1,46%	84
20	CISOKA	8.189	38	0,46	240	2,93	278	3,39	7898	96,45	13	0,16				
21	CIKUYA	6.667	33	0,49	122	1,83	155	2,32	6460	96,90	52	0,78	2,32	0,49%	1,83%	155
22	KRESEK	4.097	19	0,46	126	3,08	145	3,54	3932	95,97	20	0,49				
23	GUNUNG KALER/SIDOKO	4.606	25	0,54	44	0,96	69	1,50	4519	98,11	18	0,39	1,50	0,54%	0,96%	69
24	KRONJO	4.365	28	0,64	313	7,17	341	7,81	4011	91,89	13	0,30				
25	SUKAWALYA	5.314	19	0,36	81	1,52	100	1,88	5191	97,69	23	0,43	1,88	0,36%	1,52%	100
26	TIGARAKSA	5.546	21	0,38	77	1,39	98	1,77	5420	97,73	28	0,50				
27	PASIR NANGKA	8.371	18	0,22	113	1,35	131	1,56	8194	97,89	46	0,55	1,65%	0,28%	1,37%	229
28	MEKAR BARU/WALJUIS	2.891	33	1,14	172	5,95	205	7,09	2684	92,84	2	0,07				
29	TELUK NAGA	8.401	65	0,77	286	3,40	351	4,18	7954	94,68	96	1,14	7,05%	1,22%	5,83%	823
30	TEGAL ANGUS	3.271	77	2,35	395	12,08	472	14,43	2785	85,14	14	0,43				
31	KOSAMBI	7.246	41	0,57	363	5,01	404	5,58	6816	94,07	26	0,36	6,98%	0,34%	6,64%	924
32	SALEMBARAN JAYA	5.987	4	0,07	516	8,62	520	8,69	5453	91,08	14	0,23				
33	SEPATAN	10.458	6	0,06	272	2,60	278	2,66	9903	94,69	277	2,65	2,66	0,06%	2,60%	278
34	KEDAUNG BARAT	6.246	40	0,64	315	5,04	355	5,68	5878	94,11	13	0,21				
35	PAKU HAJI	5.444	42	0,77	222	4,08	264	4,85	5147	94,54	33	0,61	6,80%	0,88%	5,92%	650
36	SUKAWALI	4.120	42	1,02	344	8,35	386	9,37	3448	83,69	286	6,94				
37	MAUK	6.023	53	0,88	308	5,11	361	5,99	5602	93,01	60	1,00	5,99	0,88%	5,11%	361
38	KEMERI	3.399	16	0,47	201	5,91	217	6,38	3154	92,79	28	0,82				
39	SUKADIRI	4.350	18	0,41	192	4,41	210	4,83	4129	94,92	11	0,25	4,83	0,41%	4,41%	210
40	RAJEG	7.740	34	0,44	322	4,16	356	4,60	7291	94,20	93	1,20				
41	SUKATANI	4.700	23	0,49	74	1,57	97	2,06	4596	97,79	7	0,15	3,64%	0,46%	3,18%	453
42	SINDANG JAYA	6.792	7	0,10	277	4,08	284	4,18	6479	95,39	29	0,43				
43	KUTABUMI	31.305	23	0,07	515	1,65	538	1,72	30622	97,82	145	0,46	1,72	0,07%	1,65%	538
	KABUPATEN	272.449	1113	0,41%	8778	3,22%	9891	3,63%	260050	95,45%	2317	0,85%				

### 3. Kemiskinan

#### a. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula  $(100 - \text{angka kemiskinan})$ . Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi.

secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2013**

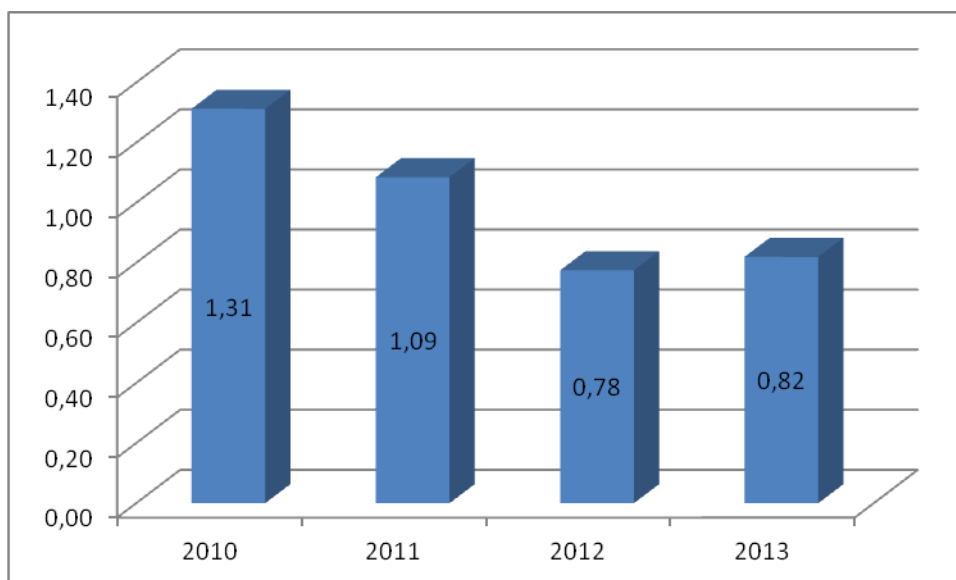
Tahun	Garis Kemiskinan (GK)	Persentase penduduk di bawah GK
2009	241.607	6,55
2010	258.155	7,18
2011	290.423	6,42
2012	326.724	5,71
2013	335.291	5,78

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2015

Prosentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 angka sementara menunjukkan penurunan yaitu 5,26 persen. Selain itu indikator MDGs yang lain adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Adapun perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2013**



**b. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)**

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Kesempatan kerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sebesar 91.55% secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

Klasifikasi/ Classification *)	Jumlah
<b>Penduduk Usia kerja</b>	2.340.273
<b>Angkatan Kerja</b>	1.467.353
a. Bekerja	1.343.329
b. Pengangguran	124.024
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	872.92
a. Sekolah	208.175
b. Mengurus Rumah Tangga	555.519

<b>Klasifikasi/ Classification *)</b>	<b>Jumlah</b>
c. Lainnya	109.226
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )</b>	8,45
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( % )</b>	62,70
<b>Tingkat Kesempatan Kerja ( % )</b>	91,55

**a. Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani)**

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Di Kabupaten Tangerang jumlah angka kriminalitas pada tahun 2015 sebesar 3.109 perkara, Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19 Jumlah Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran menurut Jenisnya**

<b>No</b>	<b>Jenis Kejahatan/Pelanggaran</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pencurian dengan pemberatan	914
2	Penganiayaan berat	175
3	Pencurian dengan kekerasan	163
4	Pencurian kendaraan bermotor	682
5	Kebakaran/Pembakaran	19
6	Pembunuhan	6
7	Pemerasan	49
8	Perkosaan	8
9	Narkotika	190
10	Kenakalan Remaja	-
11	Perjudian	138
12	Uang Palsu	2
13	Unjuk Rasa	-
14	Pengrusakan	24
15	Pemalsuan Surat	21
16	Penculikan	-
17	Penipuan	504
18	Penggelapan	202

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Jumlah
19	Lingkungan Hidup	-
20	Senpi / Handak	12
<b>Jumlah / Total</b>		<b>3.109</b>

Sumber/Source : Polisi Resort (Polres) Metro Tangerang Kabupaten

#### 4. Seni Budaya dan olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Perkembangan jumlah grup kesenian di Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 sebanyak 3 grup dengan didukung oleh gedung kesenian sebanyak 1 unit. Namun Data tersebut dapat meningkat karena banyak di masyarakat yang belum secara resmi memberdayakan grup kesenian di masing-masing mukim gampong. Sedangkan untuk olahraga jumlah klub sebanyak 21 klub dan didukung dengan 4 unit gedung olahraga.

#### 5. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang. Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan tersebut ikut mensejahterakan masyarakatnya, dipakailah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks ini dihitung dari 3 komponen yaitu komponen pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), komponen kesehatan yang tercermin dari angka harapan hidup dan komponen daya beli yang dilihat dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Peningkatan ketiga komponen diatas membuat angka IPM Kabupaten Tangerang terus meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan IPM Kabupaten Tangerang dari Tahun 2010 s.d 2012 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang**

**Tahun 2010 – 2015**

Provinsi / Kota	IPM					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BANTEN	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,59
Tangerang	68,01	68,45	68,83	69,28	69,57	70,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 1. Pendidikan

##### a. Pendidikan Dasar

##### Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tangerang tahun 2015 untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari 313.475 tahun 2014 menjadi 307.030 dan untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami penurunan dari 158.402 tahun 2014 menjadi 117.836 di tahun 2015.

**Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

NO	Uraian	2013	2014	2015
1	SD/MI			



NO	Uraian	2013	2014	2015
1,1	Jumlah Siswa Kelompok Usia 7-12 Tahun yang bersekolah di SD/MI	333.792	313.475	307.030
1,2	Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun	357.042	339.207	348.363
<b>1,2</b>	<b>APS SD./MI</b>	<b>93,49</b>	<b>92,41</b>	<b>88,14</b>
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>			
2,1	jumlah siswa kelompok usia 13- 15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs	155.199	158.402	117.836
2,2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	173.880	171.243	173.326
<b>2,3</b>	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>89,26</b>	<b>92,50</b>	<b>67,99</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang  
Perkembangan angka partisipasi sekolah APS menurut Jenjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

NO	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	SD	93,49	92,41	88,14
2	SMP	89,26	92,50	67,99
3	SMA	53,00	58,06	64,96
4	Perguruan Tinggi	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

#### **Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Ketersediaan gedung sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs tidak mengalami peningkatan namun jumlah usia sekolah

mengalami pertumbuhan sehingga terjadi penurunan rasio, untuk SD/MI dari tahun 2012 sebesar 95,91 menjadi 84,86 pada tahun 2013 dan untuk SMP/MTs dari tahun 2012 sebesar 58,36 menjadi 52,76 di tahun 2013. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut .

**Tabel 2.23 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013-2015**

**Kabupaten Tangerang**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	<b>SD/MI</b>			
1.1	Jumlah Gedung sekolah	1.198	1.235	1.251
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun	307.281	313.475	348.364
<b>1.3</b>	<b>Rasio</b>	<b>1 : 256</b>	<b>1 : 254</b>	<b>1 : 278</b>
2	<b>SMP/MTs</b>			
2.1	Jumlah Gedung sekolah	515	520	540
2,2	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	151.431	171.243	173.326
<b>2.3</b>	<b>Rasio</b>	<b>1 : 294</b>	<b>1 : 329</b>	<b>1 : 321</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

**Rasio Guru/Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sebesar 17.360 lebih besar dari tahun 2014 yaitu sebesar 16.895. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 11.284 dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 11.057 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2013 Kabupaten Tangerang**

NO	Uraian	2013	2014	2015
1	<b>SD/MI</b>			
1,1	Jumlah Guru	15.121	16.895	17.360
1,2	Jumlah Murid	33.792	365.557	353.264
1,3	Rasio	1 : 22	1 : 22	1 : 21
2	<b>SMP/MTs</b>			
2,1	Jumlah Guru	7.705	11.057	11.284
2,2	Jumlah Murid	173.880	158.402	164.262
2,3	Rasio	1 : 23	1 : 23	1 : 15

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

## 2. Kesehatan

### Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu adalah kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana atau suatu wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas kesehatan. maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak

dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Jumlah posyandu dan balita yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2013 mengalami peningkatan, untuk jumlah posyandu meningkat menjadi 351 dibandingkan tahun 2012 sebesar 320 dan untuk jumlah balita sebesar 20060 dibandingkan tahun 2012 sebesar 11647 pada tahun 2012 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2014-2015  
Kabupaten Tangerang**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/kota/kec</b>	<b>Jumlah Posyandu Tahun 2014</b>	<b>Jumlah Balita Tahun 2015</b>	<b>Rasio</b>
1	Cisoka	73	9801	1 : 134
2	Solear	62	9553	1 : 154
3	Tigaraksa	119	1635	1 : 14
4	jambe	51	4984	1 : 98
5	Cikupa	123	28939	1 : 235
6	Panongan	90	15362	1 : 171
7	Curug	86	2044	1 : 24
8	kelapa Dua	94	18718	1 : 199
9	Legok	82	13286	1 : 162
10	Pagedangan	87	12325	1 : 142
11	Cisauk	63	8735	1 : 139
12	Pasar Kemis	125	18672	1 : 149
13	Sindang Jaya	55	9685	1 : 176
14	Balaraja	87	14037	1 : 161
15	Jayanti	60	6993	1 : 117
16	Sukamulya	65	657	1 : 10
17	Kresek	57	5327	1 : 93
18	Gunung Kaler	64	488	1 : 8
19	Kronjo	57	529	1 : 9
20	Mekar Baru	44	3606	1 : 82
21	Mauk	79	7981	1 : 101
22	Kemeru	35	4217	1 : 120
23	Sukadiri	51	5151	1 : 101
24	Rajeg	101	7193	1 : 71
25	Sepatan	65	11649	1 : 179
26	Sepatan Timur	59	9124	1 : 155
27	Pakuhaji	85	1089	1 : 13
28	Teluk Naga	100	16025	1 : 160
29	Kosambi	87	15082	1 : 173

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

### Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 dan 2015 tidak banyak mengalami perubahan, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.26 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013**

NO	KECAMATAN	NO	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	KLINIK	KLINIK SPESIALIS	KLINIK KECANTIKAN	TOTAL KLINIK-KLINIK	RASIO JML PENDUDUK DNG KLINIK (1:25000)	RASIO JML PENDUDUK DNG KLINIK (1:25000) PEMBULATAN
1	CISOKA	1	CISOKA	89291	7	-	-	7	4	4
2	SOLEAR	2	CIKUYA	85414	1	-	-	1	3	3
3	TIGARAKSA	3	TIGARAKSA	62660	13	-	-	13	3	3
		4	PASIR NANGKA	80729	10	-	-	10	3	3
4	CIKUPA	5	CIKUPA	171411	38	2	2	42	7	7
		6	PASIR JAYA	90097	8	-	-	8	4	4
5	PANONGAN	7	PANONGAN	123067	10	1	1	12	5	5
6	CURUG	8	CURUG	126823	20	1	-	21	5	5
		9	BINONG	67093	8	-	2	10	3	3
7	KELAPA DUA	10	JL. KUTAI	17204	1	-	-	1	1	1
		11	JL. EMAS	52301	7	-	-	7	2	2
		12	KELAPA DUA	74061	17	6	14	37	3	3
		13	BJ NANGKA	68714	7	1	1	9	3	3
8	LEGOK	14	LEGOK	72712	10	-	-	10	3	3
		15	BJ KAMAL	19383	-	-	-	-	1	1
		16	CARINGIN	21815	2	-	-	2	1	1
9	PAGEDANGAN	17	PAGEDANGAN	110100	13	1	-	14	4	4
10	SINDANG JAYA	18	SINDANG JAYA	88511	11	1	-	12	4	4
11	PASAR KEMIS	19	PASAR KEMIS	157108	-	-	-	-	6	6
		20	KUTABUMI	140959	35	1	2	38	6	6
12	BALARAJA	21	BALARAJA	73632	17	-	-	17	3	3
		22	GEMBONG	51600	2	-	-	2	2	2
13	KRESEK	23	KRESEK	64153	8	-	-	8	3	3
14	GUNUNG KALER	24	GUNUNG KALER	50980	-	-	-	-	2	2
15	KRONJO	25	KRONJO	57350	4	-	-	4	2	2
16	MEKAR BARU	26	MEKAR BARU	36788	-	-	-	-	1	1
17	MAUK	27	MAUK	81517	6	-	-	6	3	3
18	RAJEG	28	RAJEG	95067	10	1	-	11	4	4

NO	KECAMATAN	NO	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	KLINIK	KLINIK SPESIALIS	KLINIK KECANTIKAN	TOTAL KLINIK-KLINIK	RASIO JML PENDUDUK DNG KLINIK (1:25000)	RASIO JML PENDUDUK DNG KLINIK (1:25000) PEMBULATAN
		29	SUKATANI	63611	-	-	-	-	3	3
19	SEPATAN	30	SEPATAN	109758	18	-	-	18	4	4
20	SEPATAN TIMUR	31	KEDAUNG BARAT	90852	3	-	-	3	4	4
21	PAKUHAJI	32	PAKU HAJI	67509	3	-	-	3	3	3
		33	SUKAWALI	43419	1	-	-	1	2	2
22	TELUKNAGA	34	TELUKNAGA	100606	7	-	2	9	4	4
		35	TEGAL ANGUS	54711	3	-	-	3	2	2
23	KOSAMBI	36	KOSAMBI	85326	7	-	-	7	3	3
		37	SALEMBARAN JAYA	66646	3	-	-	3	3	3
24	JAMBE	38	JAMBE	43657	3	-	-	3	2	2
25	KEMERI	39	KEMERI	42294	1	-	-	1	2	2
26	JAYANTI	40	JAYANTI	69972	5	-	-	5	3	3
27	CISAUK	41	CISAUK	31673	2	1	-	3	1	1
		42	SURADITA	44949	3	-	-	3	2	2
28	SUKADIRI	43	SUKADIRI	55543	4	-	-	4	2	2
29	SUKAMULYA	44	SUKAMULYA	63710	8	-	-	8	3	3
<b>JUMLAH</b>				<b>3264776</b>	<b>336</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>376</b>	<b>131</b>	<b>131</b>

### Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien

Jumlah rumah sakit menurut kriteria dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Tangerang, data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.27 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk**

**Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

NO	Uraian	2013	2014	2015
1	Jumlah RSUD (Pemerintah)	2	2	2
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik	-	-	-

NO	Uraian	2013	2014	2015
	Pemerintah			
3	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-
4	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	19	19	20
5	Jumlah Penduduk		3.140.472	3.264.776
6	Rasio			

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Perkembangan ketersediaan tempat tidur RS di kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.28 Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

NO	KECAMATAN	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	Tangerang	RSU Tangerang	447
2	Balaraja	RSUD Balaraja	104
3	Balaraja	RS. Paramita	53
4	Cikupa	RS. Mulia Insani	113
5	Cisauk	RS. Selaras	50
6	Kelapa Dua	Siloam Hospitals	510
7	Kelapa Dua	RS. Qadr	101
8	Kelapa Dua	Bethsaida Hospital	150
9	Panongan	Ciputra Hospital	122
10	Teluknaga	RS. Mitra Husada	25
11	Pagedangan	RS. St. Carolus	71
12	Cikupa	RSIA. Selaras	53
13	Cikupa	RSIA Tiara	43
14	Curug	RSIA Keluarga Kita	70
15	Pagedangan	RSIA Murni Asih	82
16	Pasar kemis	RSIA Bunda Sejahtera	25

NO	KECAMATAN	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR
17	Tigaraksa	RSIA Harapan Mulya	35
18	Kosambi	RSIA BUN	26
19	Cikupa	RSB. Permata Hati	25
20	Kosambi	RSB Bunda Lestari	25
<b>j u m l a h</b>			<b>2130</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

### **Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Namun perkembangan jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Tangerang sangat lambat, baru tersedia 19 dokter untuk menangani 187.459.

### **Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Di Kabupaten Tangerang untuk rasio tenaga medis sebesar 1 : 2500 dengan jumlah tenaga medis sebanyak 1938 orang untuk melayani 3.264.776 orang, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.29 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2015  
Kabupaten Tangerang**

No	Uraian	Dokter Umum (Rasio 1:2500)	Dokter Umum (Rasio 1:9000)
1	Jumlah Dokter	1.511	427
2	Jumlah Penduduk	3.624.776	3.624.776



<b>3</b>	<b>Rasio</b>	1.306	363
----------	--------------	-------	-----

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Perkembangan jumlah tenaga medis menurut kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015**

**Kabupaten Tangerang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	DOKTER UMUM	RASIO JMLH PENDUDUK DGN DOKTER (1:2500)	DOKTER GIGI	RASIO JMLH PENDUDUK DGN DOKTER (1:9000)
1	BALARAJA	125232	112	50,09	23	13,91
2	CIKUPA	261508	132	104,60	46	29,06
3	CISAUK	76622	49	30,65	9	8,51
4	CISOKA	89291	25	35,72	7	9,92
5	CURUG	193916	114	77,57	38	21,55
6	GUNUNG KALER	50980	1	20,39	0	5,66
7	JAMBE	43657	2	17,46	1	4,85
8	JAYANTI	69972	15	27,99	2	7,77
9	KELAPA DUA	212280	385	84,91	148	23,59
10	KEMIRI	42294	2	16,92	0	4,70
11	KOSAMBI	151972	54	60,79	6	16,89
12	KRESEK	64153	20	25,66	3	7,13
13	KRONJO	57350	13	22,94	5	6,37
14	LEGOK	113910	34	45,56	6	12,66
15	MAUK	81517	19	32,61	3	9,06
16	MEKAR BARU	36788	2	14,72	0	4,09
17	PAGEDANGAN	110100	47	44,04	21	12,23
18	PAKUHAJI	110928	17	44,37	1	12,33
19	PANONGAN	123067	61	49,23	22	13,67
20	PASAR KEMIS	298067	131	119,23	33	33,12
21	RAJEG	158678	40	63,47	9	17,63
22	SEPATAN	109758	52	43,90	8	12,20
23	SEPATAN TIMUR	90852	12	36,34	4	10,09
24	SINDANG JAYA	88511	25	35,40	9	9,83
25	SOLEAR	85414	11	34,17	1	9,49
26	SUKADIRI	55543	14	22,22	1	6,17
27	SUKAMULYA	63710	21	25,48	2	7,08
28	TELUK NAGA	155317	56	62,13	9	17,26
29	TIGARAKSA	143389	45	57,36	10	15,93
<b>JUMLAH</b>		<b>3.264.776</b>	1.511	1.306	427	363

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

### 3. Lingkungan Hidup

#### a. Persentase Penanganan Sampah

Untuk menghitung persentase penanganan sampah dapat disusun tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.31 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah sampah yang ditangani (Ton)	945
2.	Jumlah volume produksi sampah	3.500
3.	Persentase	27%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang

#### b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Tangerang, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk sedangkan jumlah yang mendapatkan akses air minum tidak mengalami peningkatan.

### 4. Sarana dan Prasarana Umum

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

##### Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kemantapan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- ✓ Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek

pemanfaatan/kapasitas.

- ✓ Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
- ✓ Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

### **Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi**

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6\%$ ), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
2. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknik (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu - lintas.
3. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
4. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %).

Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.

5. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda - 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 untuk kondisi baik dan beraspal sejumlah 73%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.32 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 Kabupaten Tangerang**

NO	KONDISI	2014	
		Panjang	Prosentase
		(M')	%
	<b>KONDISI JALAN</b>		
1	BAIK	724,49	73
2	SEDANG	84,84	9
3	RUSAK	72,4	7
4	RUSAK BERAT	110,88	11
	<b>JENIS PERMUKAAN</b>		
1	BETON	774,95	78,07
2	ASPAL	154,89	15,6
3	DAN LAIN-LAIN	62,77	6,32

Sumber : Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

#### **b. Rasio Jaringan Irigasi**

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga

kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapanya.

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektifitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA), Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien.

**c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**

Dengan mayoritas pemeluk agama Islam, maka jumlah tempat ibadah yang ditingkatkan fokus kepada pembangunan Masjid dan Gereja, sedangkan untuk pemeluk agama lain belum dapat dibangun tempat ibadah karena kurangnya pemeluk agama tersebut.

**d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), dan Pembuangan sampah

**e. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

**f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk**

Untuk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sebesar 67% dibandingkan jumlah penduduk yang ada, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel

berikut :

**Tabel 2.33 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah TPS	1
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	45.000
3.	Jumlah Penduduk	327.664
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah	67%

**g. Rasio Rumah Layak Huni**

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2014 dan 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.34 Rasio Jumlah Layak Huni di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 s.d 2015**

No	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	415	496
2.	Jumlah Penduduk	182.364	177.532
3.	Rasio Jumlah Rumah Layak	0,23%	0,28%

**6. Penataan Ruang**

**a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau

kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;

**3. Didominasi komunitas tumbuhan.**

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**Tabel 2.35 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah**

**Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 s.d 2014**

No	Uraian	2013	2014
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	1.795,79	1.795,79
2.	Luas wilayah	2.927,95	2.927,95
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	61%	61%

Sumber : Data Olahan

**b. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

**7. Perhubungan**

**a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Jumlah arus penumpang umum di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 berjumlah 5.200 yang tercatat dari jumlah penumpang bis (darat) sedangkan untuk kereta api dan pesawat udara tidak mempunyai

fasilitas, sedangkan untuk pelabuhan laut sudah tersedia namun belum secara maksimal melayani penumpang.

#### **b. Rasio Ijin Trayek**

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Izin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2015 sejumlah 25 buah untuk trayek antar kabupaten maupun provinsi, dengan rasio 25. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.36 Rasio Ijin Trayek Tahun 2013-2015 Kabupaten Tangerang**

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Izin Trayek Perkotaan	-	-	-
2	Izin Trayek Pedesaan	50	43	25
3	Jumlah Izin Trayek	-	-	-
4	Jumlah Penduduk	-	-	-
5	Rasio Izin Trayek	50	43	25

#### **c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Tangerang tahun 2015 sejumlah 1053 atau sebesar 76,7% mengalami penurunan dari tahun 2014 dikarenakan penambahan jumlah kendaraan umum di tahun 2015 masih banyak yang belum melakukan uji KIR. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.37 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2013-2015**

No	Angkutan Umum	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Mobil Penumpang Umum	1,057	482	1,053
2	Mobil Bus	141	191	4,850
3	Mobil Barang	38,859	40,078	45,827
4	Truk Gandeng	-	-	-
5	Truk Tempelan	52	67	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

#### d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Kabupaten Tangerang memiliki 1 buah pelabuhan laut dan 1 buah terminal bis untuk menunjang transportasi penduduk antar daerah dan 2 pelabuhan udara, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.38 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2013 Kabupaten Tangerang**

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jumlah Pelabuhan laut (Dermaga)	1	1	1
2	Jumlah Pelabuhan Udara	2	2	2
3	Jumlah Terminal Bis	1	1	1
4	Total Keseluruhan	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

#### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

## 1. Penanaman Modal

### a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia. Jumlah total PMDN dan PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 sebesar 15 unit.

**Tabel 2.39 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	Jumlah Investor	14	1	15

### b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari tahun ke tahun nilai investasi semakin meningkat seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.40 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Tangerang Tahun 2013 s.d 2015**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2015	5	41.238.700.000	5	41.238.700.000
2014	4	4.530.983.700	4	4.530.983.700
2013	2	1.714.607.155	2	1.714.607.155

## 2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung

dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2013 tercatat 3.096 dengan jumlah PMDN dan PMA 15 unit.

**Tabel 2.41 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2013 s.d 2015**

NO	Uraian	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	349	550	3.096
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5	14	15
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1,43%	2,55%	0,48%

#### **4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)**

##### **a. Persentase Koperasi Aktif**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

##### **b. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM**

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, semakin banyak jumlah UKM non

BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

## 5. Kependudukan

### a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

### b. Pengelompokan Penduduk

#### Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur

Rasio jenis kelamin (sex rasio) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan ( $(\text{penduduk laki-laki}) : (\text{penduduk perempuan}) \times 100$ ). Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.724.915 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.645.679 jiwa, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42** Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur  
Kabupaten Tangerang Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RASIO
1	Cisoka	47.482	44.271	91.753	107,25
2	Solear	45.006	43.207	88.213	104,16
3	Tigaraksa	76.448	73.116	149.564	104,56
4	Jambe	22.781	21.594	44.375	105,50
5	Cikupa	139.776	130.854	270.630	106,82
6	Panongan	66.313	63.960	130.273	103,68
7	Curug	103.609	97.295	200.904	106,49
8	Kelapa Dua	109.754	111.228	220.982	98,67
9	Legok	61.053	56.717	117.770	107,64
10	Pagedangan	58.189	55.549	113.738	104,75
11	Cisauk	40.668	39.124	79.792	103,53
12	Pasarkemis	159.692	154.253	313.945	103,53

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RASIO
13	Sindang Jaya	46.568	44.710	91.278	104,16
14	Balaraja	66.238	62.213	128.451	106,47
15	Jayanti	36.299	35.108	71.407	103,39
16	Suka Mulya	32.932	31.747	64.679	103,73
17	Kresiek	32.883	31.899	64.782	103,08
18	Gunung Kaler	25.984	25.634	51.618	101,37
19	Kronjo	29.496	28.185	57.681	104,65
20	Mekar Baru	18.993	17.975	36.968	105,66
21	Mauk	41.863	40.357	82.220	103,73
22	Kemiri	22.152	20.388	42.540	108,65
23	Sukadiri	28.975	26.968	55.943	107,44
24	Rajeg	84.324	80.788	165.112	104,38
25	Sepatan	59.041	55.104	114.145	107,14
26	Sepatan Timur	47.714	45.235	92.949	105,48
27	Pakuhaji	57.689	54.770	112.459	105,33
28	Teluknaga	81.592	77.708	159.300	105,00
29	Kosambi	81.401	75.722	157.123	107,00
	Total	1.724.915	1.645.679	3.370.594	104,81

**c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk/ Geografis**

Persebaran penduduk di Kabupaten Tangerang dihitung berdasarkan persebaran geografis yaitu persebaran penduduk menurut pulau dan persebaran administrative dan politis, yaitu persebaran penduduk berdasarkan provinsi, kabupaten dan daerah istimewa secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.43 Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan**

**Kabupaten Tangerang**

NO	Kecamatan	Tahun 2015		
		Jmlh Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan
1	Cisoka	91.753	26.98	3.401
2	Solear	88.213	29.01	3.041
3	Tigaraksa	149.564	48.74	3.069
4	Jambe	44.375	26.02	1.705
5	Cikupa	270.630	42.68	6.341
6	Panongan	130.273	34.93	3.730
7	Curug	200.904	27.41	7.330
8	Kelapa Dua	220.982	24.37	9.068

NO	Kecamatan	Tahun 2015		
		Jmlh Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan
9	Legok	117.770	35.13	3.352
10	Pagedangan	113.738	45.69	2.489
11	Cisauk	79.792	27.77	2.873
12	Pasarkemis	313.945	25.92	12.112
13	Sindang Jaya	91.278	37.15	2.457
14	Balaraja	128.451	33.56	3.828
15	Jayanti	71.407	23.89	2.989
16	Suka Mulya	64.679	26.94	2.401
17	Kresek	64.782	25.97	2.494
18	Gunung Kaler	51.618	29.63	1.742
19	Kronjo	57.681	44.23	1.304
20	Mekar Baru	36.968	23.82	1.552
21	Mauk	82.220	51.42	1.599
22	Kemiri	42.540	32.70	1.301
23	Sukadiri	55.943	24.14	2.317
24	Rajeg	165.112	53.70	3.075
25	Sepatan	114.145	17.32	6.590
26	Sepatan Timur	92.949	18.27	5.088
27	Pakuhaji	112.459	51.87	2.168
28	Teluknaga	159.300	40.58	3.926
29	Kosambi	157.123	29.76	5.280
<b>Jumlah</b>		<b>3.370.594</b>	<b>959.60</b>	<b>3.512</b>

**d. Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat pendidikan**

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Di Kabupaten Tangerang masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, kemudian lulusan di tingkat SMP dan SMA mulai meningkat walaupun berjalan lambat, sedangkan untuk lulusan setingkat sarjana masih minim sekali. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.44 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (%)**

NO	Uraian	Tahun
		2015
1	SD Kebawah	26,88

NO	Uraian	Tahun
		2015
2	SLTP	23,01
3	SLTA	27,05
4	D1/D2/D3	2,00
5	D4/S1/S2/S3	4,12
6	Tidak mempunyai ijazah	17,02
	TOTAL	100

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah. Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Sedangkan menurut jumlah penerbitan untuk tahun 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan untuk akta lahir sebanyak 3.084.214 jiwa, akta mati sebanyak 973 jiwa, KTP nasional sebanyak 1.573.740 wajib KTP, dan jumlah KK sebanyak 932.642 jiwa.

## 6. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau

berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

**a. Angkatan Kerja (labor force)**

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Pengangguran terbuka, baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).

**Tabel 2.45 Penduduk Usia 15 Tahun Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Tangerang**

<b>Klasifikasi/ Classification*)</b>	<b>Jumlah</b>
Penduduk Usia kerja	2.340.273
Angkatan Kerja	1.467.353
a. Bekerja	1.343.329
b. Pengangguran	124.024
Bukan Angkatan Kerja	872.92
a. Sekolah	208.175
b. Mengurus Rumah Tangga	555.519
c. Lainnya	109.226
Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )	8,45



<b>Klasifikasi/ Classification*)</b>	<b>Jumlah</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( % )	62,70
Tingkat Kesempatan Kerja ( % )	91,55

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

## **7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II – IV.

**Tabel 2.46 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013 s/d 2015**

NO	URAIAN	2013					2014					2015				
		L	%	P	%	JUMLAH	L	%	P	%	JUMLAH	L	%	P	%	JUMLAH
1	Jabatan Eselon II	35	92,10	3	7,89	38					38					37
	Jabatan Eselon II.A	1		-		1					1					1
	Jabatan Eselon II.B	34		3		37					37					36
2	Jabatan Eselon III	160	75,11	53	24,88	213					212					208
	Jabatan Eselon III.A	62		18		80					79					83
	Jabatan Eselon III.B	98		35		133					133					125
3	Jabatan Eselon IV	720	73,39	261	26,60	981					979					966
	Jabatan Eselon IV.A	494		173		667					663					653
	Jabatan Eselon IV.B	226		88		314					316					313
4	Pekerja Perempuan di Pemerintah															
5	Jumlah PNS					12.099	6.651	51,29	6.314	48,70	12.965	6.588	51,16	6.287	48,83	12.875
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga Pemerintah															

Sumber : Sub Bidang Data Pegawai/ BKKD

### b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## **Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)**

### **1. Rata-rata jumlah anak per keluarga**

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut data yang tercatat setiap keluarga (KK) memiliki 1 orang anak.

## **8. Komunikasi Dan Informasi**

### **a. Jumlah Jaringan Komunikasi**

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Di Kabupaten Tangerang untuk jaringan telepon stasioner baru dapat dilayani oleh PT. Telkom dan untuk jaringan telepon genggam mengalami penambahan 2 buah operator.

### **b. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal**

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

Peningkatan surat kabar nasional dan lokal tidak mengalami perubahan dapat di lihat pada tabel berikut ini.

### c. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.

Begitu juga perkembangan untuk radio dan TV di Kabupaten Tangerang juga tidak mengalami perubahan dan cenderung statis.

### 9. Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Pada tahun 2015 tercatat jumlah LSM yang aktif sebanyak 256 LSM dengan 125 unit yang tidak aktif, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.47 Jumlah LSM aktif Tahun 2013-2015  
Kabupaten Tangerang**

NO	Uraian	2013	2014	2015
1.	Jumlah LSM terdaftar	175	218	256
2.	Jumlah LSM tidak aktif	41	87	125
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	131	131	131

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

### 10. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan,

mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

## **11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

### **Rasio Polisi Pamong Praja, Linmas dan Poskamling**

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

Untuk Kabupaten Tangerang menurut Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk, dan Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2015 sebesar 8 persen, 89 persen dan 2 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.48 Rasio Jumlah Pos Kamling Per Desa Tahun 2015**

No	Indikator	2015
1	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	8
2	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	89
3	Rasio jumlah Pos Kamling per Desa	2

Sumber : Kantor Satpol PP

## 12. Pemuda dan Olah Raga

### Jumlah Organisasi Pemuda, Olahraga, dan Kepemudaan

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.

Pada tahun 2015 jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan dan jumlah kegiatan olahraga masing-masing sejumlah 45 unit, 21 unit, 3 unit dan 5 unit.

**Tabel 2.49 Jumlah Organisasi Pemuda, Olahraga, dan Kepemudaan Tahun 2015**

No	Uraian	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda	45
2	Jumlah Organisasi Olahraga	21
3	Jumah kegiatan kepemudaan	3
4	Jumlah kegiatan olahraga	5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### **2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

##### **1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT per kapita)**

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

##### **2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)**

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

##### **3. Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat

produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

**Tabel. 2.80 Jumlah PDRB per Sektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2011 s.d 2014**

KATEGORI	2010	2011	2012*)	2013*)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,943,498.19	4,339,726.34	4,624,705.32	5,540,497.15	6,297,203.33
B. Pertambangan dan Penggalian	33,474.47	37,302.94	38,104.45	39,780.75	45,219.56
C. Industri Pengolahan	25,779,552.85	28,461,799.88	30,757,833.51	34,874,414.37	36,651,945.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,690,949.47	2,265,931.24	2,587,019.14	2,419,360.42	5,148,123.33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	48,647.44	46,818.20	46,763.24	49,698.88	54,200.61
F. Konstruksi	5,763,260.84	6,701,831.15	7,771,428.60	9,392,221.97	11,474,382.30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,379,363.02	7,471,955.54	8,393,871.46	9,006,379.13	9,866,316.71
H. Transportasi dan Pergudangan	1,371,150.49	1,547,256.49	1,726,499.05	2,065,054.93	2,578,560.65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	796,931.75	888,922.81	992,210.08	1,135,510.81	1,427,432.64
J. Informasi dan Komunikasi	2,282,440.25	2,469,652.92	2,558,832.91	2,618,437.59	3,021,687.90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,308,768.30	2,794,751.91	3,402,082.05	3,933,563.84	4,284,716.62
L. Real Estate	4,026,928.22	4,496,883.90	4,787,024.57	5,291,473.61	5,924,677.19
M,N. Jasa Perusahaan	508,075.71	584,382.11	645,612.45	755,067.50	904,081.06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	826,056.75	991,510.02	1,091,586.10	1,189,040.62	1,471,034.02
P. Jasa Pendidikan	1,294,510.48	1,468,292.01	1,666,339.98	1,931,831.26	2,355,844.43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,717.01	272,059.90	285,914.53	308,847.27	361,207.65
R,S,T,U. Jasa lainnya	799,093.72	902,181.70	927,823.97	1,133,653.10	1,445,388.93
<b>PDRB</b>	<b>58,099,418.94</b>	<b>65,741,259.06</b>	<b>72,303,651.40</b>	<b>81,684,833.19</b>	<b>93,312,022.33</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang



**Tabel. 2.81 Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2014**

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry*)</i>	Jumlah	Persentase %
(1)	(2)	(3)
1, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan <i>Agriculture</i>	83.355	6,21
2, Industri <i>Manufacture</i>	630.316	46,92
3, Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi	255.663	19,03
3. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan <i>Personal and Social Community Services</i>	188.436	14,03
4, <i>Lainnya</i>	183.559	13,813
<b>Jumlah / Total</b>	<b>1.341.329</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

#### **2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

##### **Aksesibilitas Daerah**

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan Rasio panjang jalan, jalan penghubung dan trotoar.

Pada tahun 2015 untuk panjang jalan yang dapat dilalui sebesar 0,005% dan jalan penghubung sejumlah 97% dengan persentase trotoar

10,50% keberadaan jalan yang dipakai sebanyak 15%

**Tabel. 2.82 Rasio Panjang Jalan dan Sempadan Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

No	Uraian	Persentase
1	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,005
2	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	97%
3	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1.5 m)	10,50%
4	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	15%

Sumber : Dinas Bina Marga

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Pada tahun 2013-2015 jumlah orang yang terangkut oleh kendaraan umum melalui terminal (jalur transportasi darat) , secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.83 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**

**Tahun 2013-2015**

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jumlah Orang	4.5	5	5.2
2	Jumlah Barang	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

#### 2.1.4.3 Penataan wilayah

##### a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

**Tabel. 2.84 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	2015
1.	Realisasi RTRW	226.052,04
2.	Rencana Peruntukan RTRW	276.409,74
3.	Rasio (1./2.)	81,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2031

**b. Luas wilayah produktif**

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

**Tabel. 2.85 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	2015
1.	Luas Wilayah produktif	111.222,07
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	167.685,13
3.	Rasio (1./2.)	66,3

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

**c. Luas Wilayah Industri**

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

**Tabel. 2.86 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	2015
1.	Luas Wilayah Industri	133,23
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	167.685,13
3.	Rasio (1./2.)	0,1

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

**d. Luas Wilayah Kebanjiran**

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

**Tabel. 2.87 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran  
Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	2013
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	11.411,17
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	167.685,13
3.	Rasio (1./2.)	6,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

**e. Luas Wilayah Kekeringan**

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

**Tabel. 2.88 Rasio Luas Wilayah Kekeringan  
Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	2015
1.	Luas Wilayah Kekeringan	41.985,54
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	167.685,13
3.	Rasio (1./2.)	25,0

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

**f. Luas Wilayah Perkotaan**

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

**Tabel. 2.89 Rasio Luas Wilayah Perkotaan  
Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

NO	Uraian	2013
1.	Luas Wilayah Perkotaan	2.761,70
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	167,685,13
3.	Rasio (1./2.)	1,6

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

**2.1.4.4 Fasilitas Bank dan non Bank**

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

#### **a. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang-Cabangnya**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **b. Jenis Dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang-Cabangnya**

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

#### **2.1.4.5 Ketersediaan Air Bersih**

##### **a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih**

Air Bersih(clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum(drinking water) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air bersih dapat dibedakan atas: Air Hujan, Air Sungai dan Danau, Mata Air, Air Sumur Dangkal, Air Sumur Dalam. secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.91 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih**

No	Sumber Air Bersih	2015
1	Leding (Perpipaan)	1.711
2	Sumur Lindung	-
3	Sumur Tidak Terlindung	15.912
4	Mata Air Terlindung	-
5	Mata Air Tidak Terlindung	-
6	Sungai	246
7	Danau/Waduk	-
8	Air Hujan	945
9	Air Kemasan	-
10	Lainnya	6.488
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	23.241
12	Jumlah Rumah Tangga	45.914
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	50,62%

#### 2.1.4.6 Fasilitas Listrik Dan Telepon

##### a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Menurut data yang tercatat pada PLN dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun untuk total susut dan beban puncak di tahun 2013 masing-masing sebesar 15 MW dan secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.92 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik**  
Provinsi/Kabupaten Tangerang

NO	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013
1	Total Susut & Losses	%	7,38	8,40	9,08	10,36
2	Beban Puncak	MW	10,5	12,5	13	14

### **b. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik**

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.

Pada tahun 2013 dengan jumlah rumah tangga sebesar 46.247 jiwa dapat teraliri oleh listrik sebesar 30.998 atau sebesar 80%, namun menurut kenyataan yang ada dilapangan hampir seluruh masyarakat sudah dapat menikmati listrik walaupun dengan sistem menyalur kepada tetangga ataupun metode lainnya, diharapkan pada tahun mendatang persentase menurut data mendekati kesempurnaan, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.93 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik**

#### **Kabupaten Tangerang**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1.	RT dengan daya 450 watt	11.010	11.320	11.776
2.	RT dengan daya 900 watt	14.200	14.650	14.937
3.	RT dengan daya 1.300 watt	2.120	2.380	2.483
4.	RT dengan daya 2.200 watt	1.110	1.280	1.370
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	340	400	432

### **c. Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon**

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan

fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi.

#### 2.1.4.7 Ketersediaan Restoran

##### a. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

**Tabel. 2. 94 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran  
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

No	Uraian	Tahun 2015	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Usaha restoran golongan tertinggi	-	-
2	Usaha restoran golongan menengah	33	-
3	Usaha restoran golongan terendah	94	-
4	Usaha rumah makan kelas A	-	-
5	Usaha rumah makan kelas B	33	-
6	Usaha rumah makan kelas C	94	-
7	Usaha rumah makan kelas D	-	-
8	Usaha rumah makan kelas	-	-
9	Jenis Usaha Restoran	5	-
10	Jenis Usaha Rumah Makan	127	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang

#### 2.1.4.8 Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam



menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

#### **a. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/ Hotel**

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

##### **a. Hotel Berbintang**

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasanya menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan.

##### **b. Hotel Melati**

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

### **2.1.4.9 Iklim Berinvestasi**

#### **1. Keamanan Dan Ketertiban**

##### **a. Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

##### **b. Kemudahan Perijinan**

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya

saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

## **2. Pengeanaan Pajak Daerah**

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

## **3. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha**

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

## **4. Sumber daya alam dan rumpun pertanian**

### **a. Pertanian Pangan**

Komoditi terbesar palawija di Kabupaten Tangerang adalah padi dan ubi kayu.

**Tabel 2. 95 Jumlah Komoditi Palawija  
Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2015**

Tahun	Produksi (Ton)				
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah
2013	433.953	562	4.537	869	209
2014	433.953	562	4.537	869	209

Sumber : Distannak Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data yang ada produksi sayur-sayuran dalam Kabupaten Tangerang tidak terlalu besar, komoditi dengan produksi tertinggi adalah cabe dan ketimun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 96 Jumlah Komoditi Sayur-sayuran  
Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2015**

Tahun	Produksi (Ton)						
	Kacang Panjang	Cabe	Kangkung	Ketimun	Tomat	Terung	Bayam
2015	9.192	64	33.109	17.751	-	927	19.036

Sumber : DISTANAK Kab. Tangerang

Selain padi dan palawija, Kabupaten Tangerang juga kaya akan produksi buah- buahan unggulan adalah durian, rambutan, jambu dan mangga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 97 Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Jenis  
Tahun 2013**

tahun	produksi							
	Mangga	Rambutan	Jeruk Manis	Durian	Sawo	Jambu	Nenas	Pepaya
2013	14.221	743	561	2	0	10.853	19	4.433

Sumber : DISTANAK Kab. Tangerang

**b. Perikanan**

Produksi perikanan di Tangerang berasal dari budidaya dan perikanan tangkap. Budidaya perikanan berupa tambak, kolam dan perairan umum. Budidaya ini diusahakan di semua kecamatan dan budidaya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 98 Luas Areal dan Produksi Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

Tambak		Kolam	
Luas Areal (Hektar)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Hektar)	Produksi (Ton)
4.115,93	11.024,6	131,01	5.142,9

Sumber : Diskanla Kabupaten Tangerang

Produksi budidaya tambak di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 99 Budidaya Tambak di Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

Produksi (Ton)				
Bandeng	Belanak	Udang Windu	Lainnya	Ikan Nila
6.402,9	481	26,7	439,5	204

Sumber: Diskanla Kabupaten Tangerang

**Tabel 2. 100 Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

Jenis Budidaya (Ton)			
Laut	Air Payau	Air Tawar	Perairan Umum
4.721	11.024	5.142,9	116,52

Produksi ikan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sebesar 16.231 ton, dengan nilai produksi sebesar Rp. 197.809.087.

**c. Peternakan**

Peternakan dalam Kabupaten Tangerang terdiri dari Peternakan ternak

besar seperti sapi dan kerbau, peternakan kecil berupa kambing dan domba serta peternakan unggas yaitu ayam dan itik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 101 Produksi Peternakan Kabupaten Tangerang Tahun 2014**

<b>Kecamatan</b>	<b>Sapi (ekor)</b>	<b>Kerbau (ekor)</b>	<b>Kuda (ekor)</b>
Cisoka	113	721	2
Solear	321	1.720	
Tigaraksa	330	1.418	
Jambe	681	1.484	
Cikupa	121	173	
Panongan	1.157	800	
Curug	227	103	
Kelapa Dua	71	54	1
Legok	408	525	
Pagedangan	372	140	
Cisauk	186	205	
Pasar Kemis	154	108	
Sindang Jaya	2.193	91	
Balaraja	38	184	
Jayanti	24	374	
Sukamulya	52	56	
Kresek	22	198	
Gunung Kaler	10	43	
Kronjo	8	44	
Mekar Baru	0	252	
Mauk	2	134	
Kemiri	54	59	
Sukadiri	14	17	
Rajeg	717	49	
Sepatan	40	57	
Sepatan Timur	88	0	
Pakuhaji	2	161	

<b>Kecamatan</b>	<b>Sapi (ekor)</b>	<b>Kerbau (ekor)</b>	<b>Kuda (ekor)</b>
Teluknaga	2	54	
Kosambi	0	30	
<b>Jumlah</b>	7.407	9.254	3

## **5. Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

### **a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)**

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3.

## **b. Tingkat Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Secara umum evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2015 dan realisasi terhadap RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan

kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJM Kabupaten Tangerang dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang penting dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPM dan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPD, dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Berikut ini disajikan tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD :



**Tabel 2.112 Capaian Indikator Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pengembangan data / informasi	Meningkatnya kualitas data perencanaan	%	55	55	60	60	65	62	65	62	80	BAPPPEDA
2	Program perencanaan sosial budaya	Meningkatnya perencanaan kebijakan sosial dan budaya	Kebijakan	2	2	2	2	2	3	6	7	12	BAPPPEDA
3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan secara merata	Rencana Kawasan	2	2	5	7	5	10	12	19	27	BAPPPEDA
4	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Orang	150	160	150	253	150	890	450	1303	900	BAPPPEDA
5	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Jumlah kerjasama dengan pihak swasta	Kerjasama	-	-	10	10	10	3	20	13	40	BAPPPEDA
6	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya rencana aksi pengembangan perekonomian daerah	Rencana Aksi	4	4	4	4	4	4	12	12	24	BAPPPEDA
7	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya capaian Peserta KB Aktif PA/PUS	%	65,7	65,26	66,19	66,651	66,86	67,72	66,86	67,72	67,96	BKKBD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya jumlah anggota kelompok BKB dan UPPKS yang ber-KB	%	72,5	77,65	73,5	77,99	92,24	89,09	92,24	89,09	80	BKKBD
9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPMPPD
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah pelayanan dan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat, pensiun dan pengangkatan jabatan	Orang	1.837	3.836	1.913	3.098	2.005	2.810	5.755	9.744	11.519	BKPPD
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya aplikasi sistem informasi data kepegawaian	Paket	-	-	1	1	1	1	1	1	1	BKPPD
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah data base kepegawaian yang akurat	Orang	-	-	1.000	2.470	5.000	12.875	6.000	15.345	12.300	BKPPD
13	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah peserta diklat	Orang	733	1.076	761	648	644	1531	2.138	3.255	4.020	BKPPD
14	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan energi dan protein per kapita	gram/kapita /hari	57,0	68,5	63,0	-	63,0	66,0	63,0	66	63	DPPKP

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Prorgam peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	ton	7	6	7	6,6	7	7	21	19,6	7	DPPKP
16	Prorgam peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	%	3	3	3	3	3	3	9	9	100	DPPKP
17	Prorgam peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	5	5	7	7	7	9	19	21	50	DPPKP
18		Keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		7%	7%	7%	7%	11	11	25	25	75	BPMPPD
19		Keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	7	7	7	7	11	11	25	25	75	BPMPPD
20		Tersedianya Bak sampah di Perdesaan	desa			50	0	50	0	100	0	250	BPMPPD
21	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pengembangan POSYANTEK	%	1	0	1	1	1	1	3	3	10	BPMPPD
22	program peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Ketenagaan penyuluhan	%	6	5,5	6	6	6	6,5	18	18	96	DPPKP
23	program peningkatan sarana prasarana penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan	%	11	11	11	11	11	11	33	33	100	DPPKP

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Luasan Hutan kota yang sudah tertata	Ha	2,5	0	2,5	0	2,5	0	5	0	23,5	BLHD
25	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	-	-	10	8	10	8	30	16	80	BLHD
26	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan UKL/UPL	%	7	7	7	7	7	7	21	21	62	BLHD
27	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan	Kasus	25	25	25	25	25	25	75	75	223	BLHD
28	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan	Kasus	-	-	5	0	5	0	10	0	25	BLHD
29	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Piagam Perhargaan kabupaten tangerang sebagai kota sehat atau mendapatkan Penghargaan	point	68,65	0	70,65	63,30	72	67,25	72	67,25	78,65	BLHD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Adipura											
30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata / sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	sekolah	3	3	5	5	8	8	8	8	10	BLHD
31	Program peningkatan pengendalian polusi	Meningkatnya kegiatan pengawasan usaha yang berpotensi melakukan pencemaran air		200	200	250	250	200	200	650	650	1.964	BLHD
32	Program peningkatan pengendalian polusi	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan dan teknis pencegahan pencemaran air	%	5	5	5	5	5	5	15	15	60	BLHD
33	Program peningkatan pengendalian polusi	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak	%	5	5	5	5	5	5	15	15	60	BLHD
34	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan rehabilitasi /Vegetasi tanaman mangrove Mangrove di pesisir Pantai	pohon	50000	50000	50000	50000	50000	50000	15000	15000	300000	BLHD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	terlayannya masyarakat sulit air bersih melalui pendistribusian air bersih di 12 kecamatan (Distribusi air bersih melalui mobil IPA)	ltr	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000	900.000	3.600.000	BLHD
36	Program Perencanaan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi perijinan dan nonperijinan	Event	10	7	10	9	9	8	29	24	31	BPMTSP
37	Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Prosentase kenaikan penerimaan retribusi perijinan	%	10	63,22	10	1,4	10	12	30	76,62	60	BPMTSP
38	Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Prosentase penyelesaian pengaduan perijinan	%	70	66,6	72	75,6	74	75	74	75	80	BPMTSP
39	Program Penelitian dan Pengembangan Yang Terkait dengan Perijinan dan Non Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan nonperijinan	Indeks	-	-	4	2,74	4	4,21	4	4,21	5	BPMTSP
40	Program Penelitian dan Pengembangan Yang Terkait dengan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Kecamatan Sasaran Operasi Penertiban Perijinan Terpadu	kecamatan	10	10	10	0	9	5	29	15	29	BPMTSP
41	Program	Database	kecamatan	-	-	29	29	29	29	29	29	29	BPMTSP

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan Data Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan	Perijinan											
42	Program Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan	kali	1	1	1	1	1	1	3	3	7	BPMPPTSP
43	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah	kebijakan	14	14	10	10	17	6	41	30	81	BPKAD
44		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen	6	6	6	6	10	5	22	17	54	BPKAD
45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah	dokumen	13	13	19	18	20	12	52	43	97	BPKAD
46	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mendukung Pengembangan usaha	dokumen	4	3	6	6	10	9	20	18	22	BPMPPTSP
47	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Monev Investasi	Keg	2	2	2	2	2	2	6	6	14	BPMPPTSP
48	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Peningkatan Jumlah Investasi	event	4	3	5	4	5	4	14	11	36	BPMPPTSP
49		Peningkatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	3	2	6	BPMPPTSP

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		promosi dan kerjasama investasi											
50	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	%	0	0	88,17	47,74	88,34		88,34	47,74	88,85	DINAS CIPTA KARYA
51	Program Pengembangan Perumahan	Presentasi rumah tinggal bersanitasi	%	76,15	0	76,3	76,154	76,45		76,45		77	DINAS CIPTA KARYA
52	Program Pengawasan Gedung dan Bangunan	Rasio bangunan tidak BerIMB		500		500	512	500	510	3100	3122	4.600	DINAS CIPTA KARYA
53	Program lingkungan sehat perumahan	Cakupan layanan air bersih	%	86,04	0	86,08	86,41	86,12		86,12		86,24	DINAS CIPTA KARYA
54	Program Pembangunan Gedung Pemerintahan	Bangunan kantor desa /kelurahan	Unit	5	5	3	2	2	3	10	10	28	DINAS CIPTA KARYA
55	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terbangunnya RKB sekolah		-		RKB SD 681 dan SMP 39	RKB SD 210 dan SMP 78 (DAK SD 162, SMP 120, SMA 45, SMK 89, BLOCK GRAND SMA 18, SMK 21)	RKB SD 681 dan SMP 39	379 RKB SD & 42 SMP	1362 RKB SD 42 SMP	747 RKB SD 165 SMP	RKB SD 3.405 dan SMP 195	DINAS CIPTA KARYA
56	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Penambahan puskesmas rawat inap	Unit	-		2	4		2	2	2	8	DINAS CIPTA KARYA
57	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pembangunan Pasar tradisional	pasar	-		3	3	1	1	4	1	15	DINAS CIPTA KARYA
58	Program pembinaan panti asuhan/ panti	Tersedianya BLKI skala	paket	-		1	1	1	1	1	1	1	DINAS CIPTA KARYA



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	jompo	Kabupaten di Pasir Muncang Kec Jayanti											
59	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tersedianya sarana sanitasi sekolah	sarana sanitasi	19	264	250	262 Unit (SD 90, SMP 104, SMA/S MK 68)	250	217	217	217	1,269	DINAS CIPTA KARYA
60	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Sport Centre dan kelengkapan venue-venue	paket	-		1	1	1	1	1	1	1	DINAS CIPTA KARYA
61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya stadion mini	stadion mni	-		5	3	5	10	15	13	25	DINAS CIPTA KARYA
62	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan sarana air bersih	titik	-		10	31 Titik APBD dan 19 Titik DAK	10	31	20	81	50	DINAS CIPTA KARYA
63	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi jalan strategis kabupaten dalam kondisi baik	%	8,94%	14,68%	8,94%	8,94%	8,94%	0,88%	26,82%	15,59%	100%	DINAS BINA MARGA
64		Proporsi jalan non strategis kabupaten dalam kondisi baik		4,21%	6,70%	4,21%	4,21%	4,21%	2,08%	12,63%	890%	100%	DINAS BINA MARGA
65		Proporsi jembatan dalam kondisi baik		2,62%	2,2%	2,62%	2,62%	2,62%	6,69%	524,00%	7536%	100%	DINAS BINA MARGA
66		Proporsi jalan baru dalam kondisi baik		0	-	6,4 Km	0	6,4 Km	0	12,8	0%	32 Km	DINAS BINA MARGA
67		Proporsi jalan desa dalam kondisi baik		30 Km	74,11	30 Km	30 km	30 Km	63.925 Km	90	20447%	400 Km	DINAS BINA MARGA

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Proporsi Daerah Irigasi Kecil Dalam Kondisi Baik		0,00%	0	19,80%	18,14%	19,80%	44,28%			100%	DINAS BINA MARGA
69	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Proporsi Sungai Kabupaten Dalam Kondisi Baik		2,16%	0	2,16%	2%	2,16%	22,50%			13%	DINAS BINA MARGA
70	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Proporsi Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik		0%	0	1,01%	0,90%	1,01%	20,18%			6,05%	DINAS BINA MARGA
71	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten /Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital.		90 peta analog	90 peta analog	50 peta analog	50 peta analog	50 peta analog	50 peta analog	190 peta analog	190 peta analog	440 peta analog	DINAS TATA RUANG
72		Terlaksananya forum konsultasi publik		-	-	2 kali	0	2 kali	0	4 kali	0	8 Kali	DINAS TATA RUANG
73	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS TATA RUANG

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS TATA RUANG
75		Meningkatnya luasan RTH Publik di Kab Tangerang		-	-	0,25%	0,40%	0,25%	0,22%	11,5	11,62	12,30%	DINAS TATA RUANG
76	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi		9	9	11	11	13	13	13	13	15	DINAS KESEHATAN
77	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin		60%	67%	70%	61%	70%	61%	70%	61%	75%	DINAS KESEHATAN
78	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	9%	DINAS KESEHATAN
79	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prosentase MBR yang mendapatkan KARTU SEHAT		100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%	DINAS KESEHATAN
80	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		100%	97,62%	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	DINAS KESEHATAN

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4		95%	88,90%	95%	89,42%	95%	95%	95%	95%	95%	DINAS KESEHATAN
82	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90%	92,40%	90%	90,50%	90%	94%	90%	94%	90%	DINAS KESEHATAN
83	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Bayi		90%	97,20%	90%	93,2%	90,00%	93,10%	90,00%	93,10%	90%	DINAS KESEHATAN
84	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita		85%	87,91%	90%	90,90%	90%	91%	90%	91%	90%	DINAS KESEHATAN
85	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan Gizi		6,2%	4,06%	6,00%	4,14%	5,8%	3,63%	5,8%	3,63%	5,20%	DINAS KESEHATAN
86	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat sekolah dasar akan sarana sanitasi		60%	60%	68%	68%	70%	70%	70%	70%	100%	DINAS KESEHATAN
87	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif		70%	65,38%	70%	69,87%	70%	63,8%	70%	63,8%	80%	DINAS KESEHATAN
88	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan penderita DBD yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		93%	93,80%	94%	78,46%	95%	90%	95%	90%	98%	DINAS KESEHATAN
90	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15 - 24 tahun		< 0,1%	0,005%	< 0,1%	0,005%	< 0,1%	0,003%	< 0,1%	0,003%	< 0,1%	DINAS KESEHATAN
91	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase rumah tangga dengan air minum layak		30 Desa	30 Desa	60 Desa	60 Desa	90 Desa	90 Desa	90 Desa	90 Desa	180 Desa	DINAS KESEHATAN
92	Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan	Peningkatan jumlah penerima sarana prasarana keagamaan		1.100	1.283	1.150	1.140	1.200	1.200	3.450	3.623	12.350	DINSOS
93		Peningkatan jumlah bantuan sosial pada guru ngaji		3.480	3.480	3.480	3.419	3.480	3.480	10.440	10.379	25.230	DINSOS
94	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pemanfaat PKH		27.000 RTSM	23.185 RTSM	27.000 RTSM	23.049 RTSM	27.000 RTSM	27.000 RTSM	27000	27000	27.000 RTSM	DINSOS
95	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS		550 orang	570 orang	600 org	670 org	650 org	650 org	1800	1890	4.050 orang	DINSOS
96	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks	Rasio penyandang penyakit sosial		144 orang	170 org	150 org	170 org	160 org	160 org	454	500	967 org	DINSOS

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)												
97	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Meningkatnya sarana dan prasarana panti				50%	60%	60%	50%	60%	50%	90%	DINSOS
98	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini		36,74%	29,69%	46,74%	42,46%	56,74%	42,35%	56,74%	42,35	86,74%	DINAS PENDIDIKAN
99	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		91,77%	92,06%	92,27%	92,64%	92,77%	88,14%	92,77%	88,14	94,27%	DINAS PENDIDIKAN
100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		75,48%	75,61%	77,48%	78,76%	79,48%	68,81%	79,48%	68,81	85,48%	DINAS PENDIDIKAN
101	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI		0,08%	0,110%	0,07%	0,05%	0,06%	0,04%	0,06%	0,04	0,03%	DINAS PENDIDIKAN
102	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah (AP) SMP/MTs		0,19%	0,24%	0,16%	0,17%	0,13%	0%	0,13%	0,13	0,04%	DINAS PENDIDIKAN
103	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS		93,88%	100,09%	94,48%	99,36%	95,08%	99,98%	95,08%	1,00	96,88%	DINAS PENDIDIKAN
104	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		89,21%	85,81%	90,21%	86,94%	91,21%	84,68%	91,21%	0,85	94,21%	DINAS PENDIDIKAN
105	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Sekolah yang menerapkan Penambahan Kemampuan Baca/Tulis Al-Quran (muatan lokal) pada		15,00%		30,00%	39,73%	45,00%				90,00%	DINAS PENDIDIKAN

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		jenjang SD/SMP/SMA/S MK											
106	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tersedianya sarana sanitasi sekolah		19 Sarana Sanitasi	264 Sarana Sanitasi	250 Sarana Sanitasi	262 Unit (SD 90, SMP 104, SMA/S MK 68)	100 unit	216	369	742	600 unit	DINAS PENDIDIKAN
107	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/P aket C		62%	54,50%	69%	60,43%	76%	64,96%	76,00%	64,96	97%	DINAS PENDIDIKAN
108	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/P aket C		49%	49,11%	57%	55,28%	65%	55,28%	65%	55,28	89%	DINAS PENDIDIKAN
109	Program Pendidikan Menengah	Angka Putus Sekolah (AP) SMA/SMK/MA		0,38%	0,38%	0,33%	0,31%	0,28%	0,21%	0,28%	0,21	0,13%	DINAS PENDIDIKAN
110	Program Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Miskin Jenjang SMA/MA/SMK		10.433		12.000	7.104	14.000				20.000	DINAS PENDIDIKAN
111	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)		90%		90%	99,51%	91%	99,52%	91,00%	99,52	92,21%	DINAS PENDIDIKAN
112	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (Guru Layak/ GL)		65%	75,38	69%	82,69%	72%	84,40%	72,00%	84,40	82%	DINAS PENDIDIKAN
113	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya jumlah siswa yang mendapat beasiswa		-		5.000 Siswa	5.887 siswa	5.000				5.000 Siswa	DINAS PENDIDIKAN

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pendidikan											
114	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya DED Terminal Type A		-	;-	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
115	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan Dermaga Penyebrangan		-	-	1	0	1	0	0	5	5	DINAS PERHUBUNGAN
116	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan jumlah kapal patroli		1	0	1	0	1	0	0	5	5	DINAS PERHUBUNGAN
117	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya rambu lalu lintas dan rute angkutan sampah		-	-	30 unit rambu rute	0	30 unit rambu rute	0	30 unit rambu rute	230 unit rambu rute	230 unit rambu rute	DINAS PERHUBUNGAN
118	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kompetensi		600	600	720	720	720	720	2040	2040	4.200	Disnaker
119	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya sarana prasarana pendukung BLKI		-	-	1 Paket	0	1 Paket	0	2	0	2 Paket	Disnaker
120	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis masyarakat		290	290	100	570	100	360	490	1220	790	Disnaker
121	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kewirausahaan		380	380	100	360	100	660	580	1400	1060	Disnaker
122	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja		6.667	6530	6.667	6260	6.667	7.742	20.001	20.532	40.002	Disnaker
123	Program Perlindungan Pengembangan	Jumlah penanganan		280	310	200	471	200	343	680	946	1.280	Disnaker



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Lembaga Ketenagakerjaan	kasus/perselisihan ketenagakerjaan											
124		Jumlah pemeriksaan perusahaan		1200	1200	1.080	884	1.080	1.936	3.360	3.980	6.600	Disnaker
125	Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigran		15	0	25	0	25	25	65	25	140	Disnaker
126	Program peningkatan pendapatan daerah	Prosentase Peningkatan PAD		7%	45,09%	25%	31,27%	25%	23%	25%	23,28%	8%	DISPENDA
127	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan IKM		75 Pelaku IKM	50 Pelaku IKM	50 Pelaku IKM	50 Pelaku IKM	50 Pelaku IKM	50 Pelaku IKM	175 Pelaku IKM	150 Pelaku IKM	325 Pelaku IKM	Disperindag
128	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya pemahaman IKM terhadap SNI		40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	120 IKM	120 IKM	240 IKM	Disperindag
129	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kualitas SDM Calon Pelaku eksportir		70 Pelaku eksportir	25 eksportir	50 IKM/ calon/ pelaku Eksportir	50 eksportir	50 IKM/ calon/ pelaku Eksportir	50 IKM/ calon/ pelaku Eksportir	170 IKM/ calon/ pelaku Eksportir	125 IKM/ calon/ pelaku Eksportir	320 Pelaku eksportir	Disperindag
130	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Tersedianya laporan monitoring peredaran barang dan jasa		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	60 Laporan	Disperindag
131	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Tersedianya laporan distribusi barang/produk		52 Laporan Harga Sembako dan 26 Laporan distribusi Barang bersubidi	52 Laporan Harga Sembako dan 26 Laporan distribusi Barang bersubidi	52 Laporan Harga Sembako dan 26 Laporan distribusi Barang bersubidi	52 Laporan Harga Sembako dan 26 Laporan distribusi Barang bersubidi	52 Laporan Harga Sembako dan 26 Laporan distribusi Barang bersubidi	52 Laporan Harga Sembako dan 26 Laporan distribusi Barang bersubidi	196 Laporan Harga Sembako dan 78 Laporan distribusi Barang bersubidi	196 Laporan Harga Sembako dan 78 Laporan distribusi Barang bersubidi	312 Laporan Harga Sembako dan 156 Laporan distribusi Barang bersubidi	Disperindag

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat aliran listrik PLN		0 sambungan	1.500 Sambungan	1.500 Sambungan	2061 Sambungan	1.500 Sambungan	3017 sambungan	3000 Sambungan	5309 Sambungan	7.500 Sambungan	Disperindag
133	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perusahaan yang di awasi		200 Perusahaan	200 Perusahaan	200 Perusahaan	200 Perusahaan	200 Perusahaan	200 Perusahaan	600 Perusahaan	600 Perusahaan	1.200 Perusahaan	Disperindag
134	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya DED sarana dan prasarana Olahraga		0	0	3	3	3	3	6	6	25 DED	DISPORABU DPAR
135	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda		325	325	100	100	100	250	525	675	1.225 Orang	DISPORABU DPAR
136	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Peningkatan penanggulangan bahaya narkoba serta virus HIV dan AIDS dikalangan generasi muda		900	900	1500	1050	1500	600	3900	2550	8.850 Orang	DISPORABU DPAR
137	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan keikutsertaan event tingkat nasional		4	4	7	7	11	4	22	15	21 Cabang Olahraga	DISPORABU DPAR
138	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan peran aktiv masyarakat dalam kegiatan kebugaran olahraga		0	0	3	3	6	6	9	9	15 Kelompok/ Kec	DISPORABU DPAR
139	Program Peningkatan	Tersedianya		0	0	1	1	0	1	1	2	1 DED	DISPORABU

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sarana dan Prasarana Kebudayaan	dokumen perencanaan sarana prasarana kebudayaan										Pembangunan Auditorium	DPAR
140	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan gelar seni		2	2	2	2	2	2	6	6	14 kali Festival	DISPORABU DPAR
141	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya masterplan Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)		1	0	0	1	0	0	1	1	1 Dokumen Perencanaan	DISPORABU DPAR
142	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)		1 Dokumen Perencanaan	0	Pmbgunan 40% ODTW	0	Pmbgunan 60% ODTW	0 (1 dokumen)	Pmbgunan 60% ODTW	0	pembangunan 100% ODTW	DISPORABU DPAR
143	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang		5	5	3	3	3	3	11	11	27 Kali Pameran	DISPORABU DPAR
144	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/pekebunan	Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)		53 Unit	35 Unit	46 Unit	69 Unit	46	99	145	203	1.083	DPPKP
145	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas Padi (Ton GKG/Ha)		5,7 Ton/Ha	5,7 Ton/Ha	5,8 Ton/Ha	5,8 Ton/Ha	5,9	6,31	5,9	6,31	6,35	DPPKP
146		Meningkatnya Indeks Pertanaman		2 Kali	2 Kali	1,8 Kali	1,8 Kali	1,82	1,56	1,82	1,56	1,9	DPPKP
147	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan pelayanan kesehatan hewan (Desa / Kelurahan)		18 desa	18 desa	44 desa	44 desa	44 desa	44	106	106	274 desa	DPPKP
148	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	menurunkan jarak kelahiran ternak (calving interval) (bulan)		0,4 bulan	0,4 bulan	0,4 bulan	0,4 bulan	0,4 bulan	0,4 bulan	0,4 bulan	0,4 bulan	18 Bulan	DPPKP

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	Peningkatan jumlah kelompok yang memenuhi skala usaha peternakan		2	8	2	2 kelompok	2	2	6	12	16	DPPKP
150	Program Peningkatan Kesehatan Masy. Veteriner	Meningkatnya mutu dan kesehatan produk asal hewan		120 sampel	120 sampel	60 sampel	60 sampel	60	60	240	240	350 sampel	DPPKP
151	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Kapasitas Lumpur Tinja		6%	6%	6%	6%	6%	6%	58%	58%	76%	DKP
152	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Prosentase TPU yang terkelola		7,50%	7,50%	7,50%	7%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	22,50%	KPD
153	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah Pemasangan PJU		466 titik	290 titik	500 titik	585 titik	500 titik	867 titik	14.466 titik	14.742 titik	15.966 titik	DKP
154	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah Pemeliharaan PJU		866 titik	1073 titik	866 titik	98 titik	866 titik	0 titik	10.398 titik	8.971 titik	8.700 titik	DKP
155	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio jumlah taman kota yang tertata		3%	3%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	15,00%	15,00%	25%	DKP
156	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio Jumlah sampah yang ditangani		6%	5,7%	7%	6,8%	7%	6,5%	60%	59%	78%	DKP
157	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		25 menit	35 menit	20 menit	25 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	15 menit	BPBD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(WMK)											
158	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan layanan penanganan wilayah rawan bencana		23 Kec	7 kec	15 Kec	26 Kec	15 Kec	22 Kec	15 Kec	22 Kec	5 Kec	BPBD
159	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya jumlah perda		10 Perda	10 Perda	10 Perda	13 Perda	10 Perda	11	30	34	50	SETWAN
160	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya koordinasi lembaga perwakilan rakyat		46 kali	61 Kali	46 kali	47 Kali	46 kali	55	138	163	230	SETWAN
161	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM lembaga perwakilan rakyat		9 kali	8 Kali	9 kali	9 Kali	9 kali	8	27	25	25	SETWAN
162	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terakomodirnya aspirasi masyarakat		3 kl	3 kali	3 kl	2 Kali	3 kl	3	9	9	15	SETWAN
163	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas penentu kebijakan		83 Kali	79 Kali	83 Kali	83 Kali	83 Kali	80	249	242	415	SETWAN
164	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4	12	12	20	SETWAN
165	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan	Luas lahan untuk kepentingan		20,84	20,84	10 Ha	56,94 Ha	8	37,69	28	115,47	57,50 Ha	SETDA

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan pemanfaatan tanah	umum											
166	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya Komunikasi Data Komputerisasi antar SKPD		0	0	32 SKPD	5 SKPD	41 SKPD	41	41	41	63 SKPD	DISKOMINFO
167	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya pembinaan pegawai melalui pendidikan formal dan non formal		50	0	50	17	50	5	150	22	350	SETDA
168	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan		0	0	218	155	303	0	521	155	1312	SETDA
169	Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum	Optimalisasi Perangkat Daerah		24	0	28	28	28	28	80	56	188	SETDA
170	Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum	Terinventarisasinya Data Bidang Kesejahteraan Rakyat		57	57	57	57	-	0	114	114	57	SETDA
171	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan, Manajemen, Inventaris Kekayaan Desa		246	246	246	246	246	246	246	246	246	BPMPPD
172	Program kerjasama informasi dan media massa	Tersedianya informasi melalui media informasi		1	1	3	3	4	4	8	8	4	SETDA

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tersusunnya Dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas pelayanan Publik		6	12	11	14	17	83	34	109	81	SETDA
174	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Produk hukum daerah		10	10	10	18	10	13	30	41	70	SETDA
175	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Porsentase penanganan gangguan Kantrantibmas per tahun		100%	98,38%	100%	99,95%	100%	99,20%	100%	98,24%	100%	SATPOLPP
176	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah penegakan Perda yang terkait dengan Kantrantibmas		7 perda/tahun	9 perda/tahun	8 perda/tahun	10 perda/tahun	10 perda/tahun	10 perda/tahun	10 perda/tahun	10 perda/tahun	10 perda/tahun	SATPOLPP
177	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah aparaturn Linmas dan Satpol PP yang mendapatkan pelatihan		150 orang	185 orang	150 orang	250 orang	150 orang	150 orang	450 orang	585 orang	1550 orang	SATPOLPP
178	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Frekuensi monitoring dan evaluasi ketertiban umum		16 kali/thn	36 kali/thn	14 kali/thn	36 kali/thn	20 kali/tahun	50 kali/tahun	80 kali	128 kali	650 kali	SATPOLPP
179	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Hari Rawat/Hari Perawatan Maksimalx100%		75%	79,21%	75%	79,76%	75%	71,50%	75%	71,50%	75%	RSUD TANGERANG
180	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Ratio pemenuhan sarpras pelayanan terhadap standar RS Kelas B pendidikan		2 Unit (1 unit IPAL dan 1 Gedung Radiologi Tahap2)	1 Unit Gedung Radiologi	2 Unit (1 unit rawat inap tahap 1)	0	(1 unit rawat inap tahap 2)	1 Unit (MCU di PKW)	4 Unit (IPAL, Radiologi, MCU, Rawat Inap)	3 Unit (IPAL, Radiologi, MCU)	14 Unit	RSUD TANGERANG
181	Program Peningkatan	Ratio		48 unit	116 unit	58 unit	89 unit	57 unit	113	163	368	390 Unit	RSUD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelayanan Rumah Sakit	pemenuhan alat kesehatan pelayanan standar RS Kelas B pendidikan											TANGERANG
182	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Prosentase Masyarakat Miskin yang dilayani		80,00%	78,50%	80,00%	79,40%	80,00%	80,00%	80,00%	98,26%	80%	RSUD TANGERANG
183	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75%	92%	75%	95%	75%	73,81%	75%	73,81%	75%	RSUD TANGERANG
184	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rasio Pelayanan Masyarakat miskin yang dilayani JAMKESMAS		0,1%	0,3%	0,2%	1,1%	0,30%	9,00%	1,80%	11,63%	73,00%	RSUD BALARAJA
185	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio sarana dan prasarana RSUD Balaraja sesuai RS tipe B		9,0%	3,0%	23,0%	11,0%	7,00%	10,00%	77,00%	62,00%	94%	RSUD BALARAJA
186		Tesedianya obat-obatan rumah sakit		2,0%	2,0%	3,0%	3,0%	4,00%	0,00%	79,00%	75,00%		
187	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Prosentase tingkat hunian RS (BOR)		4,0%	8%	5,0%	13%	3,00%	2,00%	72,00%	83,00%	75%	RSUD BALARAJA
188	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Kepuasan pelanggan RS (Rata-rata dari semua pelayanan)		2,0%	4%	2,0%	5,50%	2%	3%	66,00%	72,20%	85%	RSUD BALARAJA
189	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Prosentasi luas jangkauan layanan		8 Kec dan 3 Kel	8 Kec dan 3 Kel	4 Kec dan 4 Kel	4 Kec dan 4 Kel	4 Kec dan 4 Kel	0	16 Kec dan 11 Kel	8 Kec dan 7 Kel	21 Kec dan 28 Kel	Perpusda



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perpustakaan	perpustakaan											
190	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penambahan koleksi bahan pustaka perpustakaan		9.600 eks	0	3250 eks	8241 eks	3250 eks	10000 eks	16100	18241	16.750 eks	Perpusda
191	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemanfaatan Fasilitas Dana Pemerintah bagi KUMKM melalui UPDB		5000 UMKM	5100 UMKM	7000 UMKM	7878 UMKM	5000 UMKM	4.441 KUKM	17000	17419	60.000 UMKM	KUMKM
192		Promosi KUMKM		4 Event Promosi	4 Event Promosi	4 Event Promosi	5 Event Promosi	4 Event Promosi	5 Event Promosi	14	16	26 Event	KUMKM
193	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Fasilitasi Pengembangan KUMKM		18 KUMKM	0	15 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	48 KUMKM	51	66	96 KUMKM	KUMKM
194		Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan UMKM		150 KUMKM	50 KUKM	100 KUMKM	92 KUKM	100 KUMKM	100 KUMKM	230	265	800 KUMKM	KUMKM
195	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian		4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	12	12	24 Koperasi	KUMKM
196	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi		80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	305	305	545 orang	KUMKM
197	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi Kemitraan Investasi dan Usaha bagi UMKM		-	-	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	90	90	180 UMKM	KUMKM
198	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan nilai-nilai luhur kebangsaan		6	6	14	14	14	14	34	34	76	KESBANGPOL

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan politik daerah		14	14	19	19	17	17	50	50	105	KESBANGPOL
200	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlayannya Penataan, Peminjaman, penitipan dan penyimpanan, perawatan, alih media, akses multimedia, konsultasi dan asistensi		2 SKPD	2 SKPD	1 SKPD	2 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	4	4	5 SKPD	Kantor Arsip Daerah
201	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Ditetapkannya regulasi terhadap komponen - komponen strategis dalam implementasi sistem kearsipan 2. Pengelolaan Pelayanan Informasi Kearsipan Menjadi Lebih Transparan dan mudah diakses melalui Internet		0	0	1 Database (Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan arsip)	1 Database	1 Database (Pembentukan mekanisme dan sarana akses terhadap arsip)	1 Database	2	2	5 database (Pembakuan sistem manajemen arsip elektronik/ database)	Kantor Arsip Daerah
202	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terlayannya Penataan, Peminjaman, penitipan dan penyimpanan, perawatan, alih media, akses multimedia, konsultasi dan asistensi		9.000 Dokumen	15758 Dokumen	9.000 Dokumen	31714 Dokumen	9.000 Dokumen	116.456 Dok	27.000	163.928	45.000 Dokumen	Kantor Arsip Daerah
203	Program pemeliharaan	terselamatkanny		116	116	116	116	116	45	348	277	696	Kantor Arsip

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	a Dokumen / Arsip daerah		Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar	Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar	Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar	Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar	Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar	Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar			Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar	Daerah
204	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	LHP	943 LHP	800 LHP	563 LHP	1180 LHP	513 LHP	930 LHP	2019	2910	363	Inspektorat
205		Jumlah laporan temuan yang ditindak lanjuti	TLHP	400 TLHP	300 TLHP	500 TLHP	423 TLHP	600	354	1500	1077	560	Inspektorat
206	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	%	79,00%	81,60%	83%	83,22%	87,00%	89,38%	87,00%	89,38%	99,00%	Disdukcapil
207	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KK	%	91,00%	90,67%	92%	105,33%	93,00%	98,24%	93,00%	98,24%	96,00%	Disdukcapil
208	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	73,00%	73,55%	76%	76,79%	79,00%	72,01%	79,00%	72,01%	91,00%	Disdukcapil
209	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	kali	6 kali	6 Kali	6 kali	6 Kali	7 kali	10 kali	7	10	76	DISKANLA
210	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya kebersihan wilayah pesisir	desa pantai	1 Kec. Pantai	1 Kec. Pantai	1 Kec. Pantai	1 Kec. Pantai	1 Kec. Pantai	1 Kec. Pantai	1	1	11	DISKANLA
211	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya infrastruktur perekonomian	desa pesisir	-	-	-	-	3 Desa Pesisir	3 Desa Pesisir	3	3	25	DISKANLA

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	2013		2014		2015		Kondisi sampai dengan 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pesisir	Desa pesisir											
212	Program pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan Produktivitas Budidaya Air Tawar	ton/ha/th	3 ton/ha /th	7,36 ton/ha/th	3,5 ton/ha/th	8,4 ton/ha/th	4 ton/ha/th	7,9 ton/ha/th	4	7,9	5,5	DISKANLA
213		Peningkatan Produktivitas Budidaya Payau	ton/ha/th	1,2 ton/ha/th	2,9 ton/ha/th	1,3 ton/ha/th	2,68 ton/ha/th	1,4 ton/ha/th	3,74 ton/ha/th	1,4	3,74	1,5	DISKANLA
214	Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan Produktivitas Alat Tangkap	ton/th	38 kg/unit/ trip	40 kg/unit/ trip	38 kg/unit/ trip	40 kg/unit/ trip	20.000 ton/th	20.204,21 ton/ th	20000	20204,21	21500	DISKANLA
215		Peningkatan Kualitas Sarana/Pra-sarana PPI/TPI	PPI/TPI	-	-	1	3	1	2	1	2	7	DISKANLA
216	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan konsumsi ikan per kapita	kg /kapita/th	16	20,07	17	25,9	27	27,2	27	27,2	33	DISKANLA
217	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Diversifikasi hasil olahan perikanan	jenis olahan	2	3	2	4	2	4	2	4	30	DISKANLA
218		Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan dan Kelautan	kelompok	-	-	5	20	3	3	3	3	45	DISKANLA

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis mengenai isu strategis di Kabupaten Tangerang yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD dalam lingkungan Kabupaten Tangerang.

### **2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2017 serta prioritas lain dari kebijakan nasional dan Provinsi Banten yang bersifat mandatory.

#### **Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang adalah :**

1. Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas
2. Pengembangan pusat pertumbuhan dan intergrasi sistem transportasi
3. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah
5. Peningkatan Iklim Investasi dan Saing Daerah
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
7. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan yang dihadapi terkait prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 adalah :

1. Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas
  - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya
  - Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal

- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang
  - Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai
  - Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah pedesaan belum merata
  - Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional
  - Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang
  - Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum optimal
2. Pengembangan pusat pertumbuhan dan integrasi sistem transportasi
- Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah belum tertata dengan baik
  - Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan pedesaan dan perbatasan belum optimal
  - Terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat
  - Kondisi ruas jalan yang belum optimal menampung arus kendaraan yang ada sehingga dibutuhkan pelebaran jalan dan peningkatan di beberapa ruas jalan
  - Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak
  - Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
3. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup
- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
  - Perlunya percepatan pengembangan kawasan strategis
  - Masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah
  - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan
  - Semakin meningkatnya limbah cair, padat dan B3
  - Perkembangan kawasan perkotaan yang terus meningkat dan semakin berkurangnya kawasan terbuka hijau
  - Tingginya konversi/alih fungsi lahan pertanian/hutan menjadi lahan terbangun (area pemukiman, industri, dll.)
  - Ancaman bencana banjir di beberapa wilayah
4. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah
- Daya saing produk UMKM belum kuat
  - Akses pasar masih rendah dan infrastruktur sarana yang perlu ditingkatkan
  - Manajemen usaha dan akses permodalan koperasi dan UMKM belum optimal
  - Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor
  - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal
  - Produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan
  - Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai
  - Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal
  - Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang
  - Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya
  - Standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal
5. Peningkatan Iklim Investasi dan Saing Daerah
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi
  - Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi
  - Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal

- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang
  - Masih tingginya ketimpangan investasi antar wilayah
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (e-Gov) belum optimal;
  - Implementasi Good Governance belum optimal.
  - Akses pelayanan umum bagi semua masyarakat belum merata
  - Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal
  - Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri belum optimal.
7. Penanggulangan Kemiskinan
- Tingkat kemiskinan masih tinggi
  - Ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah
  - Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang
  - Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal
  - Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal
  - Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

#### **1 Urusan Pendidikan**

- 1 Rasio murid per kelas masih belum sesuai target RPJMD
- 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah belum merata
- 3 Belum optimalnya penerapan muatan lokal BTQ
- 4 Belum memenuhinya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.



- 5 Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal

## **2 Urusan Kesehatan**

- 1 Peningkatan kasus hipertensi, PJK, stroke, DM (PTM) karena Kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan deteksi dini factor resiko penyakit tidak menular (PTM ) melalui kegiatan Posbindu
- 2 Masih banyaknya rumah tangga yang belum menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama dalam indikator prilaku merokok dalam rumah dan pemberian ASI eksklusif;
- 3 DPS/klinik swasta dan rumah sakit belum terlatih International Standard for Tuberculosis Care (ISTC)
- 4 Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD, penyakit kusta dan HIV-AIDS
- 5 Masih ditemukannya kematian Ibu sebesar 39 kasus dan kematian bayi sebesar 271 kasus
- 6 Belum semua Penduduk Kabupaten Tangerang yang mempunyai jaminan kesehatan, untuk Kartu Sehat 127.348 jiwa dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 906.433 jiwa
- 7 Masih belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 8 Masih ditemukannya gangguan gizi ( malnutrisi ) pada Balita sebesar 0,45 %
- 9 Sebagian pangan yang beredar di masyarakat belum memenuhi persyaratan keamanan pangan
- 10 Masih rendahnya kesehatan lingkungan dan pemukiman
- 11 Masih rendahnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas
- 12 Masih kurangnya ruang rawat inap di RSUD Balaraja
- 13 Masih kurangnya sarana ICU,NICU di RS.

## **3 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

- 1 Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan untuk mempertahankan umur rencana jalan dan jembatan;

- 2 Perlunya peningkatan struktur dan kapasitas serta perbaikan persimpangan jalan untuk mengurangi kemacetan di daerah perkotaan;
  - 3 Kurangnya jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - 4 Belum optimalnya penanganan genangan banjir kawasan perkotaan dan pemukiman khususnya saluran/tanggul yang bukan kewenangan kabupaten sehingga perlu koordinasi yang lebih intens terhadap instansi terkait;
  - 5 Perlu ditingkatkannya koordinasi antar SKPD terkait pemanfaatan jalan seperti overload beban muatan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan yang disyaratkan guna umur rencana jalan dapat tercapai.
  - 6 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
  - 7 Masih terdapatnya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang
  - 8 Belum tercukupinya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang.
- 4 **Urusan Perumahan**
- 1 Belum optimalnya Penataan lingkungan perumahan dan permukiman terutama di wilayah utara Kabupaten Tangerang
- 5 **Urusan Perencanaan Pembangunan**
- 1 Belum optimalnya koordinasi dengan perencana di SKPD
  - 2 Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.
- 6 **Urusan Perhubungan**
- 1 Penanganan daerah rawan kemacetan seperti simpang cadas, simpang dadap maupun simpang lippo karawaci terkendala dengan tingkat kepatuhan pengguna lalu-lintas yang masih rendah
  - 2 Keterbatasan petugas yang menangani lalu-lintas dan disisi lainnya kapasitas SDM petugas yang terbatas
  - 3 Fasilitas angkutan umum seperti penyediaan sub terminal belum tersedia dengan layak.
- 7 **Urusan Lingkungan Hidup**

- 1 Keterbatasan tenaga teknis ( PPLHD ) khususnya penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup;
- 2 Rendahnya pemahaman dan kesadaran dalam mengimplementasikan dokume- dokumen lingkungan, pengelolaan limbah baik itu limbah cair, padat maupun gas yang dihasilkannya;
- 3 Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi komitmen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL dan yang sudah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan semesterannya.

#### **8 Urusan Pertanahan**

- 1 Permintaan harga ganti kerugian tanah relatif tinggi melebihi harga yang telah di tetapkan oleh tim appraisal penilai tanah
- 2 Dokumen kepemilikan tanah yang belum lengkap/valid

#### **9 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- 1 Penerbitan KTP tidak mencapai target dikarenakan sudah terpenuhi dalam program nasional e-KTP;
- 2 Masih tingginya arus urbanisasi dan mutasi penduduk diwilayah kabupaten Tangerang;
- 3 Terbatasnya ruang penyimpanan Arsip Pencatatan Sipil (arsip aktif seumur hidup) dan Arsip Penerbitan KTP dan KK (arsip aktif selama 5 tahun);
- 4 Beredarnya Dokumen Kependudukan Palsu.

#### **10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1 Belum optimalnya peranan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kecamatan;
- 2 Belum optimalnya data tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3 Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan perempuan;
- 4 Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- 5 Rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak

- 6 Belum semua kecamatan, rumah sakit, dan perusahaan efektif melaksanakan GSI.

### **11 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- 1 Rendahnya partisipasi pria dalam program KB dari seluruh peserta KB aktif;
- 2 Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan Kesehatan;
- 3 Masih tingginya tingkat DO peserta KB;
- 4 Masih tingginya Pasangan Usia Subur di bawah 20 tahun;
- 5 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Tri Bina dan UPPKS;
- 6 Masih tingginya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- 7 Belum optimalnya pembinaan dan peran Institusi Masyarakat;
- 8 Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak kesehatan reproduksi.

### **12 Urusan Sosial**

- 1 Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 2 Masih banyaknya PMKS dan keluarga miskin yang belum terakses pelayanan kebutuhan dasar.

### **13 Urusan Ketenagakerjaan**

- 1 Terbatasnya Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi sebagai kebutuhan tenaga kerja di perusahaan tidak dapat dipenuhi dengan program pelatihan regular/institusional;
- 2 Untuk kegiatan padat karya bukan Tupoksi Disnaker, tetapi ada di Kecamatan;
- 3 Belum optimalnya hubungan manajemen perusahaan dengan tenaga kerja
- 4 Belum optimalnya koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Kab. Tangerang.

### **14 Urusan KUKM**

- 1 Masih rendahnya kualitas produksi usaha mikro;
  - 2 Rendahnya kualitas SDM Usaha mikro dalam pengembangan produk, pemasaran, pengemasan dan kewirausahaan;
  - 3 Rendahnya akses pembiayaan;
  - 4 Rendahnya akses kemitraan dan teknologi;
  - 5 Masih terdapatnya koperasi dan UMKM yang belum memiliki daya saing produk dan manajemen usaha;
  - 6 Terbatasnya kemampuan permodalan bagi koperasi dan UMKM.
- 15 **Urusan Penanaman Modal**
- 1 Belum maksimalnya sistem dan jaringan informasi data;
  - 2 Belum maksimalnya penyediaan informasi dan profil investasi.
- 16 **Urusan Kebudayaan**
- 1 Masih rendahnya pelaku seni tradisional terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya;
  - 2 Belum memadainya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
  - 3 Masih rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional.
- 17 **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
- 1 Masih kurangnya pemahaman organisasi kepemudaan tentang manajemen organisasi;
  - 2 Kurangnya kegiatan pengendalian bahaya narkoba;
  - 3 Kurangnya fasilitas olahraga bagi masyarakat;
  - 4 Belum optimalnya prestasi atlet pelajar di Kabupaten Tangerang;
  - 5 Belum lengkapnya data base sarana dan prasaran olahraga di Kabupaten Tangerang.
- 18 **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
- 1 Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum;
  - 2 Makin meningkatnya potensi gangguan ketertiban umum

terkait masalah ekonomi, politik dan social budaya;

- 3 Masih terdapat Organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar.
- 4 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
- 5 Intensifikasi penanganan gangguan ketertiban umum melalui koordinasi dan pemetaan lokasi gangguan ketertiban;
- 6 Intensifikasi patroli guna memantau dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum;
- 7 Melaksanakan penyuluhan kepada Organisasi kemasyarakatan.

#### **19 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian**

- 1 Luasnya jangkauan pelayanan perijinan dan nonperijinan di Kabupaten Tangerang
- 2 Masih tingginya keluhan pelayanan perijinan dan nonperijinan terutama dari sisi waktu proses pelayanan
- 3 Masih adanya pelanggaran administrasi perijinan dan nonperijinan
- 4 Kurangnya pemahaman administrasi kepegawaian pada SKPD terkait peraturan kepegawaian
- 5 Kurangnya penerapan hukuman disiplin bagi aparatur
- 6 Database kepegawaian belum sempurna

#### **20 Urusan Ketahanan Masyarakat**

- 1 Permasalahan pada Urusan Ketahanan Pangan adalah belum meningkatnya kualitas keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

#### **21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1 Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 2 Kurangnya akses masyarakat pedesaan terhadap informasi TTG dan permodalan terbatas

#### **22 Urusan Statistik**

- 1 Permasalahan yang dihadapi pada adalah belum maksimalnya kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah

### **23 Urusan Kearsipan**

- 1 Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi kearsipan;
- 2 Terbatasnya tenaga arsiparis pada dinas/ instansi.

### **24 Urusan Komunikasi dan Informatika**

- 1 Tersedianya Grand Design Jaringan system informasi teknologi;
- 2 Belum optimalnya kapasitas bandwidth untuk melayani seluruh SKPD.

### **25 Urusan Perpustakaan**

- 1 Permasalahan pada Urusan Perpustakaan adalah belum meratanya pelayanan perpustakaan di Kabupaten Tangerang

### **26 Urusan Pertanian**

- 1 Banyaknya kerusakan saluran irigasi tersier;
- 2 Kurangnya jumlah sarana dan alat dan mesin pertanian;
- 3 Belum optimalnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi;
- 4 Kurangnya intensifikasi lahan dan pengendalian hama penyakit serta meningkatkan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan peternakan
- 5 Rendahnya produkivifitas ternak;
- 6 Belum optimalnya produktivitas kelompok ternak agribisnis;
- 7 Masih rendahnya mutu dan kesehatan produk asal hewan.

### **27 Urusan Sumber Daya Mineral**

- 1 Belum optimalnya fasilitasi penyediaan listrik perdesaan untuk masyarakat miskin;
- 2 Masih adanya desa yang belum terjangkau akses terhadap jaringan ketenagakerjaan;
- 3 Belum tersedianya SDM ketenagalistrikan;
- 4 Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang yang belum terlayani jaringan listrik.

## **28 Urusan Pariwisata**

- 1 Permasalahan pada Urusan Pariwisata tahun 2013 Belum optimalnya sosialisasi dan promosi tentang pariwisata di Kabupaten Tangerang.

## **29 Urusan Kelautan dan Perikanan**

- 1 Masih rendahnya pemahaman anggota kelompok masyarakat pesisir (KMP) terhadap detil pekerjaan, khususnya pekerjaan bina infrastruktur dan bina siaga bencana;
- 2 Kurangnya produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3 Produktivitas para nelayan yang masih tergolong rendah karena penggunaan armada perikanan di kabupaten Tangerang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil;
- 4 Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan meliputi, infrastruktur, bangunan TPI, perlengkapan lelang maupun sarana dan prasarana menangkap ikan baik itu kapal nelayan maupun alat tangkap ikan.

## **30 Urusan Perdagangan**

- 1 Kurangnya koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
- 2 Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3 Masih lemahnya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasaran;
- 4 Kurang optimalnya pengendalian dan pendistribusian barang bersubsidi;
- 5 Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi prosuk IKM;
- 6 Kurang optimalnya sosialisasi tentang regulasi terhadap para eksportir;
- 7 Kurang optimalnya data base perindustrian dan perdagangan sebagai pedoman untuk pemantauan dan pengawasan;
- 8 Belum intensif promosi terhadap prosuk IKM di dalam dan



luar negeri;

- 9 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk promosi dan pemasaran produk IKM di Kabupaten Tangerang.

### **31 Urusan Perindustrian**

- 1 Masih banyaknya IKM yang mengolah produk makanan dan minuman belum higienis dan terbatasnya kemampuan IKM dalam mengelola manajemen perusahaan (mutu) dan teknologi produksi;
- 2 Masih kurangnya pemahaman para pelaku industri tentang kawasan industri;
- 3 Belum lengkapnya data perusahaan IKM baik formal dan non formal;
- 4 Banyaknya perusahaan yang belum memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil/realisasi produksi, semesteran dan tahunan;
- 5 Masih kurangnya pemahaman dan penerapan terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta produk yang berstandar Nasional;
- 6 Banyaknya hasil industri yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 7 Adanya produk impor yang menimbulkan persaingan produk industri lokal.

### **32 Urusan Ketransmigrasian**

- 1 Permasalahan pada Urusan Ketransmigrasian tahun 2013 adalah masih belum tingginya kesadaran masyarakat dalam terhadap ketransmigrasian.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, struktur ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan salah satu indikator yang baik untuk pengukuran kinerja perekonomian suatu daerah. Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang digunakan selama ini dikelompokkan kedalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalan; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu atas dasar harga berlaku (*current price*) dan atas dasar harga konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku (*current price*) adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*) adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang konstan pada tahun dasar tertentu (saat ini menggunakan tahun 2010). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh daerah tersebut.

Secara agregat nilai PDRB Kabupaten Tangerang sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1 menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun baik nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Tangerang tetap mengalami pertumbuhan kearah yang selalu positif.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Harga Konstan (adhk) 2010, Tahun 2014-2015

Sektor/Lapangan Usaha	adhb (juta rupiah)		adhk (juta rupiah)	
	2014 **)	2015 ***)	2014 **)	2015 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.297.203	6.988.574	4.582.187	4.785.658
2. Pertambangan dan Penggalian	45.220	50.746	33.521	33.268
3. Industri Pengolahan	36.651.945	38.773.292	31.382.253	31.808.874
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5.148.123	6.731.982	1.755.945	1.830.923
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54.201	75.767	57.821	63.334
6. Konstruksi	11.474.382	13.747.562	8.448.397	9.660.129
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.866.317	11.073.873	8.543.790	9.247.724
8. Transportasi dan Pergudangan	2.578.561	3.000.778	2.009.197	2.261.638
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.427.433	1.532.119	1.066.960	1.134.501
10. Informasi dan Komunikasi	3.021.688	3.636.121	3.432.313	3.962.666
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.284.717	4.960.491	3.266.732	3.371.423
12. Real Estat	5.924.677	6.460.456	5.422.375	5.924.692
13. Jasa Perusahaan	904.081	1.016.443	706.290	784.995
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.471.034	1.785.451	1.048.091	1.172.256
15. Jasa Pendidikan	2.355.844	2.747.497	1.617.460	1.634.089
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	361.208	403.957	287.412	294.885
17. Jasa lainnya	1.445.389	1.749.672	1.038.272	1.184.443
PDRB	93.312.022	104.734.781	74.699.018	79.155.499

Keterangan: \*\*) Angka Sementara, BPS

\*\*\*) Hasil Estimasi Bappeda

Nilai PDRB yang dihasilkan dari kegiatan produksi barang dan jasa tahun 2015 di Kabupaten Tangerang diperkirakan adalah sebesar Rp. 104.734,8 miliar. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berasal dari penghitungan nilai total produksi

barang dan jasa tahun 2015 dikalikan dengan harga dasar tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 79.155,5 miliar. Jika dilihat lebih lanjut, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan telah mengalami tekanan dan perlambatan dari 6,12% pada tahun 2014 menjadi 5,97% pada tahun 2015. Secara umum perekonomian Kabupaten Tangerang tetap tumbuh positif meskipun tingkat pertumbuhannya mengalami perlambatan di tahun 2015.

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2015, sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi yang paling besar (40,19%) dalam perekonomian diikuti sektor Kontruksi dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan dua penyumbang terbesar berikutnya terhadap PDRB, yaitu masing-masing sebesar 12,20% dan 11,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga lapangan usaha tersebut berpotensi sebagai lapangan usaha yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar, walaupun kecenderungan lapangan Usaha Industri Pengolahan terlihat semakin menurun pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. Sementara itu, sektor yang memiliki kontribusi paling kecil kurang dari 1% adalah sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa perusahaan masing-masing sebesar 0,04%, 0,08%, 0,37% dan 0,99%.

Gambaran secara umum perkembangan kontribusi sektor-sektor ekonomi (PDRB) Kabupaten Tangerang, dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Distribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Harga Konstan (adhk) 2010, Tahun 2014-2015

Sektor/Lapangan Usaha	adhb (%)		adhk (%)	
	2014 **)	2015 ***)	2014 **)	2015 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,75	6,67	6,13	6,05
2. Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,04	0,04
3. Industri Pengolahan	39,28	37,02	42,01	40,19
4. Pengadaan Listrik dan Gas	5,52	6,43	2,35	2,31
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,08	0,08
6. Konstruksi	12,30	13,13	11,31	12,20
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,57	10,57	11,44	11,68
8. Transportasi dan Pergudangan	2,76	2,87	2,69	2,86
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,46	1,43	1,43
10. Informasi dan Komunikasi	3,24	3,47	4,59	5,01
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	4,74	4,37	4,26
12. Real Estat	6,35	6,17	7,26	7,48
13. Jasa Perusahaan	0,97	0,97	0,95	0,99
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,58	1,70	1,40	1,48
15. Jasa Pendidikan	2,52	2,62	2,17	2,06
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,39	0,38	0,37
17. Jasa lainnya	1,55	1,67	1,39	1,50
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: \*\*) Angka Sementara, BPS  
 \*\*\*) Hasil Estimasi Bappeda

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang 2015 secara umum mengalami perlambatan dibanding tahun 2014. namun demikian, masih terdapat sektor yang tetap dapat tumbuh di atas 10%, sektor/lapangan usaha tersebut adalah : sektor Informasi dan komunikasi (15,45%), Kontruksi (14,34%), Jasa lainnya (14,08%), sektor Transportasi dan pergudangan (12,56%), sektor sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (11,85%), dan sektor Jasa perusahaan (11,14%). Sedangkan sektor Industri Pengolahan meskipun kecil masih tetap dapat tumbuh positif, yaitu sebesar 1,36%. Prakiraan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 pada masing-masing sektor dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Harga Konstan (adhk) 2010, Tahun 2014-2015

Sektor/Lapangan Usaha	adhb (%)		adhk/LPE (%)	
	2014 **)	2015 ***)	2014 **)	2015 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,66	10,98	4,86	4,44
2. Pertambangan dan Penggalian	13,67	12,22	3,44	(0,76)
3. Industri Pengolahan	5,10	5,79	1,41	1,36
4. Pengadaan Listrik dan Gas	112,79	30,77	7,77	4,27
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,06	39,79	8,33	9,53
6. Konstruksi	22,17	19,81	12,62	14,34
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,55	12,24	5,43	8,24
8. Transportasi dan Pergudangan	24,87	16,37	14,70	12,56
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,71	7,33	14,03	6,33
10. Informasi dan Komunikasi	15,40	20,33	18,78	15,45
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	15,77	3,21	3,20
12. Real Estat	11,97	9,04	10,43	9,26
13. Jasa Perusahaan	19,74	12,43	13,10	11,14
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,72	21,37	15,87	11,85
15. Jasa Pendidikan	21,95	16,62	13,05	1,03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,95	11,84	10,95	2,60
17. Jasa lainnya	27,50	21,05	18,05	14,08
PDRB	14,23	12,24	6,12	5,97

Keterangan: \*\*) Angka Sementara, BPS  
 \*\*\*) Hasil Estimasi Bappeda

Perkembangan inflasi Kabupaten Tangerang selama tahun 2010-2014 cenderung berfluktuasi. Kenaikkan inflasi Kabupaten Tangerang yang terjadi pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kenaikan beberapa harga bahan makanan, transportasi dan komunikasi, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Selain itu, kenaikan tarif dasar harga listrik juga berpengaruh tidak langsung terhadap kenaikan inflasi tersebut. Pengaruh tidak langsung kenaikan tarif dasar listrik melalui penambahan biaya produksi barang/jasa menyebabkan kenaikan harga barang/jasa di level konsumsi yang kemudian menjadi faktor pendorong kenaikan inflasi.

Pada aspek inflasi, tingkat inflasi Kabupaten Tangerang tahun 2014 sebesar 10,37 persen kemudian mengalami penurunan tahun 2015 mencapai 4,68 persen. Inflasi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga komponen Bahan Bakar Minyak (BBM) dan stabilnya harga pangan juga memberikan andil inflasi yang sangat signifikan.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

#### 3.1.2.1 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2016

Beberapa faktor risiko yang mengemuka seperti kenaikan biaya produksi barang akibat berlanjutnya pelemahan rupiah, para pelaku usaha diperkirakan mulai mentransmisikan kenaikan biaya produksi pada harga jual pada awal tahun. Kenaikan harga jual barang diperkirakan terutama pada harga pada komoditas dengan kandungan impor tinggi seperti otomotif, elektronik dan obat-obatan.

Prospek perekonomian daerah 2016 menghadapi beberapa tantangan utama yang diperkirakan turut menentukan kinerja ekonomi dan inflasi ke depan. *Pertama*, ketidakpastian ekonomi global, dengan indikasi perlambatan ekonomi Cina yang akan terus berlanjut, dan penurunan harga komoditas (ketergantungan ekspor komoditas masih tinggi). Selain itu, spekulasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang dapat mengguncang nilai tukar. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada tertahannya kinerja ekspor dari berbagai daerah dan mengganggu kegiatan investasi daerah.

*Kedua*, stabilitas perekonomian yang semu dan lonjakan harga saham. Inflasi rendah Januari-Oktober 2015 bukan berita bagus karena daya beli masyarakat yang anjlok (setelah dua tahun berturut-turut menderita inflasi tinggi). Begitu pula tingginya inflasi bahan makanan yang Agustus 2015 lalu mencapai 9,26 persen (yoy). Rendahnya daya beli masyarakat tersebut berefek pada rendahnya konsumsi rumah tangga.

*Ketiga*, menurunnya produktivitas nasional. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 lalu dapat tumbuh 4,75 persen, namun pertumbuhan sektor *tradable* tidak berkembang dan kurang berkontribusi menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sektor jasa yang tumbuh tinggi. Hal ini dapat meningkatkan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Karena, lemahnya sektor manufaktur (utamanya) berdampak pada tingginya pengangguran. Tantangan masyarakat ekonomi ASEAN perlu mendapatkan perhatian, pemerintah harus berbenah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja mampu menarik investasi asing.

*Keempat*, tantangan dari kebijakan terkait anggaran. Keterlambatan dan rendahnya penyerapan anggaran dan belanja pemerintah dapat melemahkan momentum pertumbuhan. Sementara keberpihakan anggaran terhadap konsumsi domestik sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diwakili oleh kesejahteraan rumah tangga. Sementara itu, tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan dalam setiap survei, termasuk Susenas, adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Tabel 3.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Perbulan, Tahun 2011-2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<300.000	13.39	7.69	4.76	12.88	15.88	13.22
300.000-399.999	19.21	13.47	12.38	15.26	19.05	20.87
400.000-499.999	14.17	15.02	17.17	23.90	16.59	17.75
500.000-649.999	16.49	19.81	18.74	21.82	18.93	20.17
650.000-799.999	12.29	13.47	13.42	14.44	15.58	13.89
800.000-999.999	9.59	9.76	11.11	4.36	6.43	8.01
1.000.000-1.499.999	10.71	14.87	13.14	2.09	2.18	3.11
>=1.500.000	4.14	5.92	9.30	5.24	5.36	2.98
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Olah Data Susenas, BPS

Keterangan: \*) Hasil Estimasi Bappeda

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2011-2016 berada di kelompok golongan pengeluaran Rp. 500.000,- – Rp. 650.000,-. Sementara itu penduduk dengan pengeluaran kurang dari Rp. 300.000,- perkapita perbulan cenderung mengalami penurunan persentasenya.

Tabel 3.5 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2016

Tahun	Kelompok Pengeluaran (%)	
	Pangan	Non Pangan
(1)	(2)	(3)
2011	47.80	52.20
2012	53.13	46.87
2013	54.27	45.73
2014	51.65	48.35
2015 *)	49.45	50.55
2016 *)	46.22	54.84

Sumber: Hasil Olah Data Susenas, BPS

Keterangan: \*) Hasil Estimasi Bappeda



Hukum ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi pula persentase atau porsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk barang non pangan sehingga semakin rendah persentase pengeluaran untuk pangan. Data mengenai distribusi rata-rata pengeluaran rumah tangga menurut kelompok pengeluaran yang disajikan pada Tabel 3.5. menunjukkan keadaan tersebut. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan tahun 2012 hingga 2014 masih dominan, namun dominasi pengeluaran konsumsi ini berubah pada tahun 2015 dan 2016 yang bergeser ke non pangan. Pada tahun 2015 dan 2016, sebanyak 49,45% dan 46,22% pengeluaran rumah tangga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan non pangan meskipun perbandingan persentasenya relatif hampir berimbang, hal ini sejalan dengan kecenderungan perbaikan kondisi ekonomi. Pada tahun 2016 diperkirakan 54,84% pengeluaran rumah tangga digunakan untuk konsumsi kebutuhan non pangan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Tangerang terutama penduduk di perdesaan. Pola konsumsi sebagian besar penduduk perdesaan dengan sendirinya akan mulai bergeser ke arah pola konsumsi penduduk perkotaan.

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016

	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	3.71	4.37	10.8	10.81	4.21	6.49

Sumber: Estimasi Bappeda

Pada aspek inflasi, tingkat inflasi Kabupaten Tangerang tahun 2014 sebesar 10,81 persen kemudian mengalami penurunan tahun 2015 mencapai 4,21 persen. Inflasi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga komponen Bahan Bakar Minyak (BBM) dan stabilnya harga pangan juga memberikan andil inflasi yang sangat signifikan. Sementara itu, diperkirakan terjadi stabilisasi harga komoditas di Kabupaten Tangerang sehingga tahun 2016 (6.49%).

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan

kondisi dimana beberapa penduduk yang tinggal di satu wilayah dengannya ternyata masih hidup dalam kesengsaraan akibat kemiskinan yang dialami mereka. Mungkin karena alasan itulah mengapa setiap agama menekankan pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan dan juga merupakan salah satu alasan mengapa bantuan internasional untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut dimana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan (GK). Rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin apabila pengeluaran perkapita perbulannya tidak melebihi garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung setiap tahun untuk setiap kabupaten/kota. GK terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

Tabel 3.7. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan	
		Jumlah (000)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	290,423	188.70	6.42
2012	311,141	176.00	5.71
2013	335,291	183.90	5.78
2014	351,789	173.10	5.26
2015 *)	392,786	189.10	5.61
2016 *)	412,609	202.60	5.86

Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS  
Keterangan: \*) Hasil Estimasi Bappeda

Tabel 3.7. di atas memperlihatkan garis kemiskinan penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 sebesar Rp. 311.141,- perkapita perbulan, Rp. 335.291,- di tahun 2013 dan diperkirakan di tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 351.789,- perkapita perbulan. Diperkirakan besarnya garis kemiskinan Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar Rp. 392.786,- dan Rp. 412.609,-.

Tabel di atas memperlihatkan adanya persentase yang penduduk miskin yang cenderung meningkat, pada tahun 2014 sebesar 5,26 persen naik hingga 5,61 persen di tahun 2015 dan diperkirakan meningkat lagi menjadi 5,86 persen di tahun 2016. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan

pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar-masuk menjadi miskin.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kemiskinan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan perekonomian baik skala makro maupun mikro. Bagi suatu wilayah setingkat kabupaten/kota biasanya perkembangan ekonomi diukur dari naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun. Makin besar pertumbuhan PDRB-nya maka diasumsikan makin baik pula perkembangan ekonominya yang tentunya akan berdampak pada makin sejahteranya masyarakat, dengan catatan bahwa distribusi pendapatan tersebut terbagi merata.

Namun Pada kondisi tertentu peningkatan PDRB tidak berkorelasi dengan penurunan atau kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebenarnya masalah yang mendasar bukan bagaimana meningkatkan PDRB, tetapi lebih kepada siapa yang menumbuhkan/meningkatkan PDRB, sebagian besar masyarakat atau hanya beberapa gelintir saja. Jika yang berperan menumbuhkan PDRB hanya penduduk kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan itupun hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, sehingga kemiskinan maupun ketimpangan semakin parah. Lain halnya jika pertumbuhan itu dihasilkan oleh penduduk dalam jumlah yang banyak, maka mereka pulalah yang memperoleh manfaat terbesarnya dan buah dari pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata.

Kalau kita perhatikan angka gini rasio pada Tabel 3.8. pada tahun 2014 dengan nilai 0.37 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tangerang berada pada ketimpangan sedang tetapi perlu diwaspadai karena diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun setelahnya, dengan kata lain adanya ketimpangan yang semakin melebar.

Tabel 3.8. Pendapatan Penduduk 40% Terendah dan Gini Ratio di Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016

Tahun	Gini Rasio	Persentase Pendapatan Penduduk 40% Terrendah
(1)	(2)	(3)
2011	0.37	19.05
2012	0.32	22.42
2013	0.34	20.93
2014	0.37	19.60
2015 *)	0.38	19.42
2016 *)	0.35	19.93

Sumber: Hasil Olahan Susenas, BPS

Keterangan: \*) Hasil Estimasi Bappeda

Pola distribusi pendapatan yang didasarkan pada hasil penghitungan Gini Ratio akan menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk secara umum. Apakah merata miskin atau merata menengah? Berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok penduduk berpendapatan rendah/miskin? Gini Ratio tidak dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, Gini Ratio perlu disandingkan dengan indikator lain untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality*. *Relative inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai kelas atau kelompok masyarakat. *Relative inequality* dan *absolute poverty* merupakan dua aspek kembar keadilan dalam proses pemerataan pembangunan atau pemerataan pendapatan nasional/daerah.

Tabel 3.8. di atas tersebut juga memperlihatkan bahwa diperkirakan 20,93 persen produk/pendapatan domestik pada tahun 2013 dinikmati kelompok 40 persen rendah, mengalami penurunan setelah pada tahun sebelumnya kelompok tersebut menikmati 22,42 persen pendapatan domestik pada tahun 2012. Sementara itu tahun 2014 terjadi penurunan hingga mencapai 19,60% sehingga pada tahun tersebut hanya 19,60 persen pendapatan domestik yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kondisi ini diperkirakan belum membaik, sehingga diperkirakan pada tahun 2015 dan 2016 akan kembali menurun mencapai 19,42% dan 19,93%. Menurut kriteria Bank Dunia tersebut Kabupaten Tangerang berada pada level ketimpangan yang lunak.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja diperlukan

sebagai penggerak perekonomian. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produktivitas dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan produktivitas ini akan mendorong peningkatan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, perluasan kesempatan harus diupayakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan informasi mengenai situasi ketenagakerjaan.

Berbagai permasalahan ketenagakerjaan secara nasional masih sering timbul diantaranya tingginya jumlah pengangguran terbuka, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, upah yang tidak layak, kesejahteraan buruh yang tidak diperhatikan, kesejahteraan sosial, persoalan buruh wanita, persoalan pekerja di bawah umur (anak), minimnya perlindungan hukum, semakin meningkatnya pengangguran intelektual, persoalan buruh kontrak dan persoalan yang muncul akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, yang menjadi permasalahan utama dari ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan. BPS menggunakan konsep penganggur yang merujuk pada International Labor Organization (ILO), dimana seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena alasan 'ekonomis' (merasa tidak akan memperolehnya atau sudah memiliki pekerjaan/usaha tetapi belum mulai) dikategorikan sebagai penganggur. Sebagai catatan tambahan, kategori penganggur dan kategori bekerja termasuk dalam angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka menunjukkan proporsi penganggur terhadap angkatan kerja, sedangkan angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap usia kerja.

Salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah adalah mengatasi kelebihan penawaran (*over supply*) tenaga kerja. Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja/lapangan usaha. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung (*direct investment*) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan.

Tabel 3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016

Tahun	TPAK (%)	TPT (%)		
		Kab. Tangerang	Banten	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	69.46	14.4	13.1	6.6
2012	63.59	11.5	10.1	6.1
2013	64.88	11.9	9.9	6.3
2014	62.70	8.5	9.1	5.9
2015 *)	63.55	10.1	9.5	6.2
2016 *)	62.34	11.2		

Sumber: Berita Resmi, BPS

Keterangan: \*) Hasil Estimasi Bappeda

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angka ini merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Tabel 3.9. Di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang diperkirakan mencapai 63,55 persen. Artinya setiap 100 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (usia kerja), terdapat 64 orang yang termasuk dalam bursa tenaga kerja (angkatan kerja) dan 36 orang lainnya tidak (bukan angkatan kerja). Penawaran (supply) yang besar ini jika tidak diimbangi dengan permintaan yang besar pula dapat mengakibatkan keresahan akibat tingginya pengangguran terbuka.

Angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang menggambarkan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 89,9 persen, artinya setiap 100 orang yang masuk bursa tenaga kerja (penduduk angkatan kerja), terdapat 90 orang yang bekerja sedangkan sisanya 10 orang tidak terserap (penganggur). Dengan kata lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 adalah 10,1 persen.

Laporan pembangunan manusia yang dikedepankan secara luas oleh UNDP merupakan suatu model pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan (*people centered development*). Pembangunan harus ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choice*) melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar

manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Namun demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia saja, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan segala aspek tersebut.

Pendekatan konseptual pembangunan manusia mencakup empat elemen pokok yaitu; *produktifitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat*. Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat, berpangetahuan (serta menguasai IPTEK) dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (berdaya beli) dimiliki oleh penduduk. Produktivitas berarti manusia harus dapat meningkatkan produktivitasnya dalam artian ekonomi, yaitu untuk memperoleh pendapatan dan berpartisipasi dalam pasar kerja. Pemerataan berarti semua mempunyai kesempatan yang sama berpartisipasi dalam seluruh kegiatan, termasuk ekonomi, sosial dan politik. Makna berkelanjutan adalah bahwa semua kegiatan dalam rangka pembangunan manusia dilakukan terus menerus, sedangkan pemberdayaan berarti semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Sehingga pada akhirnya, sasaran pembangunan manusia diprioritaskan pada tiga tujuan dasar, yaitu: 1. Usia hidup (*longevity*) 2. Pengetahuan (*knowledge*), dan 3. Standar hidup Layak (*decent living*).

Pembangunan manusia sebagai mana direfleksikan dalam IPM merupakan isu strategis karena relevansinya terhadap sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Manusia Indonesia yang berkualitas memiliki tiga ciri: *pertama*, sehat dan berumur panjang, *kedua* cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa pada tuhan YME dan *ketiga* mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Ketiga ciri manusia Indonesia yang berkualitas tersebut, terkait erat dengan ketiga parameter dalam IPM

Selama bertahun-tahun, laporan pembangunan manusia (*Human development reports/ HDR*) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia. Meskipun demikian, masih terdapat banyak kesulitan dalam penyederhanaan konsep pembangunan manusia menjadi sebuah angka yang mewakili ukuran keberhasilan pembangunan manusia. Oleh karenanya, penting disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Untuk menghasilkan suatu ukuran yang komprehensif sangat sukar karena adanya dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur. Namun demikian, suatu ukuran komposit dari pembangunan manusia dapat menarik perhatian terhadap suatu isu, bila dilengkapi dengan analisa untuk menangkap dimensi penting lainnya yang tidak dapat diukur dengan mudah. Laporan IPM pertama (1990) disusun dari perpaduan Pendapatan Nasional sebagai pendekatan dari standar hidup layak. Dan dua indikator sosial yaitu angka harapan hidup (ukuran dari lamanya hidup). angka harapan sekolah dan rata - rata lama sekolah kedalam komponen pengetahuan. Perbaikan lain yang dilakukan adalah pada komponen standar hidup layak. Pada HDR pertama menggunakan PDB riil perkapita yang disesuaikan. Pada tahun 1991 dilakukan pembobotan berdasarkan hukum peningkatan manfaat (*The Law of Deminishing Returns*), dengan memberi bobot lebih rendah secara progresif untuk pendapatan yang berada diatas suatu batas tertentu. Sampai dengan tahun 1993 batas garis kemiskinan diambil dari garis kemiskinan berdasarkan pendapatan di negara-negara maju, dengan nilai yang diperbaharui dan diubah menjadi paritas daya beli (*purchasing power parity - PPP*) dalam mata uang dolar. Mulai tahun 1994, nilai yang digunakan diambil dari rata-rata dunia dari nilai PDRB riil perkapita dalam PPP \$ pada tahun yang bersangkutan.

Pada tahun 1996, untuk pertama kalinya laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang mencakup daerah provinsi/kabupaten/kota mulai dipublikasikan. Laporan tersebut berisi perbandingan IPM antar daerah di Indonesia periode tahun 1990 dan 1993. Angka yang dipublikasikan sebagian besar berasal dari hasil Susenas. Karena Susenas mulai diadakan pada tahun 1990, Indeks sebelum tahun 1990 tidak dapat dihitung. Untuk publikasi pertama ini, terfokus pada IPM dan belum menyajikan indeks-indeks lainnya pada dasarnya metode yang



digunakan mengikuti metode *United Nation Development Programe (UNDP)*. Namun demikian dalam konteks lokal dilakukan beberapa perubahan, khususnya dalam penghitungan standar kehidupan. UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang disesuaikan sesuai proksi pendapatan dalam penghitungan IPM global sementara untuk Indonesia dimodifikasi menjadi pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, setelah itu untuk tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, sudah disempurnakan beberapa penghitungan untuk mendapatkan angka IPM. Sedapat mungkin perhitungan statistik dalam laporan ini mengikuti metode yang digunakan UNDP. Meskipun demikian, karena faktor ketersediaan data dan alasan-alasan substantif lainnya, masih dilakukan beberapa modifikasi dari metode yang digunakan dalam HDR global, seperti pada ulasan mengenai PDB riil yang disesuaikan yang dimodifikasi menjadi pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 3.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang, Tahun 2011-2016

Komponen IPM	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015 *)	2016 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup (tahun)	68.86	68.92	68.96	68.98	69.04	69.09
<i>Indeks AHH</i>	<b>75.17</b>	<b>75.26</b>	<b>75.32</b>	<b>75.35</b>	<b>75.45</b>	<b>75.52</b>
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10.99	11.18	11.44	11.65	11.83	12.02
<i>Indeks Ekpektasi</i>	<b>61.06</b>	<b>62.11</b>	<b>63.56</b>	<b>64.72</b>	<b>65.72</b>	<b>66.78</b>
Lama Sekolah (tahun)	7.96	8.07	8.18	8.20	8.29	8.38
<i>Indeks</i>	<b>53.07</b>	<b>53.80</b>	<b>54.53</b>	<b>54.67</b>	<b>55.27</b>	<b>55.87</b>
<i>Indeks Pendidikan</i>	<b>57.06</b>	<b>57.96</b>	<b>59.04</b>	<b>59.69</b>	<b>60.49</b>	<b>61.32</b>
Paritas Daya Beli (000)	11,631	11,640	11,648	11,666	11,672	11,684
<i>Indeks Daya Beli</i>	<b>74.75</b>	<b>74.78</b>	<b>74.80</b>	<b>74.84</b>	<b>74.86</b>	<b>74.89</b>
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>68.44</b>	<b>68.84</b>	<b>69.29</b>	<b>69.57</b>	<b>69.91</b>	<b>70.26</b>

Sumber: Hasil Olah Data Susenas, BPS

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang yang terlihat dari table 3.10. di atas terus meningkat yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi angka IPM berarti kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut semakin meningkat. Pada tahun 2014 IPM Kabupaten Tangerang mencapai level 69,57 yang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2015 diperkirakan IPM Kabupaten Tangerang akan mencapai 69,91.

### 3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah

Pengaruh perekonomian nasional, yang didalamnya telah mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat nasional dan internasional, memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian Kabupaten Tangerang secara keseluruhan. Dengan demikian, berbagai skenario tentang perkiraan kenaikan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akan senantiasa menjadi referensi utama dalam memperkirakan kondisi perekonomian Kabupaten Tangerang.

Prospek ekonomi daerah pada tahun 2016 diperkirakan akan didukung oleh mulai menguatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi global. Kondisi ini akan berdampak positif bagi perkembangan kinerja ekspor daerah, khususnya untuk komoditas manufaktur..

Selain ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2016 juga didukung oleh meningkatnya permintaan domestik khususnya konsumsi. Hal ini didorong antara lain oleh belanja pemerintah daerah termasuk belanja pemerintah desa terkait dana desa, perbaikan pendapatan terkait UMP, pemulihan kinerja ekspor manufaktur, serta membaiknya harga komoditas ekspor di pasar global. Intensitas konsumsi domestik diperkirakan berdampak pada kenaikan belanja barang dan jasa.

Namun sikap pelaku usaha yang terindikasi masih bersikap hati-hati dalam melakukan realisasi investasi pada tahun 2016 menyebabkan akselerasi kegiatan investasi diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 diperkirakan mencapai level 5,9% dan 6,00%.

Hasil penghitungan PDRB tersebut yang di dasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (*current price*) yang merupakan penjumlahan nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Dan PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*) yang merupakan penjumlahan barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar 2010) dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11

Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku dan  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2017

Sektor/Lapangan Usaha	adhb (juta rupiah)		adhk (juta rupiah)	
	2016 ***)	2017 ***)	2016 ***)	2017 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,766,038	8,616,292	5,041,516	5,283,225
2. Pertambangan dan Penggalian	56,721	63,271	33,601	33,633
3. Industri Pengolahan	41,108,551	43,911,778	32,218,655	32,858,459
4. Pengadaan Listrik dan Gas	9,061,458	12,224,254	1,909,633	1,971,415
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	97,111	127,536	68,811	74,820
6. Konstruksi	16,268,891	19,075,646	10,954,533	12,104,437
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,401,204	13,842,155	9,925,063	10,714,184
8. Transportasi dan Pergudangan	3,456,566	3,964,477	2,504,658	2,837,552
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,637,254	1,741,318	1,215,024	1,292,866
10. Informasi dan Komunikasi	4,274,467	4,996,213	4,522,448	5,202,034
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,698,292	6,502,752	3,537,129	3,854,168
12. Real Estat	7,038,607	7,610,218	6,272,358	6,741,743
13. Jasa Perusahaan	1,134,435	1,266,909	876,712	980,969
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,135,501	2,524,642	1,329,927	1,487,470
15. Jasa Pendidikan	3,257,495	3,828,741	1,917,571	2,239,992
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	466,324	535,526	333,913	383,675
17. Jasa lainnya	2,089,375	2,469,243	1,341,749	1,513,680
PDRB	117,948,290	133,300,971	84,003,301	89,574,323

Keterangan: \*\*\*) Hasil Estimasi Bappeda

Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dari kegiatan produksi barang dan jasa tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Tangerang diperkirakan adalah masing-masing sebesar Rp. 117.948,3 miliar dan Rp. 133.301,0 miliar.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berasal dari nilai total produksi barang dan jasa tahun 2016 dan 2017 dikalikan dengan harga dasar tahun 2010 diperkirakan adalah masing-masing sebesar Rp. 84.003,3 miliar dan Rp. 89.574,3 miliar. Jika dilihat lebih lanjut, PDRB Kabupaten Tangerang berdasarkan harga konstan setelah mengalami tekanan pada tahun 2015 lalu, kini telah kembali meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,12% di tahun 2016 dan 6,63% pada tahun 2017.

Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB adhk, sektor Industri pengolahan, sektor Kontruksi serta sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan tiga penyumbang terbesar terhadap PDRB 2016, yaitu sebesar 38,35%, 13,04% dan 11,82%. Walaupun demikian, kecenderungan sektor Industri pengolahan terlihat semakin menurun, sedangkan dua sektor lainnya tersebut semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sektor usaha tersebut berpotensi sebagai

lapangan usaha yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar di samping sektor di bidang Industri pengolahan.

Gambaran secara umum perkembangan kontribusi sector-sector ekonomi (PDRB) Kabupaten Tangerang tahun 2016–2017, dapat dilihat pada Tabel 3.12. berikut :

Tabel 3.12  
Perkembangan Kontribusi Sektor-sector PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2017

Sektor/Lapangan Usaha	adhb (%)		adhk (%)	
	2016 ***)	2017 ***)	2016 ***)	2017 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.58	6.46	6.00	5.90
2. Pertambangan dan Penggalian	0.05	0.05	0.04	0.04
3. Industri Pengolahan	34.85	32.94	38.35	36.68
4. Pengadaan Listrik dan Gas	7.68	9.17	2.27	2.20
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.10	0.08	0.08
6. Konstruksi	13.79	14.31	13.04	13.51
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.51	10.38	11.82	11.96
8. Transportasi dan Pergudangan	2.93	2.97	2.98	3.17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.39	1.31	1.45	1.44
10. Informasi dan Komunikasi	3.62	3.75	5.38	5.81
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.83	4.88	4.21	4.30
12. Real Estat	5.97	5.71	7.47	7.53
13. Jasa Perusahaan	0.96	0.95	1.04	1.10
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.81	1.89	1.58	1.66
15. Jasa Pendidikan	2.76	2.87	2.28	2.50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.40	0.40	0.40	0.43
17. Jasa lainnya	1.77	1.85	1.60	1.69
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: \*\*\*) Hasil Estimasi Bappeda

Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang 2016 secara signifikan dialami oleh kelompok Jasa (sektor ke-13 sampai dengan sektor ke-17) yang seluruhnya tumbuh di atas 10%. Selain sektor-sektor tersebut sektor lain yang juga tumbuh tinggi adalah sektor Informasi dan komunikasi (14,13%), sektor Kontruksi (13,40%), dan sektor Transportasi dan Pergudangan (10,75%). Besarnya minat investor pada sektor-sektor tersebut dan harapan perbaikan daya beli telah mendorong LPE Kabupaten Tangerang tahun 2016 di atas level 6%. Tren pembelian barang tahan lama terutama di sektor Informasi dan komunikasi, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perumahan-perumahan baru, turut memberi andil pada meningkatnya LPE tersebut. Prakiraan LPE pada tahun 2016-2017 dapat digambarkan dalam Tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)

Sektor/Lapangan Usaha	adhb (%)		adhk (%)	
	2016 ***)	2017 ***)	2016 ***)	2017 ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.12	10.95	5.35	4.79
2. Pertambangan dan Penggalian	11.77	11.55	1.00	0.10
3. Industri Pengolahan	6.02	6.82	1.29	1.99
4. Pengadaan Listrik dan Gas	34.60	34.90	4.30	3.24
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.17	31.33	8.65	8.73
6. Konstruksi	18.34	17.25	13.40	10.50
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.99	11.62	7.32	7.95
8. Transportasi dan Pergudangan	15.19	14.69	10.75	13.29
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.86	6.36	7.10	6.41
10. Informasi dan Komunikasi	17.56	16.89	14.13	15.03
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	14.87	14.12	4.92	8.96
12. Real Estat	8.95	8.12	5.87	7.48
13. Jasa Perusahaan	11.61	11.68	11.68	11.89
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.61	18.22	13.45	11.85
15. Jasa Pendidikan	18.56	17.54	17.35	16.81
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.44	14.84	13.24	14.90
17. Jasa lainnya	19.42	18.18	13.28	12.81
PDRB	12.62	13.02	5,9	6.00

Keterangan: \*\*\*) Hasil Estimasi Bappeda

Prospek perekonomian Kabupaten Tangerang secara makro dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 ditargetkan akan mencapai sekitar 6 persen
2. Perkiraan peningkatan pertumbuhan ini diperoleh dengan asumsi sektor utama yang akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Tangerang yaitu industry pengolahan yang diprediksi akan banyak investor asing masuk pada tahun 2017 dengan kebijakan diberlakukannya MEA
3. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan pada tahun 2017 ditargetkan sekitar 5,5 persen
4. Tingkat pengangguran pada tahun 2017 ditargetkan sekitar 10,5 persen.
5. Laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 7,08 persen

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah untuk menentukan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada dasarnya tidak ada perubahan atau disesuaikan dengan anggaran tahun berjalan karena belum ada ketentuan dari Kementerian Keuangan terkait jumlah dana tersebut yang akan di berikan ke Pemerintah Daerah. Sementara untuk PAD diproyeksikan dengan memperhatikan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan tren inflasi daerah. Analisa teknis untuk memproyeksikan dilakukan dengan analisa statistik Regresi Linear Berganda menggunakan angka PDRB, jumlah penduduk dan inflasi daerah sebagai data dasar perhitungan (variabel independen).

Baik Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara rinci dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan**  
**Kabupaten Tangerang Tahun 2014 s.d tahun 2018**

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>1.599.599.118.015</b>	<b>1.474.621.759.160</b>	<b>1.589.453.708.756</b>	<b>1.746.314.711.060</b>	<b>1.946.966.271.360</b>
1.1.1	Pajak daerah	1.015.714.352.255	1.171.263.354.585	978.386.750.000	1.087.919.290.822	1.212.921.217.337
1.1.2	Retribusi daerah	130.036.896.666	120.858.121.062	114.667.726.700	116.200.085.700	129.551.475.547
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	45.878.052.983	45.954.024.977	40.610.533.662	43.100.631.786	48.052.894.378
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	407.969.816.111	136.546.258.536	455.788.698.394	499.094.702.752	556.440.684.098
<b>1,2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.461.378.798.130</b>	<b>1.496.375.510.959</b>	<b>2.100.699.288.540</b>	<b>1.907.589.640.800</b>	<b>2.342.069.636.794</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	143.608.555.130	116.925.350.959	183.308.859.000	183.308.859.000	204.371.046.899
1.2.2	Dana alokasi umum	1.213.857.913.000	1.212.934.842.000	1.196.642.873.000	1.196.642.873.000	1.334.137.139.108
1.2.3	Dana alokasi khusus	103.912.330.000	91.387.270.000	551.987.742.540	358.878.094.800	615.411.134.158

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
1.2.4	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	75.128.048.000	168.759.814.000	168.759.814.000	188.150.316.629
<b>1,3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>660.679.576.318</b>	<b>881.463.614.777</b>	<b>513.320.629.627</b>	<b>484.186.542.597</b>	<b>539.819.576.341</b>
1.3.1	Hibah	8.000.000.000		0	0	0
1.3.2	Dana darurat	0		0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	418.787.203.318	460.419.744.527	474.531.062.627	484.186.542.597	539.819.576.341
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	225.371.373.000	304.041.731.000	38.789.567.000	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	8.521.000.000	117.002.139.250	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.721.657.492.463</b>	<b>3.852.460.884.896</b>	<b>4.203.473.626.923</b>	<b>4.138.090.894.457</b>	<b>4.828.855.484.495</b>



### *3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah*

#### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi Pendapatan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- 1) Pendapatan Asli Daerah dianggarkan dengan memperhatikan potensi daerah, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang
- 2) Dana Perimbangan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan kebijakan sebagai berikut :
  - a) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015 atau tahun anggaran sebelumnya
  - b) Dana Alokasi Umum penganggarnya didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016 sementara belum terbit Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan tentang penganggaran DAU untuk Pemerintah Daerah
  - c) Dana Alokasi Khusus penganggarnya didasarkan pada alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 sementara belum terbit Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan tentang penganggaran Khusus untuk Pemerintah Daerah

- d) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya penganggarnya didasarkan pada alokasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2016 sementara belum terbit Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan tentang penganggaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Pemerintah Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sementara belum terbit Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan tentang penganggaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Pemerintah Daerah. Namun untuk Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak dianggarkan karena belum ada penetapan Peraturan Gubernur terkait alokasi tersebut.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah dialokasikan diatas perlu upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan laba bersih BUMD dengan merstrukturisasi organisasinya dan mendorong penerapan Balanced Score Card Based Planning
2. Meningkatkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah dengan mengupdate NJOP menggunakan data primer dan data spasial
3. Mendukung penyelenggaraan MICE (meeting, insentive, conference, exhibition) oleh berbagai pihak di wilayah Kabupaten Tangerang dengan tujuan menarik investor dan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan

- penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
5. Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan pembuatan, evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut amanat peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
  6. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi
  7. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor

### **3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 pada prinsipnya memprioritaskan terlebih dahulu pos *belanja yang wajib dikeluarkan*, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

- a) Belanja Pegawai

- i. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD baik jabatan struktural maupun fungsional serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
  - ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017 apabila direncanakan akan ada penerimaan
  - iii. Tambahan Penghasilan PNSD dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD yang kriterianya sesuai dengan yang ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan kepala daerah
  - iv. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - v. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD
- b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- i. Belanja hibah dan bantuan sosial di alokasikan anggarannya setelah anggaran prioritas daerah (prioritas I dan prioritas II) terpenuhi dan minimal anggaran yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan terpenuhi seperti alokasi anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan
- ii. Belanja hibah diprioritaskan alokasinya untuk Belanja Hibah Kepada Pemerintah dan Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan seperti kepada lembaga atau organisasi vertikal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lembaga atau organisasi pengelola pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur perdesaan, lembaga atau organisasi atau kelompok masyarakat pengembangan kegiatan keagamaan. Sementara Belanja Hibah Kepada Masyarakat dialokasikan untuk kegiatan yang memerlukan dana pendampingan DDUB
  - iii. Belanja sosial di alokasikan untuk urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Sedangkan penerima bantuan sosial prioritaskan untuk lembaga, organisasi atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam urusan tersebut.
  - iv. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Sedangkan untuk hibah uang tetap dianggarkan pada belanja tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- c) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa di alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan proporsi anggaran 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa
- d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa di alokasikan untuk kegiatan prioritas desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
1. Peningkatan Kapasitas Desa Pembangunan
  2. Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
  3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sapsras ekonomi
  4. Pelestarian lingkungan hidup
  5. Peningkatan kapasitas masyarakat.
- e) Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung Tahun Anggaran 2017 dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan pelayanan, non pelayanan, urusan pilihan dan penunjang.
- b) Untuk kegiatan yang menunjang pada prioritas pembangunan daerah atau yang memiliki dampak dan manfaat terhadap masyarakat luas
- c) Untuk kegiatan dalam upaya pemenuhan target RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 dan Program Unggulan Kabupaten Tangerang yang masih belum tercapai atau masih perlu peningkatan
- d) Untuk program dan kegiatan yang dicanangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031
- e) Pelaksanaan program dan kegiatan baik oleh SKPD pada tingkat Kabupaten (Dinas/Badan/Kantor) dan tingkat Kecamatan (SKPD Kecamatan) harus memperhatikan Peraturan Bupati Tentang pelimpahan kewenangan dan peraturan tentang desa agar seluruh pelaksana pembangunan berkegiatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- f) Untuk mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g) Untuk menyelenggarakan sinkronisasi prioritas program dan kegiatan nasional dan Provinsi Banten
- h) Pendanaan kegiatan Common Goals Tematik Kewilayahan

- i) Mengutamakan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat kegiatan Tahun jamak (multiyears) dan endanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
- j) Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Kabupaten Tangerang secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang
- k) Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan : a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan. b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan. c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- l) Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli
- m) Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.



**Tabel 3.15****Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2014 s.d tahun 2018**

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
<b>2,1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
2.1.1	Belanja pegawai	<b>1.080.361.390.298</b>	<b>1.228.618.140.748</b>	<b>1.510.213.288.774</b>	<b>1.510.213.288.774</b>	<b>1.977.252.055.328</b>
2.1.2	Belanja bunga	0	-	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	-	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	110.164.906.835	75.846.343.200	52.030.000.000	152.030.000.000	169.498.247.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	11.870.635.000	12.574.200.000	32.109.000.000	32.109.000.000	35.798.324.100
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	23.486.217.305	43.722.179.068	72.247.162.591	80.548.361.573
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	60.990.883.066	144.350.135.846	225.033.209.353	261.682.506.760	291.749.826.787
2.1.8	Belanja tidak terduga	3.760.769.058	3.777.738.931	12.300.000.000	12.300.000.000	13.713.270.000
	<b>Total Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.267.148.584.257</b>	<b>1.488.652.776.030</b>	<b>1.875.407.677.195</b>	<b>2.040.581.958.125</b>	<b>2.568.560.084.788</b>

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
<b>2,2</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
2.2.1	Belanja pegawai	143.449.159.896,44	142.310.882.823	185.284.954.840	153.460.487.541	171.093.097.560
2.2.2	Belanja barang dan jasa	698.762.625.498,29	635.817.561.154	902.551.131.026	747.529.321.621	833.420.440.675
2.2.3	Belanja modal	1.403.418.122.089,27	1.544.314.008.810	1.812.713.741.653	1.571.519.127.170	1.673.869.361.472
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>2.245.629.907.484</b>	<b>2.322.442.452.787</b>	<b>2.900.549.827.519</b>	<b>2.472.508.936.332</b>	<b>2.678.382.899.707</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>3.512.778.491.741</b>	<b>3.811.095.228.817</b>	<b>4.775.957.504.714</b>	<b>4.513.090.894.457</b>	<b>5.246.942.984.495</b>

Dari total dana kapasitas riil dan pagu indikatif yang ada dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II seperti dibawah ini :

**Tabel 3.16 Prioritas Anggaran Belanja Daerah**

No	URAIAN	2017
		(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.790.872.071.832
II	Prioritas I	458.869.085.333
III	Prioritas II	1.135.563.986.499
IV	Prioritas III	196.439.000.000
	Surplus anggaran riil atau Berimbang	-

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a) Pencairan dana cadangan tidak dianggarkan karena belum ada rencana pembentukan Peraturan Daerah mengenai pencairan dana cadangan
  - b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan alokasi SiLPA tahun 2016 dan realisasi anggaran SiLPA Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan karena belum ada rencana pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah baik pada BUMD atau lembaga lainnya

**Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2014 s.d tahun 2018**

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
<b>3,1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	700.200.814.430	878.379.815.152	582.483.877.791	400.000.000.000	445.960.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0
	<b>Total Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>700.200.814.430</b>	<b>878.379.815.152</b>	<b>582.483.877.791</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>445.960.000.000</b>
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	30.700.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	25000000000	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman	0	0	0	0	0

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
	daerah					
	<b>Total Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>30.700.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Total Pembiayaan Netto</b>	<b>669.500.814.430</b>	<b>863.379.815.152</b>	<b>572.483.877.791</b>	<b>375.000.000.000</b>	<b>445.960.000.000</b>

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Tahun 2017 merupakan tahun ke- 5 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2018, dimana arah kebijakan pembangunannya adalah untuk Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pelayanan Dasar. Untuk itu prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 menitik beratkan kepada perekonomian dan peningkatan pelayanan dasar. Prioritas dan sasaran tersebut merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana dalam menyusun program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai urusan wajib dan pilihan yang selanjutnya dijabarkan pada bab V RKPD ini dengan lebih lengkap dengan pagu indikatif per SKPD sesuai dengan kemampuan fiskal Kabupaten Tangerang pada Tahun 2017.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Sasaran utama pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,50-6,12 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi 10,5 persen
3. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun mencapai 5.50 persen.
4. Laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 7,08 persen.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang dijabarkan dari visi Kabupaten Tangerang untuk: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” visi ini kemudian dituangkan dalam 5 (lima) misi yakni untuk :

1. Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat;
2. Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat;

3. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious;
4. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar serta keterpeliharaan lingkungan;
5. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional,berwibawa,transparan dan bertanggung jawab.

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan**

VISI "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS
1	Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	1) Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS
		2) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas
2	Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat	3) Meningkatkan pertumbuhan, daya saing dan peran ekonomi daerah dalam perekonomian regional untuk mendukung aktivitas ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah
		4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan
		5) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah
3	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;	6) Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama	Menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas
		7) Meningkatkan daya dukung iklim usaha dan investasi yang kondusif	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
4	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan	8) Meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian secara merata	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pengembangan pusat pertumbuhan dan integrasi sistem transportasi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS
	lingkungan;			
		9) Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan mengotimalkan keseimbangan ruang dan lingkungan	Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup
5	Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.	10) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

**Tabel 4.2**

**Hubungan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat</b>	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini	Peningkatan sarana pendukung PAUD
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan jenjang SD	Meningkatkan ruang kelas dan sarana prasarana pada tingkat SD
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan jenjang pendidikan SMP	Meningkatkan ruang kelas dan sarana prasarana pada tingkat SMP
	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin	Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	Mendorong tenaga pengajar agar melanjutkan jenjang studinya untuk pemenuhan standar kompetensi Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran	
	Mengembangkan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup	Mengembangkan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup	
	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan non formal		
	Meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah	Meningkatkan luas jangkauan layanan perpustakaan daerah dan penyediaan buku bacaan bagi masyarakat umum	
	Menciptakan lingkungan yang sehat	Promosi Kesehatan	
	Menekan penyebaran penyakit menular	Penanganan TBC BTA Positif	
	Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan	Pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan disertai dengan peningkatan gizi	
	Meningkatkan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit	
	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan	Menerapkan sistem jaminan menyeluruh bagi masyarakat miskin melalui pemberlakuan KARTU SEHAT	
	Meningkatkan sarana prasarana dan meningkatkan kemudahan pelayanan kesehatan yang terjangkau		Mengembangkan puskesmas rawat inap
			Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang memadai terutama di wilayah utara
	Meningkatkan Gizi Masyarakat	Pelayanan perbaikan gizi masyarakat	
	Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	Pelayanan kesehatan anak balita	
	Menciptakan keluarga berencana yang sehat	Pembinaan masyarakat dalam pelayanan KB	
	Meningkatkan lingkungan sehat	Penyediaan PSU yang layak	

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perumahan	Penyediaan air bersih bagi komunitas perumahan
	Meningkatkan akses sanitasi	Pembangunan sarana sanitasi sekolah (Sanisek)
		Pendampingan PHBS Sanisek
		Pembangunan Seribu Sanitasi (SERASI)
	Meningkatkan layanan air bersih	Pengawasan dan pengendalian terhadap industri dan non industri/komersial penghasil limbah cair, limbah padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan dan Kebisingan
		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
		Penyediaan SAB
		Pengadaan tanah untuk embung
		Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
	Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman	Meningkatkan kualitas pemukiman kumuh disertai dengan penyediaan PSU yang layak
Penyusunan database dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman		
<b>Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat</b>	Mendorong sektor keuangan dan pelaku usaha untuk membantu pengembangan produk-produk unggulan dan industri kreatif	Pembinaan dan fasilitasi untuk mendorong potensi ekspor dan optimalisasi pangsa pasar local sentra- sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi
	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Fasilitasi dan pembinaan bagi industri kecil dan menengah
	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri dan Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri
	Meningkatkan produksi pertanian	Fasilitasi peningkatan produksi pertanian

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Regulasi Pertanian Pangan Berkelanjutan
		Identifikasi revitalisasi kelembagaan petani dan sarana produksi pertanian
		Bantuan benih padi bersertifikat pada kawasan LP2B
		Bantuan pupuk organik pada kawasan LP2B
	Meningkatkan produksi peternakan	Fasilitasi peningkatan produksi peternakan
	Meningkatkan produktifitas budidaya air tawar dan air payau	Fasilitasi peningkatan produktivitas perikanan air tawar dan air payau
	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan peningkatan kualitas alat tangkap
	Gerakan membangun masyarakat pantai	Pembangunan infrastruktur dasar; penguatan ekonomi; pemberdayaan masyarakat pesisir
	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi;
	Meningkatkan kapasitas KUKM	Fasilitasi Kemitraan Investasi dan Usaha bagi UMKM Pemanfaatan Fasilitas Dana Pemerintah bagi KUMKM melalui UPDB
Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pengawasan terhadap barang beredar	
Mengembangkan destinasi pariwisata		Peyusunan Masterplan dan DED
		Penyediaan Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)
Mengembangkan komoditi icon daerah		Peningkatan promosi potensi wisata
		Pengembangan komoditi icon daerah Ayam Wareng
	Pengembangan komoditi icon daerah Rambutan Parakan	
Meningkatkan akses perdagangan		Revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Akselerasi pendapatan dadrah	Optimalisasi peningkatan Pendapatan Daerah Pembangunan UPTD Kemeterologian
	Meningkatkan pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Mengembangkan Desa Mandiri Tahan Pangan (Desa Mantap)	Tersedianya cadangan pangan desa 2,5 ton setara beras Penanganan Desa Rawan Pangan melalui pemberdayaan masyarakat kelompok tani Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	Penguatan kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat	Pembinaan lembaga kemasyarakatan perdesaan
	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Pembangunan a penyediaan sarana prasarana pendukung gedung BLKI
	Pemerataan kesempatan kerja dan fasilitasi hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
<b>Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius</b>	Mendorong anak didik pada untuk mempelajari baca Al-Qur'an	Menerapkan Baca Tulis Al Qur'an dalam jenjang pendidikan
	Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar umat beragama	Pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penangunan Kantor Bersama Bidang Keagamaan
	Meningkatkan kapasitas organisasi kepemudaan	Pembinaan pengurus kepemudaan
	Meningkatkan kesadaran berolah raga	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga
	Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga diseluruh wilayah kecamatan	Pembangunan sarana olahraga melalui pembangunan stadion mini dan Sport Center
	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Pembinaan generasi muda
	Meningkatkan keragaman budaya	Pengelolaan budaya masyarakat
	Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan	Pembangunan Pusat Seni Budaya
	Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pemberian layanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Peningkatan penanganan terhadap pelanggaran Perda
		Peningkatan cakupan wiayah yang tertangani Linmas
	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan waawasan kebangsaan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
<b>Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;</b>	Pengembangan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pengembangan produk unggulan	Penyusunan kebijakan investasi dan kemudahan dalam berinvestasi
		Pelaksanaan promosi investasi
	Meningkatkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	Pengembangan sistem integrasi spasial dalam perencanaan dan pengendalian ruang

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		Perencanaan ruang kawasan strategis Pusat Pemerintahan	
	Meningkatkan Pemanfaatan ruang yang konsisten	Pengembangan sistem pemanfaatan ruang	
	Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas		Peningkatan jalan strategis kabupaten dalam kondisi baik
			Peningkatan jalan non strategis kabupaten dalam kondisi baik
			Peningkatan jembatan dalam kondisi baik
			Peningkatan jalan baru dalam kondisi baik
			Peningkatan jalan desa dalam kondisi baik
			Penyediaan lahan untuk pembangunan jalan
	Penanggulangan Banjir	Pembangunan dan Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	
			Normalisasi saluran sungai
Normalisasi saluran pembuang			
Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam			Upaya peningkatan cadangan/resapan air tanah dengan adanya sumur resapan
			Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau			Peningkatan RTH
			Pengadaan tanah untuk lahan terbuka hijau
			Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga
Meningkatkan pengelolaan persampahan			Pengelolaan persampahan
			Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
			Penataan, penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk TPA Jatiwaringin
			Pengadaan Rambu Rute angkutan sampah
			Penyusunan Kajian Rambu rute angkutan sampah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan jalan			Pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
	Meningkatnya kewaspaan terhadap bencana	Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan pertamanan
		Pengelolaan persampahan
<b>Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab</b>	Meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian
		Pengembangan e Planning
	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah	Pembangunan gedung pemerintah
	Meningkatnya sarana informasi dan komunikasi	Pemerataan sarana informasi dan komunikasi
		Penyediaan jaringan komunikasi data di SKPD
	Meningkatkan kualitas pengawasan internal	Pengawasan internal dan berkala
		Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
	Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah
	Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Pengembangan sistem pengelolaan keuangan terintegrasi
		Tertib Administrasi Pengelolaan Asset Barang Daerah
Peningkatan layanan perijinan dan non perijinan melalui pengembangan sistem informasi	Penerapan dan Updating SIG pada Sistem Perijinan dan Non Perijinan Berbasis web	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Peningkatan pelayanan administrasi kecamatan
		Pembinaan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan tata laksana	Penataan kelembagaan perangkat daerah
	Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan	Penataan peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya penyebaran dan kualitas informasi dan media massa	Koordinasi dan Kerjasama informasi dan media massa
	Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta	Peningkatan kerjasama CSR dengan pihak swasta
	Meningkatkan pengelolaan tanah asset Pemerintah Daerah	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah asset Pemerintah Daerah
	Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatkan pelayanan kearsipan	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip
	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatkan pelayanan pemakaman	Pengelolaan areal pemakaman

#### 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tangerang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatan juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019
3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2017
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005- 2025
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012- 2017
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2017
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005- 2025
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2018
9. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut;
  - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015
  - Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015
  - Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya
  - Capaian Program Unggulan dan Program Prioritas SKPD
  - Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani

Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2018 sebagai berikut:

8. Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas
9. Pengembangan pusat pertumbuhan dan intergrasi sistem transportasi
10. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup
11. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah
12. Peningkatan Iklim Investasi dan Saing Daerah
13. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
14. Penanggulangan Kemiskinan

Secara substansial dari dasar filosofi pembangunan serta konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah secara prinsip mampu melandasi dan selaras dengan indikasi tema pembangunan Tahun 2017 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yaitu **“Penuntasan infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan daya saing daerah dan pematapan tata kelola pemerintahan”**.

Untuk dapat melihat keterkaitan antara prioritas RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2017 dengan prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2013-2018 serta sinergi dengan prioritas Provinsi Banten dan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sinergi Prioritas Pembangunan**

<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas RPJM Provinsi</b>	<b>RPJMD Kab Tangerang</b>	<b>Prioritas RKPD Kab Tangerang</b>
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Pengurangan Tingkat Pengangguran	Pengembangan Sistem Transportasi	Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas
Bidang Ekonomi	Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi dan Antisipasi Kerawanan Sosial	Penanggulangan Banjir, Rob dan Genangan	Pengembangan pusat pertumbuhan dan intergrasi sistem transportasi
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan dan Penguatan Logistik Pangan	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup
Bidang Sarana dan Prasarana	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Investasi dan Komoditas	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah

<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas RPJM Provinsi</b>	<b>RPJMD Kab Tangerang</b>	<b>Prioritas RKPD Kab Tangerang</b>
Bidang Politik	Peningkatan Konektivitas dan Daya Dukung Kawasan Pusat Pertumbuhan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Iklim Investasi dan Saing Daerah
Bidang Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Bidang Hukum dan Aparatur	Optimalisasi Infrastruktur Pelayanan Kesehatan dan Integrasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan	Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Wilayah dan Tata Ruang	Pengendalian Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana	Penanggulangan Kemiskinan	
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan	
	Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Banten	Peningkatan Iklim Investasi dan ekonomi daerah	
		Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		Peningkatan Moral dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	
		Pengendalian Kependudukan yang lebih serasi dan berimbang	

Prioritas Nasional	Prioritas RPJM Provinsi	RPJMD Kab Tangerang	Prioritas RKPD Kab Tangerang
		Peningkatan, Pemerataan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral	

**Tabel 4.4**  
**Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017**

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	46,74	Dinas Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,77	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83,48	Dinas Pendidikan
		Rasio Sekolah yang menerapkan Penambahan Kemampuan Baca/Tulis Al-Quran (muatan lokal) pada jenjang SD/SMP	85	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik SD/SMP yang berprestasi bidang sains, seni, dan olahraga tingkat Provinsi dan nasional	70	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sarana meubeler jenjang SD dan SMP	720	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	720	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	Tersedianya sarana sanitasi sekolah	230	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Tahun			
	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90	Dinas Pendidikan
		Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	5000	Dinas Pendidikan, Kecamatan
	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	97,8	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya keterampilan anak/pemuda putus sekolah	25	Kecamatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik yang memiliki kompetensi	75,9	Dinas Pendidikan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan	29	Dinas Pendidikan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	100	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	79	Dinas Kesehatan
		Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100	RSUD Tangerang
		Pendampingan PHBS Sanisek	250	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	70	Dinas Kesehatan, Kecamatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan Gizi	5,4	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan	71	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		jamban /wc sehat		
		Tercapainya Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	150	Dinas Kesehatan
		Seribu Sanitasi (SERASI)	1000	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tercapainya penemuan kasus Penyakit Menular	80%	Dinas Kesehatan
		Tercapainya prosentase kesembuhan Penyakit Menular	85%	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi	14	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	22	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Penambahan puskesmas rawat inap		Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B Pendidikan	1	RSUD Tangerang, Cipta Karya
		Pembangunan RSUD Pantura	Multiyears - Operasional	Dinas Kesehatan Cipta Karya
		Pemenuhan alat kesehatan sesuai dengan standar RS Kelas B Pendidikan	54	RSUD Tangerang



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terpenuhinya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan di TPM yang memenuhi syarat	79	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan umum (Penguatan Yankes Primer)	Meningkatnya Jumlah Puskesmas DTP	13	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya pelayanan Poned	35	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pola pengelolaan keuangan Puskesmas menjadi sistem pengelolaan BLUD	10	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya rujukan pasien yang terintegrasi dengan jejaring Rumah Sakit	20	Dinas Kesehatan
	Program Penyakit Tidak Menular	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan PTM	50	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Tumbuh Kembang Balita	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Balita	90	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia	90	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	RSUD Tangerang
		Prosentase tingkat hunian RS (BOR) RSU Tangerang	75	RSUD Tangerang
		Pemenuhan sarpras pelayanan terhadap standar	1	RSUD Tangerang

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		RS kelas B pendidikan		
		Pemenuhan alkes pelayanan standar kelas B pendidikan	54	RSUD Tangerang
		Prosentase masyarakat miskin yang dilayani (Kartu Sehat)	80	RSUD Tangerang
		Terselenggaranya pelayanan PONEK (Pediatric Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)		RSUD Tangerang
		a. Kematian Ibu Karena:		RSUD Tangerang
		Pendarahan	<1%	RSUD Tangerang
		Preeklamsia/Eklamsia	<30%	RSUD Tangerang
		b. Kematian Bayi Baru Lahir		RSUD Tangerang
		BBLR	<20%	RSUD Tangerang
		Asfiksia	<20%	RSUD Tangerang
		Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B	3	RSUD Balaraja, Cipta Karya
		Rasio Kelengkapan peralatan medik RSUD Balaraja sesuai Master Plan	85	RSUD Balaraja
		Prosentase tingkat hunian RS (BOR)	74	RSUD Balaraja
		Kepuasan pelanggan RS (Rata-rata dari semua pelayanan)	85	RSUD Balaraja
	Program Kemitraan pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	73	Dinas Kesehatan, Kecamatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	9	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		miskin		
		Meningkatnya prosentase MBR yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan)		Dinas Kesehatan
		Meningkatnya prosentase MBR yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan)	70	Dinas Kesehatan, Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi jalan strategis kabupaten dalam kondisi baik	5	Dinas Bina Marga
		Proporsi jalan non strategis kabupaten dalam kondisi baik	4,21	Dinas Bina Marga, Kecamatan
		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	2,62	Dinas Bina Marga, Kecamatan
		Proporsi jalan baru dalam kondisi baik	0	Dinas Bina Marga
		Proporsi jalan desa dalam kondisi baik	0	Dinas Bina Marga
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7	Dinas Bina Marga, Kecamatan
	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Pembangunan turap/talud/brojong	2	Dinas Bina Marga, Kecamatan
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	30	Dinas Bina Marga, Kecamatan
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,	Proporsi Sungai Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9,00%	Dinas Bina Marga

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	rawa dan jaringan pengairan lainnya			
		Proporsi Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik	9,00%	Dinas Bina Marga
		Proporsi Daerah Irigasi Kecil Dalam Kondisi Baik	12,00%	Dinas Bina Marga, Kecamatan
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	0	Dinas Bina Marga
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Proporsi jalan desa dalam kondisi baik	0	Dinas Bina Marga
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rasio lumpur tinja yang di tangani	6	DKP
	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Terlaksananya inspeksi jalan dan jembatan	1	Dinas Bina Marga, Kecamatan
	Program pembangunan sistem informasi/datab ase jalan dan jembatan	Tersedianya database jalan dan jembatan	1	Dinas Bina Marga, Kecamatan
Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten /Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital.	50	Dinas Tata Ruang
	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang	100	Dinas Tata Ruang

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100	Dinas Tata Ruang
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian luasan RTH publik di kawasan perumahan tertata Kabupaten Tangerang	70	Dinas Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Pengolahan Data dan Pengumpulan Data Perumahan dan permukiman	17	Dinas Cipta Karya
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Layanan air dalam tanah	45	Dinas Cipta Karya
		Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	2	Dinas Cipta Karya, Kecamatan
		Penyediaan SAB	10	Dinas Cipta Karya
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Fasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan P2WKSS	2	Dinas Cipta Karya
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	20	BPBD
	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio jumlah TPU yang sudah dikelola	7,5	KPD
	Program Pembangunan Gedung Pemerintahan	Pembangunan Gedung Pemerintahan	14	Dinas Cipta Karya, Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan	24	Dinas Cipta Karya
		Pembangunan Gedung BLKI	1	Dinas Cipta Karya
		Terbangunnya Pusat Seni Budaya	1	Dinas Cipta Karya
	Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan	Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan perdesaan	24	Dinas Cipta Karya, Kecamatan
	Program Penataan Lingkungan Permukiman Nelayan	Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan Nelayan	4	Dinas Cipta Karya, Kecamatan
	Program Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan	Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan perkotaan	1	Dinas Cipta Karya
	Program Pengawasan Gedung dan Bangunan	Rasio bangunan tidak BerIMB	500	Dinas Cipta Karya
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	7	Satpol pp, Kecamatan
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terpenuhinya upaya penanganan gangguan penyebaran penyakit masyarakat	1	Satpol pp
	Program Pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	75	Satpol pp
		Terkendalinya potensi gangguan ketertiban kota/kabupaten	925	Satpol pp
		Terkendalinya stabilitas ketertiban umum saat pemilu	29	Satpol pp

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Terpenuhinya pelaporan data dan informasi penegakan Perda	12	Satpol pp
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan	65	Kesbangpol
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan	29	Kecamatan
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan persentase konflik bermotif SARA	3	Kesbangpol
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terfasilitasinya upaya penanganan bencana alam	1	Satpol pp
		Peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap ketentuan Perda	5	Satpol pp
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terpenuhinya kompetensi aparat	500	Satpol pp, Kecamatan
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan pemahaman organisasi masyarakat, sosial, politik, yang mengikuti pembinaan politik	65	Kesbangpol
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Wilayah Rawan Byahencana	10	BPBD
Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Prosentase PMKS yang mendapatkan Pemberdayaan	18,52	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
		Prosentase Cakupan PKH	100	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS (lansia, korban eksploitasi, anak dan keluarga yang bermasalah sosial psikologis yang mendapat sosialisasi, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	16,66	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program pembinaan anak terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapat keterampilan praktis	12,5	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase penyandang cacat/disabilitas yang mendapat pembinaan, pelatihan dan fasilitasi alat bantu	17,3	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Tersedianya sarana prasarana panti dan kelengkapannya	90	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Pembangunan Panti Rehabilitasi	0	Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Cipta Karya
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan keterampilan praktis	13,84	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terbinanya PSKS dalam penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang	430	Dinas Kesejahteraan Sosial



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Program penyuluhan dan penanggulangan korban bencana alam	Terciptanya keserasian sosial bagi masyarakat di lokasi bencana	100	Dinas Kesejahteraan Sosial
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan	Terfasilitasi pembinaan bagi Aparatur Pemerintahan dan masyarakat	84	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan	1,3	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Terfasilitasinya bantuan bagi pemuka agama/ guru ngaji	3,48	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Terbinanya Pemulasara jenazah	116	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Terpenuhi Sarana prasarana dan petugas TMP,janda PKRI dan tersosialisasikan nya NK3	1/124	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tertib administrasi manajemen aset barang daerah	-	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Tertib administrasi pengelolaan SPPD pada SKPD	1	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Tertib administrasi bantuan Hibah dan Bansos	-	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terciptanya administrasi surat menyurat,dan Pelestarian dokumen/ Arsip	1100	Dinas Kesejahteraan Sosial
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis kompetensi	500	DISNAKER TRANS
		Tersedianya sarana prasarana pendukung BLKI	1	DISNAKER TRANS

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Pelatihan berbasis masyarakat	100	DISNAKER TRANS, Kecamatan
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pelatihan berbasis kewirausahaan	160	DISNAKER TRANS
		Peningkatan Kesempatan Kerja	5500	DISNAKER TRANS
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pemeriksaan perusahaan	0	DISNAKER TRANS
		Jumlah penanganan kasus/perselisihan ketenagakerjaan	200	DISNAKER TRANS
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	29	BPMP2D Kecamatan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan	100	BPMP2D Kecamatan
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan	100	BPMP2D
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Terlaksananya Kegiatan P2WKSS	2	BPMP2D Kecamatan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein per kapita	2400	DISTANAKKP
			63	DISTANAKKP
		Penguatan cadangan pangan	7	DISTANAKKP
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	7	DISTANAKKP

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	6	DISTANAKKP
		Pencapaian skor PPH	1	DISTANAKKP
		Pengawasan dan keamanan pangan segar	3	DISTANAKKP
		Penanganan Daerah rawan pangan	7	DISTANAKKP
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya lahan untuk kepentingan umum	7	Setda
		Tersedianya Dokumen Hasil survey Pengadaan Tanah	1	Setda
		Tersedianya Dokumen Hasil Penaksiran Harga Dasar Atas Tanah	1	Setda
Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup		Penataan, penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk TPA Jatiwaringin		Setda
		Penertiban Tanah Milik Daerah	150	Setda
Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio volume sampah yang di tangani	6	DKP, Kecamatan
		Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	5	DKP

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	5	BLHD
		Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan UKL/UPL	50	BLHD
		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan	25	BLHD
		Pemantauan Kualitas Air Bersih, Air Sungai/ Permukaan, Muara dan udara	29	BLHD
		Tercapainya Piagam Perhargaan kabupaten tangerang sebagai kota sehat atau mendapatkan Penghargaan Adipura	77	BLHD
		Tercapainya Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata / sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	9	BLHD
		Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, Sumber tidak bergerak ( udara ) dan Padat ( B3 )	30	BLHD

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga	200	BLHD
		Pengawasan dan pengendalian terhadap industri dan non industri/komersial penghasil limbah cair, limbah padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan dan Kebisingan	250	BLHD
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan rehabilitasi /Vegetasi tanaman mangrove Mangrove di pesisir Pantai	50000	BLHD
		Terlayannya masyarakat sulit air bersih melalui pendistribusian air bersih	300000	BLHD
		Upaya peningkatan cadangan / resapan air tanah	50	BLHD
		meningkatnya Monitoring terhadap Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (Biomassa )	100	BLHD
		Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	200	Disperindag
			3	Disperindag
		Jumlah kecamatan untuk mengidentifikasi karakteristik air tanah	5	Disperindag
		Jumlah perusahaan untuk meningkatkan Akurasi Penggunaan Air Bawah Tanah (AMR)		Disperindag

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Jumlah kecamatan untuk Perlindungan dan Konservasi SDA dengan adanya Pemantauan Air Tanah (GWLR)	20	Disperindag
Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menyediakan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	1	BLHD
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terwujudnya taman makam yang hijau	12	KPD
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2	BLHD
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio jumlah RTH	4	DKP, Kecamatan
	Program Pemakaman	Terpenuhinya dokumen Penyediaan dan penyerahan TPU		KPD
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	87	DISDUKCAPIL, Kecamatan
		Prosentase Penduduk ber KK	95	DISDUKCAPIL, Kecamatan
		Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	72	DISDUKCAPIL
		Kepemilikan Akte Non Kelahiran	1200	DISDUKCAPIL
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tersedianya Rumah Pemberdayaan	1	BPMP2D
		Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	8	BPMP2D
		Pengembangan Posyantek	7	BPMP2D
		Pengembangan Wartek	90	BPMP2D
		Jml Desa yang memiliki BUMDes	5	BPMP2D
Peningkatan Perekonomian	Program pengembangan	Pembangunan Pasar tradisional	1	DINAS CIPTA KARYA,

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	lembaga ekonomi pedesaan			DIPERINDAG
		Penyusunan DED Pasar Tradisional/ Kabupaten		DINAS CIPTA KARYA
		Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	2	Disperindag
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kel	100	BPMP2D
		Pelatihan Aparat dan Pemerintah Desa	2	BPMP2D
		Desa Yang memiliki Profil Desa	100	BPMP2D
		Desayang menyelenggarakan tata kelola Keuangan sesuai ketentuan perundangan	246	BPMP2D
	Program Keluarga Berencana	Meningkatkan capaian Peserta KB Aktif PA/PUS	67,54	BKKBD, Kecamatan
		Menurunnya presentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	14,66	BKKBD
		Pemberdayaan Keluarga Pra sejahtera	30	Kecamatan
Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya presentase PUS dengan istri berusia kurang dari 20 tahun	7,12	BKKBD
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terbinanya semua PKKBD dan subPKKBD yang ada di kabupaten Tangerang	274	BKKBD
			1943	BKKBD

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang dari tumbuh menjadi tegak	13	BKKBD
		Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang dari tegak menjadi tegar	19	BKKBD
	Program Pelayanan Keluarga Berencana ( Penduduk Tumbuh Seimbang)	Meningkatnya % jumlah anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang ber KB	84,97%	BKKBD
			100%	BKKBD
			100%	BKKBD
			100%	BKKBD
Pengembangan pusat pertumbuhan dan intergrasi sistem transportasi	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas data perencanaan di bidang perhubungan	6	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pengetahuan tentang kebijakan / aturan di bidang perhubungan	1	Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Memelihara sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	6	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas data angkutan	4	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kesadaran keselamatan berlalu lintas	4	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya sarana perlengkapan jalan dalam pelayanan transportasi	2	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Membangun sarana dan prasarana perhubungan	0	Dinas Perhubungan



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan jalan	4	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas	7	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pengetahuan, informasi dan koordinasi tentang keamanan dan keselamatan transportasi	6	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya sarana pendukung pengawasan dan pengaturan lalu lintas	0	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya komunikasi antar personil	32	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor laik jalan	3	Dinas Perhubungan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	20	DISKOMINFO
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	45	DISKOMINFO
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Implementasi dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Meningkatnya Pelayanan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui LPSE	4	DISKOMINFO
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Pelayanan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100	DISKOMINFO

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Melalui LPSE		
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	Meningkatnya pengembangan teknologi Informatika di Kabupaten Tangerang	36	DISKOMINFO
		Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informatika	15	DISKOMINFO
		Meningkatnya aplikasi/sistem informasi di Kabupaten Tangerang	1	DISKOMINFO
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program kerjasama informasi dan media massa	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tangerang melalui kerjasama informasi	10	DISKOMINFO
		Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media informasi	7	Setda
		Tersedianya Dokumen hasil dokumentasi kegiatan KDH/WKDH melalui peliputan kunjungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	16	Setda
		Tersedianya laporan Hasil jumpa pers dan kunjungan kerja wartawan	79	Setda
		Terlaksananya publikasi dan penyebarluasan informasi advetorial dan press release	250	Setda

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Tersedianya informasi pembangunan daerah melalui media massa	850	Setda
		Terlaksananya penerbitan tabloid swara tigaraksa dan penyediaan bahan bacaan	15.000	Setda
		Tersedianya DVD penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang	500	Setda
		Terpilihnya Pemenang Lomba	15	Setda
		Tersedianya alat-alat studio dan Komunikasi	8	Setda
		Terpublikasinya pembangunan daerah melalui press tour	10	Setda
		Tersedianya Hasil Dokumentasi Berupa Foto Pembangunan di Media Mass	25	Setda
		Tersedianya informasi pembangunan	64	Setiap SKPD
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya Laporan Pengawasan & Pengendalian Jasa Telekomunikasi	1	Setda
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Fasilitasi Pengembangan KUMKM	15	Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan
		Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan UMKM	100	Dinas Koperasi dan UKM
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi Kemitraan Investasi dan Usaha bagi KUMKM	30	Dinas Koperasi dan UKM

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Saing Daerah				
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemanfaatan Fasilitas Dana Pemerintah bagi KUMKM melalui UPDB	5000	Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan
		Promosi KUMKM	5	Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	4	Dinas Koperasi dan UKM
		Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	80	Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pelaksanaan Pameran Investasi	6	BPMPTSP
		Kerjasama Investasi Pemda	1	BPMPTSP
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mendukung Pengembangan Usaha	2	BPMPTSP
		Monev Investasi	2	BPMPTSP
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Kepemudaan	25	Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda	200	DISPORABUDPAR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Peningkatan penanggulangan bahaya narkoba serta virus HIV dan AIDS dikalangan generasi muda	1500	DISPORABUD PAR, Kecamatan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan keikutsertaan event tingkat nasional	15	DISPORABUDPAR
		Peningkatan peran aktiv masyarakat dalam kegiatan kebugaran olahraga	300	DISPORABUD PAR, Kecamatan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga	1	DISPORABUDPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Sport Centre dan kelengkapan venue	1	DISPORABUD PAR, DINAS CIPTA KARYA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya stadion mini	4	DISPORABUD PAR, DINAS CIPTA KARYA
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya data/informasi/statistik daerah	2	Bappeda
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasi peningkatan pengelolaan kekayaan budaya (penyusun naskah akademik kajian cagar budaya)	0	DISPORABUDPAR
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan gelar seni	2	DISPORABUDPAR

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Terlaksanannya Upacara Hari Besar Pemerintah	22	Setda
Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase luas jangkauan layanan perpustakaan	4	Perpusda
		Jumlah perpustakaan kelurahan yang tersedia	5	Perpusda
			3 layanan	Perpusda
		Penambahan koleksi bahan pustaka perpustakaan	12,024	Perpusda
			10.000 RFID, 1 unit security gate	Perpusda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	meningkatnya pengelolaan arsip In-aktif SKPD/ BUMD/ Lembaga di lingkungan pemerintah daerah	300.000	Kantor Arsip Daerah
			9	Kantor Arsip Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatnya efektivitas sumber daya aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan daerah	40	Kantor Arsip Daerah
			2	Kantor Arsip Daerah
			3.500	Kantor Arsip Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Entry data/dokumen Arsip	250.000	Kantor Arsip Daerah
		Alihmedia Arsip	450.000	Kantor Arsip Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya pemahaman, kemampuan dan kualitas pelayanan publik	100	Kantor Arsip Daerah
			1	Kantor Arsip Daerah
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pembangunan Desa Pesisir	9	DISKANLA, Kecamatan
	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pelestarian Sumberdaya Perikanan dan Pesisir	9	DISKANLA
	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	5	DISKANLA
		Produksi budidaya perikanan air payau	1,5	DISKANLA
		Pembinaan dan pengembangan perikanan	25	Kecamatan
	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	21000	DISKANLA
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat konsumsi ikan perkapita	31	DISKANLA
	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan			DISKANLA
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang	2	DISPORABUDPAR
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya masterplan Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)	0	DISPORABUDPAR

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Tersedianya Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)	0	DISPORABUDPAR
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Bertambahnya jumlah kelompok agribisnis	2	DISTANAKKP, Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Telaksananya Pameran Produksi Hasil Pertanian	2	DISTANAKKP
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)	46	DISTANAKKP
	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produktivitas Padi (Ton GKG/Ha)	6,1	DISTANAKKP
		Meningkatnya Indeks Penanaman	1,9	DISTANAKKP
		Produktivitas Bawang Merah	7,4	DISTANAKKP
		Produktivitas Jagung	3,4	DISTANAKKP
		Produktivitas Kacang Tanah	2,1	DISTANAKKP
		Produktivitas Cabai	1,61	DISTANAKKP
		Pengembangan komoditi icon daerah Rambutan Parakan	1000	DISTANAKKP
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penuluh	5	DISTANAKKP
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan pelayanan kesehatan hewan (Desa / Kelurahan)	44	DISTANAKKP
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatkan Produksi Peternakan	6	DISTANAKKP
		Peningkatan skala usaha	1	DISTANAKKP



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		kelompok		
		Pengembangan komoditi icon daerah Ayam Wareng	100	DISTANAKKP
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran ternak dan hasil produk peternakan	1	DISTANAKKP
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	peningkatan penerapan teknologi peternakan	1	DISTANAKKP
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program Peningkatan Kesehatan Masy. Veterinen	Meningkatnya mutu dan kesehatan produk asal hewan	60	DISTANAKKP
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pembinaan ketahanan pangan	25	Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	0	Disperindag
			0	Disperindag
			1	Disperindag
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Pemasangan PJU	500	DKP
		Jumlah Pemeliharaan PJU	866	DKP
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	12	Disperindag
			15	Disperindag

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
			320	Disperindag
			1	Disperindag
		Tersedianya dokumen data perusahaan	1	Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	180	Disperindag
			1	Disperindag
			25	Disperindag
			5	Disperindag
			1	Disperindag
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terpenuhinya peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	53 / 26	Disperindag
			80	Disperindag
				Disperindag
	Program Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan	1	Disperindag
			6	Disperindag
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	80 / 1	Disperindag, Kecamatan
				Disperindag
			1	Disperindag
			80	Disperindag
			20	Disperindag
				Disperindag
		Tersedianya dokumen data perusahaan	1	Kecamatan
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terpenuhinya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	120 / 3	Disperindag

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Konservasi Lingkungan Hidup	Program Transmigrasi Regional	Sosialisasi Transmigrasi	1	DISNAKER TRANS
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan data/informasi	Tersedianya Dokumen Data/Informasi Pembangunan	2	Bappeda
		Tersedianya Dokumen Pelaporan Pembangunan	3	Bappeda
	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya Jumlah kerjasama dengan pihak swasta	4	Bappeda
		Tersedianya Dokumen Kerjasama pembangunan	20	Setda
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Dokumen perencanaan pengembangan kawasan	2	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Tersedianya Dokumen perencanaan Kota-kota menengah dan besar	1	Bappeda
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya kompetensi aparatur perencana	150	Bappeda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	11	Bappeda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan ekonomi	3	Bappeda
	Program perencanaan sosial budaya	Tersedianya Dokumen perencanaan sosial dan budaya	5	Bappeda
	Program penelitian dan pengembangan	Tersedianya Dokumen penelitian dan	5	Bappeda

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		pengembangan		
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya pembinaan pegawai melalui pendidikan formal dan non formal	50	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Tersedianya naskah sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250	Setda
		terlaksananya dan terfasilitasinya kegiatan upacara hari besar nasional	10	Setda
		Tersedianya Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Lingkup Sekretariat Daerah	60	Setda
		Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah	50	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya perda	10	Setwan
		Meningkatnya koordinasi lembaga perwakilan rakyat	250	Setwan
		Meningkatnya kualitas SDM lembaga perwakilan rakyat	100	Setwan
		Terakomodirnya aspirasi masyarakat	3	Setwan
		Meningkatnya kapasitas penentu kebijakan	133	Setwan
		Meningkatnya publikasi lembaga perwakilan	110	Setwan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		rakyat		
		Meningkatnya kinerja lembaga perwakilan rakyat	2	Setwan
		Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja lembaga perwakilan rakyat	11	Setwan
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terevaluasinya kinerja anggaran Setwan dan DPRD	2	Setwan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan stock opname dan cash opname Kabupaten Tangerang	2	Inspektorat
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Yang Berstandar akuntansi Pemerintahan	3	BPKAD
		Penyusunan APBD Yang Tertib	10	BPKAD
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Terlaksananya Pembuatan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa yang sesuai perundang-undangan	100	BPMP2D
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	165	Inspektorat
		Jumlah tindak lanjut temuan hasil pengawasan	330	Inspektorat
		Jumlah laporan	2	Inspektorat

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		revisi LKIP dan LKD		
		Jumlah SKPD terkait revisi RKA	64	Inspektorat
		Jumlah frekuensi evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	4	Inspektorat
		Jumlah peserta diklat peningkatan koordinasi dan kompetensi aparatur	0	Inspektorat
		Jumlah laporan hasil pengawasan kasus	35	Inspektorat
		Jumlah laporan hasil pengawasan khusus	85	Inspektorat
		Jumlah frekuensi rakor pengawasan	0	Inspektorat
		Jumlah frekuensi evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI	4	Inspektorat
		Terlaksananya Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah	6	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	50	Inspektorat
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen SOP	0	Inspektorat
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Setda

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perkara	150	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Usulan Raperda Prioritas	10	Setda
		Terpublikasinya Peraturan Perundang - undangan	20	Setda
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	30	Setda
		Peningkatan Pemahaman Hukum Daerah	780	Setda
		Terpenuhinya Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	Disperindag
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum	Tersedianya Sim Aplikasi dan Buku Monografi Kecamatan	1	Setda
		Terpasangnya dan terbangunnya Pilar Batas Kecamatan	80	Setda
		Tersedianya Dokumen Kajian Tipologi Kecamatan	1	Setda
		Tersedianya Buku Inventarisasi Data Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240	BKPPD

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan karir, penempatan kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, pelantikan, peningkatan status, ujian dinas, ujian penyesuaian ijasah, pembinaan kepegawaian dan pengembangan karir	2524	BKPPD
		Tersedianya sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi penerimaan CPNS	2	BKPPD
		Tersedianya keakuratan data pegawai	11500	BKPPD
		Tersedianya ID Card Pegawai	2500	BKPPD
		Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin dan monitoring evaluasi dan pelaporan	60	BKPPD
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Kepegawaian Daerah	2	BKPPD
		Terlaksananya penegakan etika dan disiplin pegawai	2	BKPPD
		Terselenggaranya Pembinaan & Pengembangan Aparatur	150	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan	Terpilihnya Pemenang Penyelenggaraan Lomba Kelurahan	3	Setda
		Terlaksananya Pembinaan Kecamatan	17	Setda
		Tersedianya	28	Setda



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Dokumen Profil Kelurahan		
		Tersedianya dokumen dan pelaporan penyelenggaraan pemeritahan kecamatan/kelurahan	29	Kecamatan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program peningkatan pendapatan daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah	8	Dispenda, Kecamatan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Daerah Setiap Tahun	100	Dispenda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terpenuhinya Data Realisasi Pendapatan Daerah yang Akurat	4	Dispenda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Tepenuhinya Data Rencana Target Pendapatan Daerah Setiap Tahun	2	Dispenda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan kajian peraturan perundangan dan penyusunan produk hukum terkait investasi dan perijinan nonperijinan	2	BPMPTSP
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Perijinan dan Nonperijinan	Penyediaan pedoman pelayanan dan sosialisasi informasi perijinan dan nonperijinan	1	BPMPTSP
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Koordinasi Perijinan dan Non Perijinan	Koordinasi BPMPTSP dengan SKPD Teknis terkait/lembaga PTSP/Instansi/Lembaga lainnya	48	BPMPTSP
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Survey Perijinan dan Non Perijinan	Pelaksanaan peninjauan lapangan berkas jenis perijinan dan nonperijinan	2	BPMPTSP
	Program Survey Perijinan dan	Verifikasi BAPL Perijinan	300	Dinas Cipta Karya

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
	Non Perijinan			
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pelayanan perijinan dan nonperijinan	2	BPMPSTP
		Prosentase penyelesaian pengaduan perijinan	78,00%	BPMPSTP
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan Yang Terkait dengan Perijinan dan Non Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan nonperijinan	Indeks 5	BPMPSTP
		Jumlah Kecamatan Sasaran Operasi Penertiban Perijinan Terpadu	29	BPMPSTP, Kecamatan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Data Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Database Perijinan yang updated	29	BPMPSTP
	Program Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan	1	BPMPSTP
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Daftar Inventaris BMD Yang Valid	14	BPKAD
		Administrasi Aset Daerah Yang Tertib	5	BPKAD
		Tersedianya Dokumen Barang Inventaris Daerah	4	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Jumlah SKPD terkait diklat penyelenggaraan SPIP	0	Inspektorat
		Jumlah SKPD dalam penyusunan LHKASN	64	Inspektorat

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
		Indikator Kinerja	Target	
		Jumlah SKPD terkait sosialisasi pengendalian gratifikasi	64	Inspektorat
		Jumlah laporan rapat koordinasi pejabat daerah bidang pengawasan	1	Inspektorat
		Jumlah SKPD yang telah membentuk zona integritas	3	Inspektorat
		Jumlah SKPD yang telah melakukan pemilihan tunas integritas	3	Inspektorat
		Tersedianya Dokumen Pendukung Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	12	Setda
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengiriman Peserta Bintek ULP	30	Setda
		Terlaksananya Sosialisasi ULP	300	Setda
		Tercapainya Pengadaan Barang/Jasa	931	Setda
		Tersedianya Tenaga Pelayanan ULP	38	Setda
		Tersedianya Dokumen Hasil Forum Group Diskusi	2	Setda

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS**  
**KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017**

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2017 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2014 dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Rencana program dan kegiatan prioritas yang telah disusun ini telah mewakili pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tangerang, aspirasi dan kepentingan masyarakat yang selanjutnya dijabarkan kedalam Renja SKPD Tahun 2017 dalam lingkup Kabupaten Tangerang sehingga memberi manfaat dan nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas secara jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Sasaran, Program dan SKPD Pelaksana Kabupaten Tangerang Tahun 2017**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
	Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	Disdik, Cipta Karya
	Program Pendidikan Menengah	Disdik
	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik
	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Disdik
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor Perpustakaan
2 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan umum	Dinas Kesehatan
	Program penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cipta karya
	Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan RS	RSUD Balaraja
	Program Keluarga Berencana	BKKBD
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Cipta Karya
	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Dinas Cipta Karya
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLHD
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Setda
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Dinas Bina Marga
	Program pengembangan perumahan	Dinas Cipta Karya
3 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Diperindag
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Diperindag

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Diperindag
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	DPPKP
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DPPKP
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	DPPKP
	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	DPPKP
	Program pengembangan budidaya perikanan	Diskanla
	Program pengembangan perikanan tangkap	Diskanla
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Diskanla
	Program pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan	Diskanla
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam pesisir	Diskanla
	Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Diskanla
	Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	DKUKM
	Program Peningkatan Kuailitas Kelembagaan Koperasi	DKUKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	DKUKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	DKUKM
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Diperindag
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISPORABUDPAR
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISPORABUDPAR
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	DPPKP
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DPPKP
	Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Cipta Karya
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Dispenda
	Program pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah	Dispenda
	Program pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Dispenda

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Program perencanaan pendapatan daerah	Dispenda
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Dispenda
	Program pembangunan gedung pemerintahan	Dinas Cipta Karya
4 Menurunnya angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINSOS
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINSOS
	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	DPPKP
	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	BPMPPD
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	BPMPPD
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	BPMPPD
	Program peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa	BPMPPD
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	BPMPPD
5 Meningkatnya kesempatan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Disnaker
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Disnaker
6 Menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Disdik
	Program Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepahlawanan	Dinsos
	Program Pembangunan Gedung Pemerintahan	Dinas Cipta Karya
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	DISPORABUDPAR
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DISPORABUDPAR
	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Dinas Cipta Karya
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	DISPORABUDPAR
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DISPORABUDPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	DISPORABUDPAR

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	BPMPPD
	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	BPMPPD
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	BPMPPD
	Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	BPMPPD
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	SATPOL PP
	Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat	SATPOL PP
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SATPOL PP
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	SATPOL PP
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	SATPOL PP
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
8 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi inventasi	BPMPTSP
	Program promosi dan kerjasama investasi	BPMPTSP
	Program pengembangan sistem investasi pelayanan perijinan dan non perijinan	BPMPTSP
9 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan mengotimalkan keseimbangan ruang dan lingkungan	Program Perencanaan Tata Ruang	DTR
	Program Pemanfaatan Ruang	DTR
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DTR
	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	DBMSDA
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Setda
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	DBMSDA
	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	BLHD
	Program Pengendalian	BLHD



SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	SKPD PENDUKUNG
1	2	3
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	BLHD, DKP
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Setda
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLHD
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DKP
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Setda
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Dishub
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub
	Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	DKP
	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	DISHUB
	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	DISHUB
	Program peningkatan pelayanan angkutan	DISHUB
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	DISHUB
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	DISHUB
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Diperindag
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
	Program Pengelolaan RTH	DKP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DKP
	Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	DKP
10 Meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan data / informasi	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	BAPPEDA
	Program peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan	BAPPEDA

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	daerah	
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BAPPEDA
	Program pembangunan gedung pemeritahan	Dinas Cipta Karya
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	Diskominfo
	Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen	Diskominfo
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diskominfo
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Diskominfo
	Program Kerjasama, Informasi dan Media Massa	Diskominfo
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	INSPEKTORAT
	Program peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	INSPEKTORAT
	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	BKPPD
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPPD
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Barang Daerah	BPKAD
	Program Perencanaan Perijinan dan Non Perijinan	BPMPTSP
	Program Koordinasi Perijinan dan Non Perijinan	BPMPTSP
	Program Survey Perijinan dan Non Perijinan	BPMPTSP
	Program Pengembangan administrasi layanan perijinan dan non perijinan	BPMPTSP
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
	Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum	Sekretariat Daerah, Kecamatan
	program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan	Sekretariat Daerah
	program peningkatan kapasitas perangkat daerah	Sekretariat Daerah
	Program penataan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah
	Program peningkatan sistem	Sekretariat Daerah

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>SKPD PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	
	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah
	Program kerjasama informasi dan media massa	Sekretariat Daerah, semua SKPD
	Program kerjasama pembangunan	Sekretariat Daerah, Kecamatan, Bappeda
	program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaat tanah	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	KAD
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pengolahan dan Penyimpanan arsip	KAD
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	KAD
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	KAD
	Program Pelayanan Administarasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
	Program Peningkatan Pelayanan RS	RSUD TANGERANG
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Kantor Pemakaman Daerah
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kantor Pemakaman Daerah
	Program Pemakaman	Kantor Pemakaman Daerah

Adapun rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2018 yang merupakan tahapan tahun kelima. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penanggaran, maka RKPD Kabupaten Tangerang merupakan sumber dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2017.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan tersusunya RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2017 mampu mendorong pencapaian Visi, Misi, Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang.

Tigaraksa, Mei 2016

Bupati Tangerang

Ttd.

A Zaki Iskandar